

**IMPLIKASI PENERIMAAN SIPRUS DALAM KEANGGOTAAN
UNI EROPA TERHADAP PENERIMAAN TURKI
DALAM KEANGGOTAAN UNI EROPA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)

**FANY DASTANTA
NPM. 0706187943**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JUNI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fany Dastanta
NPM : 0706187943
Tanda Tangan :
Tanggal : 26 Juni

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Fany Dastanta
NPM : 0706187943
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Tesis : Implikasi Penerimaan Siprus Dalam Keanggotaan
Uni Eropa Terhadap Penerimaan Turki Dalam
Keanggotaan Uni Eropa.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hubungan Internasional pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat

Sekretaris Sidang: Dwi Ardhanariswari S.Sos, M.A., M.Phil

Pembimbing : Edy Prasetyono, P.hD

Penguji : Haryadi Wirawan,P.hD



Handwritten signatures of the exam board members, each enclosed in a dotted-line box. The signatures are: (Makmur Keliat), (Dwi Ardhanariswari S.Sos, M.A., M.Phil), (Edy Prasetyono, P.hD), and (Haryadi Wirawan, P.hD).

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Juni 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah saya ucapkan sebagai ungkapan terima kasih sekaligus rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya, maka saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam meraih gelar Magister of Science Jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa begitu banyak hal yang telah orang lain perbuat untuk saya, sehingga saya mampu melewati proses perkuliahan sampai penyelesaian tesis. Karena itu, rasa terima kasih yang setulusnya saya ucapkan pada:

1. Kedua orang tua, serta saudara-saudara saya yang telah begitu berjasa dalam memberikan bantuan moril dan materil, sehingga saya dapat menempuh perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini.
2. Edy Prasetyono, P.hD, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa dalam memberikan pemahaman, konteks pemikiran, serta meluangkan waktu untuk mengarahkan saya dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Makmur Keliat, selaku Ketua Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia, yang telah memberikan saya kesempatan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Andi Widjajnto, S. Sos., M. Sc., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia, yang telah memberikan saya kesempatan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dwi Ardhanariswari S.Sos., M.A., M.Phil, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia, yang telah memberikan saya kesempatan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Untuk kelompok Mps: Idil, Lucy, Lita, Elsi, dan Dewi O. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk Devi, Prasajo, Ubay, Dewi Biasane dan Bagus terimakasih ya atas tumpangannya.

7. Sahabat-sahabat saya yang telah menjadi rekan, baik dalam perkuliahan maupun pergaulan, dan sangat berjasa bagi saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan dan perhatian dari semua pihak, saya berharap semoga pihak-pihak yang terlibat, mendapatkan balasan atas segala kebaikannya dan semoga tesis ini memberikan kontribusi terhadap dunia ilmu pengetahuan.

Salemba, 22 Juni 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fany dastanta
NPM : 0706187943
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implikasi Penerimaan Siprus dalam Keanggotaan Uni Eropa Terhadap Proses
Penerimaan Turki dalam Keanggotaan Uni Eropa

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2009
Yang menyatakan

(Fany Dastanta)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kerangka Pemikiran	9
1.5 Asumsi.....	8
1.6 Hipotesis.....	12
1.7 Definisi Operasional.....	16
1.8 Kajian Pustaka	17
1.9 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	30
1.10 Sistematika Penulisan.....	31
2. UNI EROPA.....	33
2.1 Sejarah Integrasi Uni Eropa.....	33
3. PROSES MASUKNYA SIPRUS DALAM KEANGGOTAAN UNI EROPA.....	52
3.1 Tinjauan Umum Siprus.....	52
3.2 Hubungan Kerjasama siprus Uni Eropa	68
3.3	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem internasional terdapat suatu pola ketergantungan antar negara-negara di dunia. Akan tetapi yang banyak terjadi bukanlah pola hubungan yang sejajar, dalam arti banyak perbedaan diantara aktor-aktor tersebut dan kapasitas mereka untuk mempengaruhi keseluruhan sistem yang beragam.

Pada hakikatnya suatu hubungan antar negara selalu diwarnai oleh dua macam situasi yaitu, damai dan konflik. Kenyataan ini tidak dapat dihindarkan mengingat setiap negara tidak memiliki keinginan dan kepentingan yang sama satu dengan lainnya. Hal ini dapat memunculkan konflik yang merupakan suatu hal yang selalu ada dalam Hubungan Internasional

Dewasa ini merupakan masa yang penuh dengan dinamika konflik di berbagai kawasan dunia. Berbagai aspek (ekonomi, kekuasaan, etnis, agama) mewarnai berbagai pertikaian yang melibatkan individu, kelompok, dan negara. Para pengamat internasional bahkan menyebut dunia yang kita diami saat ini sebagai “*turbulent world*” dimana gangguan keamanan, dan kekerasan mewarnai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa konflik atau pertentangan yang terjadi tidak bisa diselesaikan. Jalan keluar lagi penyelesaian konflik tersebut pasti akan didapat meskipun harus melalui proses dan jangka waktu lama.

Salah satu konflik yang mewarnai tatanan internasional dan belum ada penyelesaiannya yakni konflik yang terjadi di Siprus. Siprus merupakan negara di kepulauan Mediterania, yang terdiri dari dua komunitas etnis, yang terlibat konflik cukup lama bahkan konflik tersebut telah mengakar cukup lama dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Siprus merupakan sebuah negara kecil di kepulauan Mediterania dan terletak pada titik pertemuan dari tiga benua yakni benua Eropa, Asia, dan Afrika dan berada 40 mil dari Turki dan 350 mil sebelah timur Yunani. Hal ini selain menambah keuntungan strategis, bagi kepentingan dan pembangunan di Siprus namun juga membawa kerugian bagi Siprus. Populasi penduduk terdiri dari 79%

Siprus Yunani, 18% Siprus Turki, 4% keturunan Armenia, Maronite, dan Latin Cypriots.¹

Kehadiran kedua komunitas yang berbeda etnis serta agama tersebut, dimana Siprus Yunani yang memeluk agama Kristen merupakan keturunan Yunani dan Siprus Turki yang merupakan keturunan Turki dan beragama Islam adalah merupakan pemicu munculnya konflik di Siprus.

Lokasi Siprus yang strategis membuat Siprus menjadi ajang perebutan banyak kepentingan selama bertahun-tahun. Selain itu juga Siprus menjadi sasaran dari invasi dan arena yang potensial bagi munculnya konflik. Siprus pernah berada dibawah kekuasaan bangsa Yunani, Asiria, Persia, Romawi, dan Turki serta Inggris yang hingga saat ini masih terlibat pada kebudayaan di Siprus.

Setelah diperintah selama lebih dari tiga abad oleh kekaisaran Ottoman dari Turki, Siprus kemudian menjadi bagian dari Inggris sampai memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960. Sejak berada dibawah koloni Inggris sudah muncul keinginan dari komunitas Siprus Yunani untuk menentukan nasib sendiri yang diikuti oleh keinginan untuk menghubungkan diri dengan Yunani. Namun disaat yang sama nasionalisme diantara komunitas Siprus Turki meningkat dan menimbulkan pertentangan antara nasionalis yang diikuti dengan penolakan Siprus Turki terhadap upaya penentuan nasib sendiri (*self determination*) atau bentuk lain dari kepemimpinan pemerintah yang dipimpin oleh golongan mayoritas.²

Pada tahun 1960, the London and Zurich agreement di tandatangi dimana Inggris, Turki, dan Yunani menjadi kekuatan penjamin dalam persetujuan tersebut. Persetujuan tersebut menghasilkan negara republik Siprus yang bikomunal. Negara dibagi berdasarkan Siprus Turki dan Siprus Yunani yang memiliki status sebagai pendiri dan kedudukan yang sama. Namun secara mendasar akibat dari konstitusi baru tersebut menjadi hampir tidak mungkin untuk berfungsinya negara secara efektif karena konstitusi ditujukan kepada penciptaan pembagian-pembagian dibandingkan dengan mempromosikan persatuan dan kerjasama.

¹ www.kypros.org. 12 September 08, jam 23.30 WIB

² www.iycos.com 12 September 08. jam 23.15 WIB

Tiga tahun setelah memperoleh kemerdekaannya, hubungan antara masyarakat Siprus Turki dan Siprus Yunani bertambah buruk dimana Siprus Yunani mulai melakukan tindakan kejam terhadap komunitas minoritas Siprus Turki dengan memaksa mereka pindah ke daerah kantong dan menolak hak-hak mereka.

Akhirnya komunitas Siprus Turki meninggalkan tanah dan rumah mereka dan pindah ke daerah kantong bagi komunitas siprus turki yang luasnya hanya 3% dari keseluruhan pulau tersebut. Padahal menurut konstitusi yang ditetapkan pada tahun 1960 komunitas siprus turki mendapatkan 30% dari keseluruhan pulau tersebut.

Kekerasan antara kedua komunitas tersebut meletus antara 1964-1967 yang mengakibatkan 350 warga siprus turki dan 250 Siprus Yunani meninggal. Tahun 1964, PBB mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Siprus. Kehadiran badan dunia itu membentangkan pagar berduri sebagai batas serta menempatkan pasukan perdamaian yang diharapkan mampu memberi angin segar bagi upaya penyelesaian konflik yang mengakar cukup lama dalam suatu masyarakat, seperti yang terjadi di Siprus perubahan-perubahan politik dunia pasca perang dingin telah mendorong masyarakat Eropa untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang jauh berbeda dengan sebelumnya.

Solidaritas dan kesiapan masyarakat Eropa untuk mendukung keberhasilan gerakan pembaharuan di Eropa Tengah dan Timur dinyatakan oleh Presiden Prancis Francois Mitterrand di Paris pada tanggal 20 November 1991. Mitterrand menyatakan

*we declare our selfs ready to corporate on everything which makes possible the recovery of Eastern European countries which are going through a crisis... we are ready to contribute all our means to this restoration, to the reestablishmet of healthy economi at the price, a sinequa non condition after cormfirmed return of democracy.*³

³ Agus R. Rahman. *Penelitian Perubahan Konfigurasi Ekonomi Politik Eropa: Pedalaman Perluasan masyarakat Eropa*. Pusat penelitian dan Pengembangan Politik dan kewilayahan LIPI. Jakarta. Hlm 70

Artinya: Uni Eropa siap untuk bekerjasama dalam hal perbaikan Eropa Timur dalam melewati kerisis yang mereka hadapi... Uni Eropa juga siap untuk membantu perbaikan dalam rangka perbaikan ekonomi, setelah mereka menjadi negara yang demokrasi

Perubahan sistem internasional mendorong negara-negara di Eropa terutama yang tergabung dalam masyarakat Eropa untuk mulai meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dibidang ekonomi, politik, masalah hukum dan urusan dalam negeri. Hal itu terbukti dengan pembentukan Uni Eropa melalui perjanjian Maastricht yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1993 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1993.⁴

Uni Eropa membuka kesempatan bagi negara-negara baru dikawasan Eropa Tengah dan Timur melalui penerapan kebijakan perluasan keanggotaan. Perluasan keanggotaan merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Uni Eropa karena perluasan tersebut meliputi jangkauan yang cukup luas serta adanya perbedaan seperti latar belakang sejarah, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, demokrasi serta populasi dari negara-negara kandidat anggota.

Perluasan tersebut akan meliputi penambahan wilayah mencapai 34% serta penambahan populasi hingga mencapai 105 juta.

Perdebatan panjang mengenai diterima tidaknya Turki sebagai anggota Uni Eropa disebabkan sikap negara tersebut yang tetap tidak menerapkan perjanjian tahun 2005. Perjanjian tersebut mewajibkan Turki membuka semua pelabuhan dan bandar udaranya kepada 10 anggota baru Uni Eropa, di antaranya Siprus.

Masalahnya Turki saat ini tidak mau mengakui pemerintahan Siprus yang didominasi keturunan Yunani. Sementara itu, di Siprus sendiri masih berlangsung konflik politik yang berkepanjangan sejak 1974 antara warga keturunan Yunani, yang menguasai selatan Siprus dan warga keturunan Turki yang mendiami wilayah utara pulau tersebut.

Sikap Turki atas Siprus tersebut membuat sebagian anggota Uni Eropa menginginkan agar Turki patut diberi pelajaran. Namun, sebagian anggota Uni Eropa meminta agar perhimpunan tersebut jangan mengasingkan Turki mengingat

⁴ Broto R. Utomo. *Studi Kawasan Uni Eropa*. Pusat Penelitian dan Latihan DEPLU. Jakarta. Hlm.2

negara di ujung timur Eropa yang berbatasan dengan Irak, Iran, dan Suriah tersebut memiliki peran yang strategis.⁵

Selain itu, para menlu Uni Eropa menekankan pentingnya setiap tahun memantau perkembangan proses penerimaan keanggotaan Turki, yang mulai dirundingkan sejak Oktober 2005. Bila diterima, Turki akan menjadi negara muslim pertama di Eropa yang menjadi anggota Uni Eropa. Proses keanggotaan tersebut diperkirakan memakan waktu hingga sepuluh tahun.

Namun, selama ini belum ada tenggat baru untuk mengkaji perkembangan proses tersebut. Sebagian menlu Uni Eropa akhirnya meminta pengertian dan kesabaran Turki atas permohonannya menjadi anggota baru. “Turki harus mengerti bahwa tidak ada jalan pintas,” kata Menteri Luar Negeri Siprus, George Lillikas.⁶ Sebagai konsesi atas ditundanya keanggotaan Turki, para menlu Uni Eropa meminta agar mereka mencabut embargo ekonomi kepada masyarakat Siprus di bagian utara.

Pemerintah Turki sebelumnya menegaskan bahwa penyelesaian pergolakan di Siprus jangan ditimpakan kepada mereka, namun harus diselesaikan oleh Uni Eropa. Caranya, Uni Eropa harus terlebih dahulu mengakhiri blokade ekonomi kepada penduduk Siprus keturunan Turki.

“Kami tidak mau disuruh memilih, mengutamakan masalah Siprus atas keanggotaan di Uni Eropa,” kata Menteri Kehakiman sekaligus juru bicara Pemerintah Turki, Cemil Cicek di Ankara. Dengan kata lain, Turki berupaya mengamankan kepentingannya di Uni Eropa sekaligus melindungi saudara-saudara mereka di Siprus.⁷

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pada dasarnya keanggotaan Masyarakat Eropa terbuka bagi sesama negara Eropa lainnya. Berdasarkan Pasal 8 akta tunggal Eropa yang diamandemen dari

⁵ Keanggotaan Turki di Uni Eropa Ditunda, Sinar Harapan, 12-12-06. diakses melalui www.google.com

⁶ Ibid

⁷ Opcit

paragraf pertama pasal 237 perjanjian Roma, perjanjian menandai terbentuknya MEE di tahun 1957, dinyatakan:

*Any European state may, apply to become member of the community. It shall address its application to the council, which shall act unanimously after consulting the commission and after receiving the assent of the European parliament which shall act by, an absolute majority, of its component members.*⁸

Artinya: Setiap negara Eropa berhak untuk mencalonkan diri sebagai bagian komunitas Eropa, dan aplikasi tersebut diterima oleh council, dan setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota lainnya barulah mereka diterima menjadi anggota.

Pada tahun 1993, perjanjian Maasrich, yang menandai perubahan nama masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa telah diratifikasi. Perubahan tersebut bertujuan untuk mempertegas identitas Eropa atas para negaranya serta sebagai upaya memperkuat integrasi Eropa melalui tiga pilar. Ketiga pilar tersebut adalah: kerangka kerja masyarakat Eropa, kerjasama kebijakan luar negeri, dan kerjasama dalam bidang hukum serta masalah-masalah dalam negeri.⁹

Pesatnya perkembangan yang dicapai oleh Uni Eropa serta didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik membuat negara-negara Eropa lainnya termasuk Siprus tertarik untuk bergabung menjadi anggota. Penerimaan anggota baru Uni Eropa telah diatur dalam pasal 49 *European Union Treaty*, yang menyatakan bahwa Dewan Uni Eropa harus secara bulat setuju untuk membuka negosiasi, setelah berkonsultasi dengan Komisi Eropa dan menerima persetujuan resmi dari Parlemen Eropa.

Uni Eropa memiliki standar, meliputi kriteria politik dan ekonomi yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang ingin menjadi anggota. Pada tanggal 22 Juni 1993, Dewan Eropa bertemu di Kopenhagen merumuskan kriteria keanggotaan baru Uni Eropa. Syarat-syarat keanggotaan Uni Eropa adalah:

1. Adanya Institusi yang stabil yang dapat menjamin berjalannya demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap minoritas;
2. Adanya ekonomi pasar dengan kapasitas yang memungkinkan dalam menghadapi tekanan kompetitif dan tekanan pasar Uni Eropa;

⁸ Agus R. Rahman. Ibid. Hlm 54

⁹ Jan Erik Lane dan Staveoersson. *European Politicis : An Introduction*: Sage Publication Ltd. London. Hlm 69

3. Kemampuan memenuhi kewajiban keanggotaan termasuk taat pada cita-cita politik, ekonomi, dan moneter Uni Eropa.

Perluasan keanggotaan juga akan mengalami masalah mengenai besarnya biaya, baik biaya primer maupun biaya sekunder, yang harus ditanggung oleh Uni Eropa. Biaya primer yaitu biaya rutin untuk menjalankan roda administrasi Uni Eropa bantuan keuangan, bantuan proyek dan bantuan teknis, dan subsidi-subsidi dalam penerapan kebijakan bersama. Pelaksanaan *Common Agriculture Policy* (CAP) serta *Common Transportation policy*, terutama di tunjukkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota yang miskin dan berupaya mencapai pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Uni Eropa.

Tanggal 1 Mei 2004 merupakan saat bersejarah bagi perluasan keanggotaan Uni Eropa. Uni Eropa saat ini terdiri dari 15 negara akan bertambah menjadi 25 negara. Dari 13 calon negara baru (Bulgaria, Siprus, Czech Republik, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, dan Turki), 10 diantaranya (kecuali Bulgaria, Rumania, Turki) akan menjadi anggota Uni Eropa. Bulgaria dan Rumania direncanakan bergabung tahun 2007, sedangkan Turki belum ditentukan saatnya.

Prinsip perluasan Uni Eropa adalah semua calon negara harus memenuhi ketentuan yang dimiliki Uni Eropa saat ini, antara lain menyangkut isu politik (kecuali bagi Siprus dan Malta), hukum, serta kerjasama lainnya seperti dibidang industri, lingkungan, perhubungan, bea cukai dan liberalisasi perdagangan termasuk isu yang berkaitan dengan perdagangan. Perluasan Uni Eropa bertujuan untuk secara progresif membentuk perdagangan bebas antara Uni Eropa dengan calon negara anggota, dengan dasar repositas namun dalam kaidah asimetris. Dengan kata lain, liberalisasi akan lebih cepat diimplementasikan oleh Uni Eropa di satu sisi dibandingkan calon negara anggota sisi lainnya.

Persyaratan untuk menjadikan untuk menjadi anggota Uni Eropa mencakup kurang lebih 30 pokok perundingan untuk disepakati yaitu meliputi: *free movement of goods, freedom of movement persons, freedom to provide services, free movement of capital, company law, competition policy, agriculture*

, fisheries, transport policy, taxation, economic and monetary union, statistic and social policy, energy, industrial policy,....

Perluasan Uni Eropa dengan berbagai komitmen yang disepakati calon negara anggota akan menciptakan peluang yang semakin besar, namun sebaliknya juga dapat mengancam eksistensi produk dari produk ekspor mitra dagangnya. Untuk itu setiap negara yang ingin melakukan transaksi dagang dengan anggota negara Uni Eropa perlu melakukan langkah strategis (proaktif). Untuk meningkatkan kesiapannya, sehingga perluasan Uni Eropa dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja ekonomi khususnya dibidang ekonomi khususnya di bidang industri dan perdagangan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya pada aspek mengenai implikasi masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa. Kurun waktu penelitian ini dibatasi sejak tahun 2004-2008, karena pada tahun 2004 Siprus diterima menjadi anggota penuh (*full membership*) dalam Uni Eropa.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Implikasi Penerimaan Siprus Dalam Keanggotaan Uni Eropa Terhadap Proses Penerimaan Turki Dalam Keanggotaan Uni Eropa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Siprus terhadap proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

1.3.1 Manfaat Penelitian

Sebagai referensi bagi para peneliti yang menaruh minat terhadap kajian Uni Eropa, dan memberikan warna terhadap fenomena yang saat ini terjadi di kawasan Eropa.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Pendekatan

Untuk mengetahui apakah implikasi penerimaan Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa, peneliti akan menggunakan perspektif neo-liberal institusionalis oleh Robert O. Keohane.

Perspektif ini memiliki empat asumsi dasar yaitu:

1. Neo-liberal institusionalis, mengakui keberadaan aktor negara dan non negara. Negara merupakan perwakilan resmi yang memiliki legitimasi dari masyarakat;
2. Bagi neo-liberal institusionalis, struktur sistem internasional berada dalam kondisi yang anarki. Kondisi sistem internasional yang anarki dapat diatasi melalui pembentukan institusi internasional yang berperan sebagai mediator. Selain itu, institusi internasional juga berperan sebagai tempat penyelesaian hukum internasional dan masalah lainnya.
3. Interaksi pada tingkat regional dan global semakin meningkat sehingga akan berkembang menjadi tahapan intergenerasi
4. Neo-liberal institusionalis berpendapat bahwa dunia ini bukan zero sum game dimana satu aktor menang sedangkan aktor lainnya kalah. Namun berupa *variabel-sum game* yakni, melalui kerjasama, semua aktor akan mendapatkan keuntungan bersama.¹⁰

Dalam penelitian ini, neo-liberal institusionalis melihat pembentukan masyarakat baja dan batu bara (*European Coals Steel Community-ECSC*) di tahun

¹⁰ Robert O. Keohane. *International Relations and State Power*. Westview Press 1989. Hlm 8-9

1951 merupakan cikal bakal terjadinya tahapan intergenerasi di kawasan Eropa. Diawali dengan rencana Schuman, yang melatar belakangi pembentukan pasar bersama industri baja dan batu bara atau yang dikenal dengan nama masyarakat baja dan batu bara Eropa sebagai suatu cara yang rasional untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan sosial serta kebijakan-kebijakan transportasi.

Inetraksi pasar baja tersebut akhirnya meluas kesektor lainnya. Masyarakat baja dan batu bara Eropa berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa dan Masyarakat Energi atom Eropa (Euratom) di tahun 1958. Pada tahun 1965, kedua organisasi tersebut melebur menjadi Masyarakat Eropa. Sehingga pada tahun 1993 terbentuklah kerjasama di kawasan Eropa Barat yang bergabung dalam Uni-Eropa.

Perjuangan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa telah dimulai sejak tahun 1963. Perdebatan mengenai ambisi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa (UE) lebih didekatkan pada isu hak-hak asasi manusia dan reformasi demokratis di negara itu. Padahal, harapan rakyat Turki menjadi anggota karena keinginan untuk bisa masuk dalam keanggotaan Uni Eropa dan itu akan membawa keuntungan-keuntungan ekonomi bagi Turki. Menurut Prof Semih S Tezcan dari Bogazici University, isu politik yang lebih mengemuka membuat Turki akan sulit diterima dalam keanggotaan Uni Eropa.

Janji 10 tahun akan dibahas hanyalah sebuah permainan yang akhirnya berakhir dengan penolakan terhadap Turki. "Padahal, dari sisi ekonomi, negara-negara Uni Eropa sudah banyak mengambil manfaat ekonomi dengan mengirim banyak material ke Turki. Sekarang, dengan alasan politik, mereka hanya mengambil waktu untuk menolak keanggotaan Turki," ujar Semih. Sesuai perhitungan Biro Perencanaan Pusat Belanda, perdagangan Turki dengan Uni Eropa akan meningkat paling tidak sepertiganya, sesudah Turki menjadi anggota Uni Eropa. Kesejahteraan penduduk akan bisa naik sebesar 9 persen dibandingkan sebelum menjadi anggota Uni Eropa.¹¹

Akan tetapi, meskipun Semih mengatakan Uni Eropa sudah banyak mengambil keuntungan, tetapi perlu diakui, keuntungan ekonomi bagi Uni Eropa sangatlah terbatas. Turki memiliki potensi sebagai tempat membangun pabrik karena upah

¹¹ Turki Berjalan ke Eropa Demi Perbaikan, Kompas, 25-04-2005. yang diakses melalui www.google.com

buruh rendah. Dengan sekitar 60 sampai 70 juta penduduk, Turki juga menjadi pasar yang penting meskipun standar kesejahteraan rata-rata penduduk Turki masih harus ditingkatkan dibandingkan negara Eropa lainnya. Investasi asing yang sangat dibutuhkan Turki adalah di sektor pertanian. Selain itu sektor infrastruktur dan lingkungan.¹²

Peluang itu sangat mungkin karena, menurut berbagai laporan dalam beberapa tahun belakangan, prestasi Turki di mata lembaga internasional sedikit membaik. Ini semua terkait dengan program pemulihan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang membangkitkan negara itu dari krisis ekonomi. Seperti yang berlaku di semua negara, IMF menjadikan reformasi di bidang ekonomi sebagai syarat pinjaman. Hal ini disyaratkan karena Turki juga memiliki sistem birokrasi yang rumit, seperti di Indonesia.

Hal itulah yang membuat peluang terjadinya ekonomi biaya tinggi, setiap kali ada pengusaha yang harus berhubungan dengan birokrasi. Turki juga harus memenuhi pula standardisasi stabilitas ekonomi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi menurut versi Uni Eropa.

Tanggapan serius dari Uni Eropa memang menjadi dambaan rakyat Turki, mengingat negara ini sudah mengajukan secara resmi untuk menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1999.¹³

Sejarah modern Turki memang sudah mencatat bagaimana keinginan kuat dari negara itu untuk mendekatkan diri dengan Barat. Bapak modern Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mendorong bangsa dan negaranya yang dibangun dari kehancuran Kekaisaran Ottoman untuk mengikuti pola pembangunan Barat yang sekuler, yang menekankan pembangunan dunia tanpa harus meninggalkan agama sebagai urusan pribadi masing-masing.

Perdebatan masih panjang. Namun, jika benar Turki ingin masuk ke Uni Eropa, konsekuensinya tidak kecil. Turki wajib mengakui Siprus sebelum perundingan dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2005. Hal ini bukan sebuah keputusan yang gampang, mengingat persoalan Siprus ini ibarat duri dalam daging yang sudah terjadi sejak 30 tahun lalu.

¹² Ibid

¹³ Ibid

Bagi Erdogan, merupakan hal yang sulit untuk melepaskan Siprus. Namun, di sisi lain tuntutan untuk bergabung dengan Uni Eropa juga begitu kuat. Pilihannya hanyalah bagaimana pemerintahan Turki mampu memengaruhi Uni Eropa agar melonggarkan persyaratan. Apabila tidak, mereka akan menempuh jalan terjal untuk menjadi anggota Uni Eropa seperti yang mereka impikan.¹⁴

Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa akan tergantung dari kemajuan usaha penyatuan kembali kedua bagian Pulau Siprus, sedangkan disisi lain menurut Rauf Denktash, Siprus yang bersatu hanya akan mengurangi hak-hak warga Siprus keturunan Turki.

Siprus terpecah sejak serbuan pasukan Turki tahun 1974 ketika terjadi pemberontakan yang dilancarkan oleh pendukung integrasi dengan Yunani. Turki menempatkan puluhan ribu tentara di bagian utara Pulau Siprus, dan merupakan satu-satunya negara yang mengakui negara Siprus-Turki. Rauf Denktash tidak mau melanjutkan perundingan antara kelompok Turki dan Yunani yang tadinya disponsori oleh PBB.¹⁵

1.4.1 Kerangka konseptual

Hubungan Internasional adalah kajian yang mempelajari berbagai fenomena yang melintasi batas nasional suatu negara yang dilakukan oleh para aktor. Para aktor tersebut meliputi individu, bangsa, kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, kekuasaan-kekuasaan, tekanan-tekanan, proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia.¹⁶

Dalam penelitian ini, terdapat tiga aktor internasional yang terlibat yaitu Uni Eropa sebagai suatu organisasi internasional, Siprus sebagai negara anggota Uni Eropa, dan Juga Turki sebagai negara yang hendak bergabung dalam Uni Eropa. Negara didefinisikan sebagai suatu entitas legal yang dikuasai oleh sebuah otoritas pusat yang mempunyai wewenang untuk membuat hukum-hukum, peraturan-peraturan, serta keputusan dan kemudian menjalankan hukum-hukum

¹⁴ Opcit

¹⁵ www.VOA.com Uni Eropa dengan Turki.

¹⁶ Suwardi Wiriatmaja. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Pustaka Tinta Mas. Bandung. 1970. Hlm 33

dan peraturan-perturan, dan keputusan-keputusan itu diambil dalam batasan geografis.¹⁷

Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi bata-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menandai terjadinya suatu hubungan internasional adalah adanya interaksi diantara aktor-aktor di dalam sistem internasional. Pada dasarnya, tujuan utama dari studi Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku dari para aktornya baik negara ataupun non negara di arena transaksi internasional.

Negara bangsa pun saling berinteraksi dengan organisasi internasional, perusahaan multi nasional, kelompok sub-nasional, maupun individu tertentu.¹⁹

Interaksi internasional merupakan proses-proses komunikasi dan pertukaran antar aktor-aktor dalam sistem internasional yang relevan secara politis. Oleh karena itu, interaksi internasional akan mencerminkan sumberdaya, serta tindakan-tindakan dari aktor tersebut, dan akan dipengaruhi oleh konteks dan tingkatan dimana interaksi internasional tersebut terjadi.

Interaksi-interaksi yang terjadi dalam sistem internasional juga diperbaharui oleh adanya kepentingan nasional dari aktor-aktor yang terlibat dalam interaksi tersebut.²⁰

Dalam interaksi internasional, terdapat hubungan yang sifatnya kerjasama maupun konflik. Kerjasama dapat terjadi sebagai hasil dari penyesuaian tingkah laku oleh aktor-aktor sebagai tanggapan terhadap, atau dalam rangka mengantisipasi keinginan aktor lain. Kerjasama juga didefinisikan sebagai

¹⁷ Daniel S. Papp. *Contemporary International Relations Framework for Understanding Fifth Edition*. Allyn and Bacon Company. Boston. 1997 Hlm 30

¹⁸ T. May Rudi. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bina Cipta. Bandung 1996. Hlm 23

¹⁹ Daniel S. Papp . *Op.Cit.* Hlm 9

²⁰ Brian Hocking dan Michael Smith. *World Politics and Introductions to International Relations*. Herfordshire: Harvester Wheatsheaf. Hlm 216-217

serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada koeresi atau kekerasan dan yang telah dilegitimasi, seperti dalam organisasi internasional, Uni Eropa misalnya.

Sementara itu, apabila suatu negara terlibat konflik dengan negara lainnya berarti mempunyai suatu kepentingan nasional yang berbeda satu dengan negara lainnya. Apabila kepentingan nasional yang ditujukan kepada negara lain mempunyai perbedaan dengan kepentingan negara yang dituju tersebut, maka pola hubungan interaksi yang terjadi diantara kedua negara tersebut akan membentuk konflik.²¹

Menurut Cantori dan Spiegel penyelesaian ataupun pengurangan konflik antar negara dapat dilakukan melalui pembentukan organisasi internasional, khususnya organisasi regional. Suatu organisasi regional memiliki tiga orientasi tujuan yaitu: mendorong hubungan kerjasama antar negara anggota dimana antara negara tersebut tidak terjadi konflik, mengurangi tingkat konflik antar negara melalui manajemen konflik antar anggotanya yang berbeda pendapat ataupun konfrontasi antar negara anggota dengan negara non anggota. Adanya interaksi yang terus menerus antara aktor-aktor yang terlibat akan membawa hubungan tersebut ketingkat yang lebih tinggi, yaitu integrasi.

Ernst Haas menyatakan bahwa proses kerjasama akan memungkinkan para aktor internasional terintegrasi dalam suatu ikatan yang intensif.²²

Dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang dipertahankannya guna mempertahankan eksistensinya secara utuh, setiap negara tidak dapat mengisolir diri dari lingkungan eksternalnya. Mereka harus selalu mengadakan interaksi satu sama lain yang diadakan secara formal yaitu antar pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya maupun hubungan yang diadakan oleh masing-masing negara yang melibatkan diri dalam semua aspek hubungan itu.

Ketika suatu negara melakukan aktifitas perdagangan, mereka saling tergantung pada kerjasama politik masing-masing negara guna mewujudkan

²¹ James E Dougherty dan Robert L. Pflatzgraff Jr. *Contending Theoris of International Relations*. fourth Edition. Harper Collin Publisher. 1997. Hlm 418-419

²² Mochtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta LP3S. 1994. Hlm 153

tujuan ekonomi yang telah diterapkan, melalui perdagangan. Koehene dan Nye menyatakan bahwa di dunia internasional sekarang ini telah terbentuk suatu saling ketergantungan yang kompleks, dimana hubungan antar negara tidak lagi terbatas pada hubungan antara pemimpin negara, tetapi sudah menjadi hubungan pada tingkat-tingkat aktor yang berbeda dengan aktor-aktor yang berbeda.²³

Timbulnya hubungan perdagangan antar negara disebabkan oleh adanya perbedaan antara permintaan dan penawaran akan suatu barang di negara yang satu dengan negara yang lain. Perbedaan antara penawaran akan barang tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksamaan faktor produksi antar negara yang satu dengan negara yang lainnya, baik mengenai kualitas, kuantitas, maupun dalam hal pada jenis produk. Sedangkan perbedaan permintaan disebabkan oleh jumlah dan jenis kebutuhan, jumlah pendapatan, kebudayaan, kesukaan, dan sebagainya.

Perdagangan internasional merupakan hubungan antara harga yang diterima oleh suatu negara sebagai pembayaran mekanisme eksportnya serta harga yang harus dibayarkan untuk impornya. Faktor penting bagi volume dan arah perdagangan internasional adalah kebijakan ekonomi domestik antar negara dan interaksi dari kebijakan-kebijakan tersebut.²⁴

Kerjasama perdagangan luar negeri menurut John Stuart Mill, David Ricardo, dan Adam Smith dapat memberikan sumbangan yang pada akhirnya mampu memperlaju perkembangan ekonomi suatu negara. Keuntungan lainnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan luar negeri dapat memperluas pasar serta hasil-hasil produknya sehingga memungkinkan suatu negara menggunakan teknologi yang lebih baik dari pada yang terdapat di dalam negeri.²⁵

1.4.2 Kerangka Analisis

Turki memiliki kepentingan yang sangat besar dalam menjalin kerjasama dengan Uni Eropa terutama dalam bidang ekonomi. Turki juga mengharapkan kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa dapat mendorong transaksi

²³ Robert O Keohane. *Op.Cit.* hlm 116

²⁴ Jack C Plano, Roy O and Lawrence Z. *International Relations : A Politics Dictionary.* 1995. Hlm 160

²⁵ Sadino Sukirno. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan.* Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1985. Hlm 225

perdagangan, meningkatkan tingkat perekonomian serta menekan laju inflasi di Turki.

Sedangkan Siprus masih bersikeras agar Turki melepaskan dukungannya terhadap Siprus Utara dan mendukung integrasi kedua Siprus, jika Turki ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Uni Eropa sendiri telah membentuk suatu komisis untuk mengamati perkembangan Turki menuju keanggotaan dalam Uni Eropa yang berisikan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan Turki sebagai anggota Uni Eropa.

1.5 Asumsi

Kemudian dalam merumuskan hipotesis penelitian ini, penulis menarik beberapa asumsi:

1. Apabila terdapat persamaan tujuan atau kepentingan, para aktor internasional akan melakukan interaksi internasional, melalui kerjasama, demi mencapai tujuan atau kepentingan bersama tersebut.
2. Interaksi yang berlangsung secara terus menerus antara para aktor internasional, terutama dalam bentuk kerjasama dapat membawa aktor-aktor tersebut ketahapan yang lebih tinggi yaitu intergrasi.
3. Dengan bergabungnya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa berimplikasi pada masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

1.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dengan diterimanya Siprus sebagai anggota Uni Eropa akan menghambat jalannya Turki untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur pengujian guna pendeskripsian kegiatan yang harus dilakukan apabila hendak

mengetahui derajat eksistensi empiris bagi penerapan suatu konsep. Definisi operasional merupakan jembatan antara tingkatan konseptual teoritis dengan tingkatan observasional empiris.

Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama perdagangan Turki-Uni Eropa

Kerjasama perdagangan adalah suatu kesepakatan mengenai interaksi yang mencakup kepentingan Turki dan Uni Eropa guna meningkatkan transaksi perdagangan kedua belah pihak. Indikatornya adalah neraca perdagangan yaitu catatan sistematis tentang transaksi ekspor dan impor baik jasa maupun barang (transaksi yang sedang berjalan).

Kriteria Kopenhagen terdiri dari kriteria politik, ekonomi, serta kemampuan memenuhi kewajiban keanggotaan. Sedangkan perbaikan kondisi ekonomi Turki dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita dan laju inflasi di Turki.

b. Diterimanya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa

Diterimanya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa bisa menjadi batu sandungan bagi Turki untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa, hal ini dikarenakan oleh tidak bersedianya Turki dalam hal penyatuan Siprus Utara dengan Siprus Yunani, Turki juga belum membuka perairannya untuk kapal-kapal Siprus berlabuh di wilayah Turki.

1.8 Kajian Pustaka

Dalam Bab satu ini peneliti mencoba memasukkan tulisan yang relevansinya sesuai dengan skripsi yang dibuat oleh peneliti. Dalam bab satu ini tidak hanya berupa teori, tapi juga berupa contoh yang ada. Peneliti mencoba untuk membandingkan dengan skripsi Nandang, alumni Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pansundan Bandung. Dalam Skripsinya sang penulis menulis tentang **“Peran PBB dalam Penyelesaian Sengketa Siprus”**. Skripsi ini peneliti jadikan sebagai salah satu pembanding dalam tinjauan materi yang peneliti ajukan, karena dari sejarah sampai diterimanya keanggotaan Siprus

Yunanai dan tidak diakuinya Siprus Turki juga berawal dari pertikaian ke dua etnis ini.

Permasalahan ini dimulai pada tahun 1963, ketika presiden Siprus mengajukan beberapa amandemen untuk memindahkan fungsi negara ini, Komunitas Siprus Turki menaggapinya dengan mengundurkan diri, para Menteri dari kabinet serta berhenti mengantor, kemudian semenjak pimpinan Siprus Turki bertindak selaku atas nama Pemerintahan.

Turki telah menyebabkan Siprus menjadi dua bagian dan mengabungkan pulau tersebut kewilayah Turki. Pada tanggal 15 Juli 1974 suatu perebutan kekuasaan tengah dilancarkan oleh militer Yunani lalu dengan kekuasaannya bermaksud untuk menjatuhkan Presiden Makarios dan Turki dengan alasan politik melancarkan invasinya, pada tanggal 20 Juli dengan suatu angkatan perang melawan ketidak berdayaan Siprus. Invasi ini telah dilaksanakan dengan dua langkah yaitu: Pada tanggal 20-22 Juli dan 14-16 Agustus, dimana pada akhirnya pasukan Turki menduduki 37% wilayah Pulau Siprus.

Ankara mencoba membenarkan invasi tersebut sebagai “operasi damai” yang ditujukan untuk perbaikan undang-undang yang terganggu oleh adanya perebutan kekuasaan, tetapi setelah perbaikan aturan tersebut dengan asumsi Glafros Deriden ketua parlemen Siprus dan juru runding pihak Siprus Yunani diangkat sebagai pejabat Presiden sampai Makarios kembali pada bulan Desember 1974 dari pengasingan dengan jaminannya tetap tidak membuat pasukan Turki mundur dari rencana semula untuk menjajah Siprus sebagai langkah awal untuk penggabungan.

Sekitar 200.000 waraga Siprus Yunani atau 40% dari jumlah populasi Siprus Yunani dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya yang diduduki dan kembali menjadi pengungsi. Ribuan penduduk Siprus Yunani yang tetap tinggal di kampung halamannya setelah selesainya invasi secara berangsur-angsur dipaksa dengan cara menakut-nakuti mereka agar meninggalkan kampung halamannya, di Utara tepatnya di wilayah Karpas.

Turki melanjutkan 37% dari wilayah Siprus dengan tidak mengindahkan sama sekali resolusi PBB yang berulang kali menyerukan untuk menghormati kebebasan, kedaulatan serta kesatuan wilayah Republik Siprus seperti halnya

penarikan seluruh pasukan-pasukan asing di wilayah Siprus penggunaan seluruh tindakan yang berguna untuk memajukan pelaksanaan yang terkait dengan resolusi PBB.

Sikap Turki ini seperti halnya di atas yang terus melanjutkan pelanggaran hak asasi masyarakat Siprus mendapat kecaman dan kutukan dari komunitas Internasional seperti Parlemen Eropa, Gerakan Non Blok, Persemakmuran, dan Uni Eropa. Dalam laporannya Dewan Komisi Hak asasi Manusia menyatakan tingkat kekejaman yang dilakukan oleh tentara Turki.

Berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB khususnya perdamaian dan keamanan, kerjasama Internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang lainnya serta HAM, Republik Siprus bergabung dengan PBB pada tanggal 20 September 1960 setelah mendapatkan kemerdekaannya dan secara langsung berangsur-angsur menjadi anggota agen khusus PBB. Siprus juga menjadi anggota Uni Eropa. Siprus juga menjadi salah satu anggota Gerakan Non-Blok pada masa presiden pertama Siprus Uskup Makarios.

Dalam kebijakan ini Siprus ikut mengembangkan hubungan kerjasama yang baik dengan semua negara anggota, serta turut mengambil bagian dalam segala usaha yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional dan mengembangkan hubungan bersahabat diantara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan.

Politik luar negeri Siprus tetap diabadikan untuk mencapai dua sasaran yaitu: di upayakan dalam rangka untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari dunia internasional bagi penyelesaian masalah Siprus yang sejalan dengan resolusi DK PBB, yaitu penyatuan kembali negara Siprus dengan kedaulatan dan identitas tunggal Siprus, adapun target ke dua adalah supaya Siprus dapat bergabung kedalam Uni Eropa.

Kebijaksanaan politik luar negeri Siprus tersebut dilakukan oleh semua lembaga tinggi negara, kepresidenan, parlemen, dan dilakukan oleh lembaga tinggi lainnya termasuk partai-partai yang ada di Siprus Yunani dengan memanfaatkan hubungan mereka dengan pihak luar negeri.

Melalui keanggotaannya di forum internasional, terutama di PBB, Gerakan Non-Blok dan Dewan kerjasama Eropa, sejak tahun 1974 Siprus senantiasa

berusaha mencari dukungan badan internasional tersebut bagi penyelesaian masalah Siprus yang dianggap sudah cukup lama dan sangat mendesak.

Bahkan meski Siprus bukan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), namun Siprus juga memberikan perhatian yang besar kepada badan internasional tersebut yang sebaliknya juga senantiasa membahas masalah Siprus, (mengingat penduduk Siprus Utara yang menganut agama Islam) dan serta merta mendukung tuntutan mereka dalam proses penyelesaian konflik meskipun terkadang tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam resolusi DK-PBB seperti tuntutan Rauf Denktahs bagi pembentukan negara Siprus Utara yang diproklamasikan pada tahun 1983.

Selain dengan menggunakan pembandingan dari tinjauan pustaka diatas penulis juga menggunakan teori-teori yang berhubungan dalam membahas permasalahan dari Implikasi masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap Proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa yaitu:

Ekonomi-Politik Internasional

Ekonomi politik merupakan hasil dari antara kajian ekonomi dengan kajian politik, yang mempertimbangkan serta dipengaruhi oleh kondisi mekanisme pasar (unsur ekonomi) dan kondisi kehidupan sosial masyarakat serta pola kebijakan pemerintah (unsur politik) yang saling berkaitan dengan mekanisme pasar internasional dengan sistem masyarakat dunia yaitu sistem multi negara, pola hubungan antar negara serta kebijakan masing masing pemerintah yang mempengaruhi situasi pasar internasional baik dalam bidang perdagangan maupun di bidang moneter.²⁶

Ekonomi pada dasarnya adalah pengejaran atas kekayaan sedangkan politik adalah pengejaran atas power. Keduanya berinteraksi dengan cara yang kompleks. Undang-undang dan peraturan politik membentuk suatu kerangka

²⁶ John dan Steave smith Baylish. *The Globalization of world Politics : An Introduction to International Relations*. Oxford University. New York. 1999 Hlm 219.

dimana suatu pasar berlangsung. Pada saat yang sama, kekuatan ekonomi menjadi pondasi yang penting bagi kapabilitas politik.²⁷

Menurut Robert Gilpin, ekonomi politik dijelaskan melalui serangkaian pertanyaan dalam menjelaskan aktivitas ekonomi dan politik dari metode analisis dan perspektif teori. Serangkaian pertanyaan tersebut menyangkut bagaimana suatu negara dan proses politik dalam institusi domestik mempengaruhi produksi serta penyebaran kesejahteraan serta pengaruh kepentingan aktivitas-aktivitas ekonomi dan distribusi keuntungan maupun kerugian dari aktivitas ekonomi tersebut. Sebaliknya pertanyaan lain akan muncul ketika kekuatan ekonomi serta kekuatan pasar berpengaruh pada distribusi kekuatan suatu negara dan juga penyebaran kesejahteraan antar negara maupun aktor-aktor politik lainnya.²⁸

Ekonomi Politik Regional

Ekonomi-politik regional adalah studi mengenai ekonomi dan politik yang saling berhubungan di dalam suatu kawasan dan saling melengkapi. Ekonomi-politik regional akan memungkinkan mendorong terbentuknya suatu integrasi di bidang ekonomi dan akan mencakup pergerakan manusia, sikap-sikap politik, perkembangan sosial yang kompleks serta masyarakat transnasional dalam suatu kawasan.²⁹ Pada awalnya, Gilpin menekankan pada konsep ekonomi-politik pada tujuan dari aktivitas-aktivitas ekonomi dan politik.³⁰

Sistem pasar telah menjadi faktor penting dalam membentuk masyarakat modern. Kompetisi pasar dan tanggapan aktor-aktor ekonomi terhadap perubahan harga yang relatif dapat menggerakkan masyarakat ke arah peningkatan spesialisasi, efisiensi, dan mungkin bahkan integrasi dunia.³¹

²⁷ Robert Jackson dan Georg Sorenson. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press. 1999 Hlm 176

²⁸ Robert Gilpin *The Political Economy of International Relations* Princeton University Press 1987 Hlm 9

²⁹ Hurel dan Kingsbury. *The International Relations of The Environment Actors*. Prentice Hlm 1992 Hlm 39

³⁰ Robert Gilpin Op Cit Hlm 11

³¹ Ibid., Hlm 65

Ekonomi Politik Domestik

Negara modern dan pasar berkembang secara bersama-sama dan terlibat dalam suatu interaksi timbal balik yang membentuk karakter dan dinamika hubungan internasional melalui suatu ekonomi politik domestik. Pengaturan pasar dapat dilakukan melalui adanya kesepakatan politik yang dicapai oleh negara-negara.³²

Pasar dapat mempengaruhi beberapa faktor internal, diantaranya adalah struktur sosial, kerangka kebijakan baik pada bidang domestik maupun internasional, teori ilmiah serta perkembangan teknologi, yang memberikan batasan dan dukungan kepada aktor-aktor ekonomi. Sementara itu, pasar sendiri juga mempengaruhi dan mentransformasikan faktor-faktor eksternal, seperti mengubah struktur sosial, mengubah hubungan politik, dan menstimulasi kemajuan ilmu dan teknologi.³³

Manajemen ekonomi yang dilakukan oleh suatu pemerintah pusat merupakan aspek dasar dalam mendefinisikan ekonomi-politik domestik suatu negara. Sarana terpenting dalam menjelaskan hal tersebut adalah melalui suatu kebijakan fiskal dan keuangan, kebijakan di bidang mata uang, *balance of payment*, nilai tukar mata uang yang akan berpengaruh pada volume ekspor dan impor serta kebijakan makro ekonomi dari pemerintah suatu negara.³⁴

Sifat dan ruang lingkup partisipasi negara dalam ekonomi dunia dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik yang dibuat dalam batasan-batasan tertentu. Pembuatan keputusan-keputusan politik tersebut sering dipengaruhi oleh kenyataan dimana kelompok-kelompok yang berbeda memiliki keperluan dan hasil juga diperoleh juga berbeda.³⁵

Kebijakan di bidang pajak, suku bunga, tarif dan negosiasi ekonomi dengan negara lain merupakan salah satu proses dalam pengambilan keputusan politik suatu negara. Lingkup yang lebih umum dari suatu proses pertanyaan tentang bagaimana pemerintah serta pihak swasta mengaitkan kepentingan mereka dengan membuat kebijakan ekonomi. Ekonomi domestik dipengaruhi oleh adanya

³² Ibid., Hlm 4

³³ Ibid., Hlm 65

³⁴ Thomas D Larison *International Political Economy The Struggle Power and Wealth*. Harcot Brace Company. 1997 Hlm 13-14

³⁵ Ibid., Hlm 5-6

faktor-faktor seperti ekonomi, politik, atribut budaya internal dari suatu negara, peluang serta pemilihan kebijakan yang di buat oleh elit yang berkuasa.³⁶

Interaksi Internasional

Interaksi merupakan suatu pertukaran antara dua atau lebih unit, seperti intraksi antar negara, kelompok, kelas, maupun individu. Unit-unit tersebut berinteraksi menurut dimensi waktu dan ruang yang dibentuk oleh faktor-faktor nyata seperti geografi dan faktor-faktor tidak nyata seperti geografi dan faktor-faktor tidak nyata seperti citra tentang pengalaman masa lalu.³⁷

Menurut Hocking dan Smith, interaksi internasional merupakan proses-proses komunikasi dan pertukaran antara aktor-aktor dalam sistem internasional yang relevan secara politis. Interaksi internasional ini akan mencerminkan tujuan-tujuan, sumberdaya-sumberdaya, serta tindakan-tindakan dari aktor-aktor tersebut. Interaksi internasional juga akan dipengaruhi oleh konteks dan tingkatan di mana interaksi itu terjadi.

Secara garis besar, hubungan antar aktor dalam interaksi internasional dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) hubungan yang menunjukkan derajat keharmonisan aktor yaitu hubungan konsesus, kolaborasi, dan integrasi; (2) hubungan yang menunjukkan konflik yang terjadi antar aktor politik, yaitu: manipulasi, kekerasan, dan penggunaan kekuatan bersenjata.

Howard J. Lentner mengelompokkan interaksi internasional menjadi empat pola-pola interaksi, yaitu:

1. Konflik, merupakan suatu kondisi yang menyerupai *zero-sum* dalam *game theory*, di mana kemenangan (gain) bagi suatu pihak merupakan kekalahan (lost) bagi pihak lainnya. Sebagian konflik diikuti dengan adanya campur tangan kekuatan militer. Situasi konflik ini dapat muncul di wilayah masing-masing aktor yang terlibat atau dapat pula muncul di wilayah ketiga (di luar wilayah teritorialnya);
2. Kompetisi, merupakan suatu kondisi yang dapat dibedakan dari konflik yang berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kondisi kompetisi, tidak

³⁶ Ibid., Hlm 269

³⁷ William D Coplin *Introduction to International Politic : A Theoretical Overview*. Rand Mc Nally Collage Publishing Company 1992 Hlm 225

terdapat *zero-sum*, melainkan adanya keuntungan yang diperoleh bersama, meski tidak dalam proposi seimbang. Selain itu frekuensi kontak dalam kompetensi tidak sering terjadi dalam konflik. Dengan demikian, kompetisi lebih diwarnai oleh adanya desentralisasi struktur (dimana aktor berperan secara mandiri), bukan prulalisasi;

3. Kerjasama, merupakan suatu kondisi dimana negara-negara tua kelompok negara mengikuti kebijakan yang paralel dalam mencapai keuntungan bersama atau mencapai suatu tujuan. Konsultasi umumnya kerap dilakukan secara formal maupun institusional melalui serangkaian kesepakatan. Meski demikian. Hal ini tidak selalu berjalan dengan normal karena terkadang negara-negara bekerja sama tidak atas dasar kesamaan kepentingan, melainkan karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk bekerja sama;
4. Integrasi, adalah suatu kondisi dimana terdapat tindakan bersama dan keterpaduan antara elemen-elemen dalam negara-negara yang berbeda. Integrasi sebagai upaya untuk memperluas pengakuan otoritatif atas keputusan negara satu dengan negara yang lainnya. Kondisi ini hampir serupa dengan kondisi domestik yang tersusun dari unsur-unsur pusat dan daerah dalam konsepsi *federalis*.³⁸

Kerjasama Intrnasional

Menurut Keohane, kerjasama didefinisikan sebagai penyesuaian sukarela oleh para aktor internasional terhadap kebijakan mereka sehingga mereka dapat mengatur perbedaan-perbedaan mereka demi mencapai keuntungan bersama. Kerjasama yang dilakukan secara terus menerus akan mengarah pada terjadinya proses integrasi pada tingkatan regional dan global. Kerjasama itu tidak muncul secara tiba-tiba namun membutuhkan perencanaan dan negosiasi.³⁹

Negara-negara melakukan kerjasama internasional untuk menyelesaikan masalah politik, sosial dan ekonomi dalam dua kondisi. Pertama, kondisi dalam lingkungan internasional, yang apabila dibiarkan akan merugikan negara. Contoh dalam tahap bilateral adalah patroli perairan bersama atau membantu menangkap

³⁸ Howard Letner . *Foreign Policy Analysis : A Comarative Conceptual Approach* . A Bell and Howell Company 1974 Hlm 86-88

³⁹ Robert O Keo Hane Op Cit Hlm 11

penjahat yang telah melarikan diri menyaberangi perbatasan. Di tingkat multilateral, adanya lintas perdagangan senjata ilegal yang sulit dikendalikan hanya lewat kebijakan nasional atau kerjasama bilateral, kondisi politik, sosial, ekonomi domestik tertentu yang dianggap berakibat luas sehingga dipandang sebagai permasalahan internasional. Kondisi sosial sebagai contoh tingginya tingkat buta huruf. Kondisi ekonomi, contohnya kurangnya dana pembangunan dan kondisi politik contohnya hak asasi manusia.⁴⁰

Motivasi-motivasi melakukan kerjasama internasional yakni: (1) permasalahan tidak dapat diselesaikan kecuali dengan kerjasama internasional; (2) pembangunan sumberdaya secara bersama akan meningkatkan efisiensi operasi di bidang apapun, bahkan di tingkat sermit kerjasama internasional.⁴¹

Kerjasama internasional berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, setelah masalah diidentifikasi, langkah-langkah penjemputan atau *ad hoc* diambil oleh negara-negara yang paling berkenaan dengan masalah tersebut. Kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak berhasil, negara-negara sering kemudian membentuk IGOs. Ketiga apabila permasalahan menjadi terlalu rumit dan ada kecenderungan melibatkan banyak IGOs, muncul usaha-usaha untuk mengkoordinasikan aktivitas IGOs tersebut. Namun, ketiga tahap tersebut masing-masing saling berkaitan. Meskipun tahap pertama sudah dilalui tentu langsung menuju tahap ke dua, begitu pula tahap ke dua langsung menuju tahap ke tiga.⁴²

Kerjasama Perdagangan

Menurut Gilpin, kerjasama perdagangan cenderung dapat mempersatukan para aktor internasional. Kerjasama perdagangan merupakan suatu sumber hubungan yang mengarah pada perdamaian antar aktor karena setiap aktor akan mendapatkan keuntungan bersama dari adanya hubungan perdagangan. Kerjasama perdagangan juga akan memperluas ketergantungan antar perekonomian nasional sehingga dapat meningkatkan hubungan kerjasama antar para aktor.⁴³

Kerjasama perdagangan adalah salah satu bidang terpenting yang dilakukan oleh para aktor negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya.

⁴⁰ William D Coplin Op Cit Hlm 259

⁴¹ William D Coplin Op Cit Hlm 260

⁴² Ibid., Hlm 364

⁴³ Ibid., Hlm 31

Perdagangan tidak hanya sebagai salah satu instrumen ekonomi yang dijalankan guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran semata, namun juga telah dicapai untuk mencapai tujuan-tujuan politik negara.⁴⁴

Selain itu, perdagangan juga memiliki efek budaya melalui pengenalan nilai-nilai, ide-ide dan perilaku dari suatu masyarakat. Perdagangan akan mendorong ke arah perdamaian karena adanya saling ketergantungan ekonomi sehingga menciptakan efek positif antara masyarakat serta mendukung harmonisasi kepentingan.⁴⁵

Kerjasama perdagangan telah meluas di setiap bidang kehidupan karena kebutuhan masyarakat terhadap barang makin beraneka ragam. Beberapa keuntungan dari kerjasama perdagangan yakni: (1) transfer teknologi yang akan menghasilkan kesejahteraan ekonomi bagi semua orang; (2) kegiatan perdagangan yang melibatkan multi aktor akan menstimulus pertumbuhan ekonomi serta menghasilkan efisiensi ekonomi; (3) kerjasama perdagangan akan memperluas pasar, mendorong skala ekonomi dan meningkatkan kembali investasi; (4) pilihan bagi konsumen terhadap barang maupun jasa semakin beragam; (5) mengurangi biaya-biaya input seperti bahan-bahan mentah dan komponen-komponen manufaktur yang akan menurunkan biaya produksi.⁴⁶ Namun, proses pertukaran yang terjadi dalam perdagangan internasional bukan semata-mata merupakan hasil dari kekuatan pasar yang didasarkan pada penawaran dan permintaan, tetapi lebih merupakan hasil dari suatu jaringan tawar-menawar yang kompleks dan mengikat yang sebagian bersifat ekonomi dan sebagian lagi bersifat politik. Pertumbuhan nilai ekspor dari pada nilai impor akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi perdagangan merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam perdagangan luar negeri, yaitu posisi perdagangan yang sebenarnya dari suatu negara yang mengekspor barangnya serta melakukan impor barang dari luar negeri. Kondisi perdagangan dapat diartikan sebagai rasio rata-rata nilai ekspor terhadap nilai impor suatu negara, khususnya dalam perdagangan barang. Ketika

⁴⁴ K. J. Holsti *International Politics : A Frame Work to Analysis* . 7 Editon .Prentice Haal. 1992 Hlm 302

⁴⁵ Robert Gilpin Op Cit Hlm 171

⁴⁶ Ibid., Hlm 170-171

nilai impornya meningkat lebih tinggi dari pada nilai eksportnya, maka dapat dikatakan kondisi perdagangannya buruk.⁴⁷

Perdagangan luar negeri dapat memberikan sumbangan yang mampu memperlaju perkembangan ekonomi suatu negara. Keuntungan lainnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan luar negeri memperluas pasar dan hasil-hasil produknya serta memungkinkan suatu negara menggunakan teknologi yang lebih baik.⁴⁸

Integrasi dalam Hubungan Internasional

Ernst B. Haas mendefinisikan integrasi sebagai proses dimana aktor-aktor politik pada tingkat nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan loyalitas, harapan dan kehormatan politiknya kepada suatu pusat baru, di mana pusat tersebut memiliki institusi yang menuntut dari yurisdiksi negara-negara tersebut

Integrasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menggabungkan satu unit tunggal dari bagian-bagian yang terpisah. Integrasi juga dapat diartikan sebagai proses dimana individu atau kelompok yang tadinya berbeda satu sama lain menjadi sama, terutama apabila dilihat dari kepentingan dan sudut pandang mereka.

Tujuan integrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Potensi ekonomi, yaitu keinginan untuk meningkatkan potensi ekonomi;
2. Potensi politik, yaitu untuk memaksimalkan potensi politik. Negara-negara yang tidak memiliki kekuasaan politik akan berupaya masuk kedalam suatu integrasi sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran diplomasi mereka;
3. Resolusi konflik, yaitu sebagai upaya untuk meredam setiap potensial konflik antar negara yang bertetangga.

Integrasi ekonomi dapat diukur dengan jelas melalui volume transaksi ekonomi antar unit-unit yang di analisis. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong tumbuhnya integrasi yaitu adanya nilai-nilai atau ideologi bersama

⁴⁷ Paul R Viotti dan Mark V Kauppi . *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism*. Mc Millan Publisaer. New York. 1993 Hlm 595

⁴⁸ Sadino sukirno *Ekonomi Pembangunan Proses dan Dasar Kebijakan*. Fakultas Ekonomi UI Jakarta.1985 Hlm 225

yang dipakai dalam satu komunitas, latar belakang, sejarah, serta adanya toleransi atas perbedaan kultural.⁴⁹

Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna dicapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Menurut John T Rourke keanggotaan Dalam organisasi internasional terbuka terhadap semua negara. Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografis tertentu atau cakupan fungsi organisasi, persetujuan prinsip, kegiatan organisasi serta suatu standar politik tertentu.⁵⁰

Pada umumnya, organisasi internasional memiliki tujuan masing-masing tercantum di dalam dokumen dasar sebagai suatu kesepakatan bersama. Secara garis besar tujuan pembentukan suatu organisasi internasional yaitu sebagai upaya meminimalisasi atau mengendalikan konflik antar negara, mengembangkan hubungan secara damai, mengembangkan dan memajukan kerjasama untuk memberikan keuntungan pada setiap anggotanya serta mencegah ancaman eksternal dengan cara membentuk suatu pertahanan bersama.

Fungsi utama dari suatu organisasi internasional adalah untuk mengadakan upaya-upaya kerjasama antar negara dalam bidang tertentu, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi seluruh atau sebagian besar anggotanya. Suatu organisasi internasional mempunyai fungsi utama untuk mengadakan kontak diplomatik secara berkesinambungan antar negara, mengontrol konflik serta sebagai fasilitas bagi interaksi ekonomi antar negara.

Klasifikasi Organisasi Internasional

Berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan, organisasi internasional dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

⁴⁹ Peter Toma dan Robert F Gorman. *International Relations : Understanding Global Issues*. Brooks/Cole Publishing Company California 1991 Hlm 389

⁵⁰ John T Rourke *International Politics on the World Stage* . Dushkin Publication. New York. 1991 Hlm 442

1 Organisasi Internasional Global

Wilayah kegiatannya adalah global dan keanggotaan terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia. Contoh: Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

2 Organisasi Internasional Regional

Wilayah kegiatan adalah regional, dan keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara kawasan tertentu saja. Contoh: Uni Eropa, ASEAN, OAU.

Berdasarkan tujuan dan luas-bidang kegiatan organisasi, organisasi internasional dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

- a. Organisasi Internasional Umum. Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, tidak hanya menyangkut bidang tertentu. Contoh: Uni Eropa dan PBB
- b. Organisasi Internasional Khusus. Tujuan Organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja. Contoh : OPEC.

Berdasarkan ruang lingkup dan bidang kegiatan, organisasi internasional dapat digolongkan menjadi empat, yaitu:

- 1 Organisasi internasional : Global-Umum. Contoh: PBB
- 2 Organisasi internasional : Global-Khusus. Contoh: OPEC, UPU , UNESCO
- 3 Organisasi internasional : Regional-Umum. Contoh : Uni-Eropa , ASEAN
- 4 Organisasi internasional : Regional-Khusus. Contoh : AIPO, OAPEC, PATA.

Organisasi Regional

Organisasi Regional adalah suatu bagian dari dunia, yang diikat oleh seperangkat tujuan bersama berdasarkan ikatan geografis, sosial, budaya, atau politik, serta memiliki struktur formal untuk memwadahi perjanjian formal antar pemerintah di dalamnya.

Menurut penganut paham regionalis, kerjasama regional lebih penting dari pada Kerjasama universal karena : 1 Adanya kecenderungan alami menuju suatu regionalisme didasarkan atas suatu homogenitas dari kepentingan , tradisi serta

nilai dari kelompok kecil suatu kehidupan bertetangga negara. 2 Integrasi politik, ekonomi serta sosial yang lebih sedikit dengan ruang lingkup yang lebih sempit. 3 Ancaman *internal terhadap* perdamaian akan segera diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah tersebut dibandingkan dengan upaya penyelesaian konflik dengan jangkauan yang lebih luas.

Menurut Coulumbis, ada empat kriteria umum untuk mendefinisikan kawasan:

- 1 Kriteria geografis, mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain-lain. Misalnya Asia, Eropa, Afrika.
- 2 Kriteria politik atau militer, mengelompokkan negara berdasarkan keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan orientasi ideologis dan politik. Misalnya NATO dan Negara Dunia ketiga.
- 3 Kriteria ekonomi, mengelompokkan negara-negara berdasarkan kriteria terpilih mengenai perkembangan (pembangunan) ekonomi, seperti GNP, Misalnya negara-negara industri maju, Negara-negara berkembang.
- 4 Kriteria transaksional, mengelompokkan negara-negara berdasarkan jumlah atau frekuensi pertukaran penduduk, barang, jasa, turis dan perdagangan. Misalnya kawasan Amerika Utara, Eropa Barat, Eropa Timur.

1.9 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.9.1 Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan implikasi penerimaan Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan peristiwa secara cermat dan terperinci sehingga diperoleh pemahaman tentang sesuatu yang telah terjadi.

Penggambaran dalam metode deskriptif berhubungan dengan apa, siapa, bilamana, dimana, dan bagaimana suatu gejala serta mencoba mendapatkan,

menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak detail yang penting.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur (kepuustakaan) yang didukung oleh data-data sekunder dari berbagai bahan bacaan, baik dalam bentuk buku, jurnal, penerbitan khusus surat kabar, majalah, maupun dokumen lain yang relevan dengan materi penelitian. Selain itu juga dilakukan pencarian data dengan media internet melalui penelusuran web sites.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah menguraikan pembabakan disertai pokok-pokok yang akan dikemukakan. Penelitian ini disusun dalam lima Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, asumsi, hipotesis definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : UNI EROPA

Bab ini berisikan tentang latar belakang terbentuknya Uni Eropa sebagai salah satu organisasi internasional dan merupakan sebuah contoh raw model bagi organisasi yang lainnya.

BAB III : SIPRUS

Bab ini berisikan tentang proses penerimaan Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa dan apa penyebab diterimanya Siprus sebagai anggota Uni Eropa

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari hubungan antara variabel yang akan dijelaskan dan dilakukan analisis mengenai Implikasi masuknya Siprus dalam Keanggotaan Uni Eropa terhadap Proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisikan pokok-pokok hasil pembahasan berdasarkan pertimbangan pemilihan kenyataan-kenyataan penting terhadap objek dan berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran untuk perbaikan yang berkenaan dengan proses dari hasil penelitian.

BAB II UNI EROPA

2.1. Sejarah Integrasi Eropa

Gagasan untuk menyatukan negara-negara Eropa telah dimulai sejak akhir abad ke-18 ketika Napoleon berupaya menyatukan Eropa di bawah Kekaisaran Perancis. Sejarah berulang kembali ketika Adolf Hilter mencoba menundukkan Eropa di bawah *The Third Reich*. Usaha menyatukan Eropa secara damai dimulai pada tahun 1923 oleh pemimpin *Pan-European Movement* dari Austria melalui gagasan "*United States of Europe*". Pada tahun 1929, Menteri Luar Negeri Perancis, Aristide Briand mengusulkan dibentuknya "*European Union*" dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*). Usaha-usaha tersebut gagal terutama disebabkan oleh kuatnya rasa nasionalitas dan kekuatan imperialisme waktu itu.⁵¹

Pemikiran untuk membentuk Eropa bersatu diperkenalkan kembali oleh Perdana Menteri Inggris. Winston Churchill, dalam pidatonya di Basel, Swiss, tahun 1946. Churchill mengharapkan bahwa masyarakat Eropa dapat hidup secara damai dalam rasa aman dan kebebasan melalui suatu "Eropa Serikat".⁵²

Rencana rekonstruksi negara-negara di kawasan Eropa Barat pasca Perang Dunia II mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Pada tahun 1949, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat membentuk aliansi keamanan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Sejak saat itu Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi, Marshall Plan, ke kawasan Eropa Barat. Negara-negara penerima *Marshall Plan* tergabung dalam *Organization for European Economic Development* (OEED). Tujuan utama Amerika Serikat pada saat itu adalah berupaya menciptakan suatu aliansi di kawasan Eropa Barat untuk menghadapi kekuatan komunis serta mencegah konflik di kawasan ini.⁵³

⁵¹ <http://www.cia.gov/factbook/html>

⁵² Edison Muclis. *Integrasi Menuju Uni Eropa*, CSIS. Jakarta. 1997. Hlm 551

⁵³ Richard Mansbach, *Global Puzell :Issues and Actor in World Politic*. Second Edition. New York. 1997: Hlm 469

Selanjutnya, perkembangan integrasi Eropa melalui pembentukan institusi internasional dapat dilihat dalam beberapa tahapan. Dengan tujuan agar negara yang ingin bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa mematuhi segala isi dari perjanjian ini, karena setiap periodenya berbeda mengenai persyaratan keanggotaan Uni Eropa. Tahapan dari perjanjian tersebut adalah:

1. Perjanjian Paris (ECSC), 1952

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (European Coal and Steel Community/ ECSC)⁵⁴, yang Traktat-nya ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952. Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis. Tujuan utama *ECSC Treaty* adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas. Hasil utama dari *The Treaty of Paris* adalah: (a) Pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSQ); (b) penghapusan rivalitas lama antara Jerman serta Perancis, dan (c) memberi dasar bagi pembentukan Federasi Eropa.⁵⁵

2. Perjanjian Roma (Euratom dan EEC), 1957

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menteri luar- negeri keenam negara penandatangan ECSC Treaty bersidang di Messina, Itali, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani *European Atomic Energy Community (EAEC)*,

⁵⁴ Cikal bakal pembentukan Uni Eropa diawali oleh usulan Jean Monnet, seorang negosiator Perancis, kepada Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman dan Kanselir Jerman Konrad Alexander. Monnet mengusulkan bahwa suatu masyarakat yang berkepentingan bersama dapat dibentuk untuk mengatur pasar batu bara dan besi baja dibawah badan pengawas yang independen. Pada tanggal 18 April 1951 melalui *The Treaty of Paris, the Schuman Plan*-diterima oleh Perancis, Jerman Itali, Belanda, Belgia dan Luksemburg. Masyarakat besi dan baja Eropa (European Coal and Steel Community ECSC) yang resmi berdiri pada tanggal 10 Agustus 1952 (<http://europea.eu.int/>).

⁵⁵ ibid

namun lebih dikenal dengan *Euratom* dan *European Economic Community (EEC)*. Kedua Traktat tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958.⁵⁶

Tujuan utama EEC Treaty adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui :

- Pencapaian Custom Unions serta membangun pasar bersama melalui penghapusan berbagai tarif bea, kuota impor dan berbagai hambatan perdagangan lain antara negara anggota, serta membedakan suatu *Common Customs Tariff (CCT)* dengan negara non anggota;
- Implementasi serta harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota, *for freedom of movement* barang, jasa, pekerja dan modal.

3. Perjanjian Brussel, 1965

Pada tanggal 8 April 1965, *European Coal and Steel Community (ECSC)*, *European Economic Community (EEC)* dan *European Atomic Energy Community (Euratom)* digabung menjadi Masyarakat Eropa/ME (*European Community/EC*), berdasarkan Perjanjian Brussel.⁵⁷ Tiga pilar kerjasama Uni Eropa yakni Pasar Tunggal Eropa, Kebijakan Luar Negeri & Hasil Utama dari Perjanjian Brussel ini adalah:

- a. Sejak tanggal 1 Juli 1965, ketiga komunitas tersebut digabung menjadi Masyarakat Eropa (ME) serta dibentuk satu Dewan dan satu Komisi untuk memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas;
- b. Pembentukan Dewan Menteri Uni Eropa, menggantikan *Special Council of Ministers* di ketiga *Communities*, dan melembagakan “*Rotating Council Presidency*” untuk masa jabatan selama 6 bulan;
- c. Membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan Badan-badan Audit ECS, Euratom dan EEC.⁵⁸

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

4. Perjanjian Schengen, 1985

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg dan Perancis menandatangani Perjanjian Schengen. Dalam Perjanjian Schengen ini, para negara anggota tersebut sepakat untuk secara bertahap menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain. Perjanjian ini kemudian diperluas dengan Memasukkan Itali (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).⁵⁹

5. Single Act, Brussels, 1987

Berdasarkan *White Paper* yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. *Single European Act* yang ditandatangani pada bulan Februari 1986, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987. Tujuan utama *Single Act* adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992.⁶⁰

Hasil utama single Act adalah :

- a. Melembagakan pertemuan reguler antara Kepala Negara dan/atau Pemerintahan negara anggota Masyarakat Eropa, minimal setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa;
- b. Kerjasama Politik Eropa secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah;
- c. Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.⁶¹

6. Perjanjian Maastricht, Treaty on European Union, 1992

*Treaty on European Union*⁶² (TEU) ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah Masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa .⁶³

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

Hasil utama dari *Treaty on European Union* adalah:

- a. Keamanan Bersama, serta Kerjasama di Bidang Peradilan dan Masalah Dalam Negeri;
- b. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme *co-decision procedure*, dimana Parlemen dan Dewan Uni Eropa bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans-European Network, kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen;
- c. Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan Parlemen;
- d. Memperkenalkan prinsip *subsidiarity*, yaitu membatasi wewenang institusi Uni Eropa agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di tingkat Uni Eropa Berdasarkan Perjanjian Maastricht, tujuan Uni Eropa yaitu:
 - Untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial (melalui pembentukan pasar tunggal tahun 1993 dan peluncuran mata uang tunggal tahun 1999);
 - Untuk menunjukkan identitas Uni Eropa dalam lingkungan internasional (melalui bantuan kemanusiaan kepada negara-negara non Uni Eropa, tindakan dalam krisis internasional, kesamaan posisi dalam organisasi internasional, kebijakan luar negeri dan keamanan bersama);
 - Untuk membangun suatu wilayah kebebasan, keamanan dan keadilan;
 - Untuk mempertahankan dan mengembangkan peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh Uni Eropa (termasuk lembaga-lembaga sebelumnya).⁶⁴

⁶² Traktat Maastricht terdiri dari 7 bagian judul yang dilengkapi dengan 14 protokol dan 33 deklarasi. Ketujuh bagian judul tersebut adalah : Bagian I tentang Ketentuan Umum; Bagian II tentang Amandemen dan Perjanjian MEE; Bagian III tentang Amandemen Perjanjian ECSC; Bagian IV tentang Perjanjian Euroatom; Bagian V tentang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama; Bagian VI tentang Ketentuan Kerjasama dalam Masalah Keadilan dan Urusan Dalam Negeri; dan Bagian VII tentang Ketentuan Penutup (<http://www.europa.eu.int>).

⁶³ Ibid

⁶⁴ European treaty (www.europa.eu.int) (diakses 12 Oktober 2008)

7. The Treaty of Amsterdam, 1997

Pada tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, Dewan Eropa merevisi TEU dan menghasilkan *The Treaty of Amsterdam* yang mempunyai empat tujuan utama:

- a. Memprioritaskan hak-hak dan penyediaan lapangan kerja bagi warga negara Uni Eropa. Traktat Amsterdam menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai masalah utama Eropa saat ini;
- b. Menghapuskan hambatan terakhir menuju *freedom of movement* dan memperkuat keamanan, dengan meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang *Justice and Home Affairs*;
- c. Memberi Uni Eropa suara yang lebih kuat di dunia internasional dengan menunjuk seorang *High Representative for the CFSP* dan membuat struktur institusi Uni Eropa lebih efisien

Hasil utama dari The Treaty of Amsterdam adalah :

- a. Memberi wewenang kepada Dewan Menteri untuk memberikan hukuman pada negara anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka) jika negara anggota tersebut melakukan pelanggaran HAM;
- b. Mengadakan kerjasama dari beberapa negara anggota (minimal 8 negara) meskipun tidak semua negara anggota menyetujuinya. Negara yang tidak (atau belum) menyetujui kerjasama tersebut dapat bergabung di kemudian hari;
- c. Menjadikan visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali bagi Inggris dan Irlandia).

8. The Treaty of Nice, 2000

Dewan Eropa mengadakan pertemuan pada tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah Traktat baru yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2003.

Hasil utama dari *The Treaty of Nice* adalah :

- a. Dengan mempertimbangkan perluasan anggota Uni Eropa, maka jumlah anggota Parlemen dibatasi maksimal sebanyak 732 orang serta memberikan

- alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru);
- b. Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang sebelumnya menggunakan *unanimity*, dan diganti dengan menggunakan mekanisme suara mayoritas;
 - c. Merubah bobot suara negara-negara anggota Uni Eropa mulai 1 Januari 2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru);
 - d. Mulai 2005, membatasi jumlah Komisioner, 1 Komisioner tiap 1 Negara, dan batas maksimum jumlah Komisioner akan ditetapkan setelah Uni Eropa beranggotakan 27 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi

9. Komite Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Committee*)

Komite Ekonomi dan Sosial mewakili berbagai kategori yang relevan dari aktivitas sosial dan ekonomi. Masa jabatan para anggota Komite ini adalah empat tahun. Keanggotaan Komite ditunjuk oleh Dewan berdasarkan calon yang diajukan oleh setiap negara anggota. Keanggotaan Komite tersebut terdiri atas 24 orang dari Jerman, Inggris, Perancis dan Italia; 21 anggota dari Spanyol, 12 orang dari Belgia, Yunani, Belanda, Portugal, Austria, dan Swedia, 9 orang dari Denmark, Finlandia, dan Irlandia dan 6 orang dari Luksemburg.

10. Komite-Komite Regional (*The Committee of Regions*)

Komite-Komite Regional ini merupakan badan penasihat independen yang bertanggung jawab kepada para wakil dan pejabat lokal yang berwenang di Uni Eropa. Komite ini memastikan bahwa identitas dan prerogatif regional dan local dihormati. Komite ini membantu menangani masalah-masalah mengenai kebijakan regional, lingkungan, dan pendidikan. Komite ini terdiri atas perwakilan dari otoritas regional dan lokal.

2.1.3. Perluasan Keanggotaan Uni Eropa

Berbagai Traktat Uni Eropa di atas kemudian beberapa kali diamandemen, terutama berkaitan dengan penambahan anggota yaitu: Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg dan Belanda (6 anggota awal-1957); Denmark, Irlandia dan Inggris (1973); Yunani (1981); Portugal dan Spanyol (1986); Austria, Finlandia dan Swedia (1995). Pada 1 Mei 2004, Uni Eropa memperluas keanggotaannya dengan 10 negara Eropa Tengah, yaitu Estonia, Latvia, Lituania, yang berbatasan dengan Rusia di utara, Polandia, Hongaria, Slowakia, dan Ceko, Slovenia, Malta, serta Siprus, dengan dua kelompok yang masih bermusuhan secara politik, Yunani dan Turki (untuk sementara hanya bagian Yunani pulau ini saja).

Perluasan keanggotaan akan memperkokoh posisi Uni Eropa di dunia serta akan mempengaruhi seluruh badan kebijakan internal Uni Eropa. Dengan masuknya negara anggota baru juga akan mengakibatkan perluasan wilayah sampai 34%, sehingga dapat meningkatkan pengaruh Uni Eropa secara internasional, khususnya dalam menerapkan demokrasi yang stabil diseluruh kawasan Eropa.

Melalui perluasan keanggotaan ini, Uni Eropa akan memiliki lebih dari 100 juta jiwa negara baru yang akan memberikan dorongan baru terhadap pertumbuhan dan integrasi ekonomi secara keseluruhan. Bagi para negara anggota Uni Eropa, perluasan akan meningkatkan aktivitas perdagangan dengan negara-negara kandidat, sehingga akan meningkatkan sistem jaminan sosial warga Uni Eropa.

Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan tiga persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, negara yang bersangkutan harus ada di benua Eropa. Kedua, negara tersebut harus menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakkan hukum, penghormatan terhadap Hak azasi manusia. Ketiga, menjalankan segala peraturan perundangan Uni Eropa (*aquis communitaires*).

Tidak satu pun dari negara-negara yang sebelumnya dikuasai Uni Soviet ini mau dikategorikan sebagai Eropa Timur; Eropa Timur itu terletak di sebelah timur mereka semua. Dengan penambahan negara anggota ini, Uni Eropa terdiri dari 25 negara (UE25) dengan jumlah penduduk sebesar 450 juta orang. Negara-

negara Eropa Tengah akan membawa sekitar 170 juta orang, lebih kurang 45 persen dari jumlah penduduk Uni Eropa sekarang.⁶⁵

Dewan Eropa, dewan kepala negara dan pemerintah, baru akan menentukan pada bulan Desember 2004 bilamana mereka akan memulai pembicaraan tentang keanggotaan Turki, sedangkan Bulgaria dan Rumania akan menjadi anggota pada tahun 2007.

Perluasan ini akan menghilangkan pembagian Eropa yang masih bercokol setelah Perang Dingin usai, dan diharapkan akan meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Eropa. Ke-10 negara anggota baru ini ditarik ke dalam proses negosiasi Uni Eropa yang sangat kompleks, yakni kepentingan-kepentingan yang berseberangan antarnegara diselesaikan secara sangat detail melalui berbagai pedoman legal dan prosedural, dan melalui kerja sama multilateral yang intensif pada berbagai tingkat administrasi.

Karena itu, perselisihan tidak boleh meningkat menjadi persengketaan karena terlalu banyak kepentingan bersama akan terkorbankan. Dengan keanggotaan negara-negara baru ini diharapkan pula bahwa tidak satu pun dari mereka akan kembali ke sistem pemerintahan otoriter.

Saling ketergantungan ekonomi dan proses penyesuaian yang harus dilalui negara-negara Eropa Tengah ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tambahan, tidak saja bagi negara-negara Eropa Tengah, tetapi juga untuk ke-15 negara anggota yang lama (UE15). Di tahun 2001, misalnya, ekspor Jerman ke Eropa Tengah mencapai lebih dari 11 persen dari ekspor negara itu, lebih kurang sama dengan seluruh ekspor Jerman ke Amerika Serikat.

Menurut Komisi Eropa, perluasan ke wilayah Timur berarti bahwa pertumbuhan ekonomi UE15 akan meningkat dengan 0,5 sampai 0,7% pertahunnya. Negara-negara yang paling banyak memperoleh keuntungan dari perluasan ini ialah Jerman dan Austria, di mana pertumbuhan setahunnya akan mencapai 1%. Untuk Jerman angka ini ialah 19,82 miliar euro.

Akhir tahun 2002, ekspor UE15 mencapai 994 miliar euro yang mencakup 20,5 persen dari ekspor dunia. Sebaliknya, impor UE15 mencapai 988 miliar euro atau 18,6 persen dari impor dunia. Tidak ada "letusan besar" (big bang) untuk

⁶⁵ Kompas Perluasan Keanggotaan Uni Eropa 2004 C.P.F Luhulima diakses melalui www.kompas.com

menyambut perdagangan pada 1 Mei 2004 karena dalam rangka perdagangan perluasan sebenarnya sudah terjadi. Lebih dari 95 persen dari perdagangan UE dengan pendatang baru sudah di-"liberalisasi" sebelum perluasan itu, dan karena itu pola perdagangan sudah stabil.⁶⁶ Tingkat produk domestik kotor (GDP) anggota UE baru berkisar antara 35 persen dari rata-rata UE untuk Latvia sampai 74 persen untuk Slovenia.

Mitra dagang terbesar UE ialah Amerika Serikat, Swiss, China, Jepang, dan Rusia. Di tahun 2002, perdagangan UE25 (UE15 dan 10 calon negara anggota UE) dengan Amerika Serikat ialah sebesar 429.944 juta euro atau 23,30 persen. Dengan Swiss angka itu ialah 136.378 juta euro atau 7,40 persen; dengan China 119.154 juta euro atau 6,50 persen; dengan Jepang 119.055 juta euro atau 6,40 persen; dan dengan Rusia 97.126 juta euro atau 5,30 persen. Kelima mitra dagang UE ini kiranya akan bertahan dan mungkin bahkan meningkat sesudah perluasan 1 Mei 2004. Pertanyaan yang sangat penting dari segi ekonomi ialah bagaimana perluasan itu dibiayai dan apakah biaya itu tersedia? Di dalam anggaran belanja Uni Eropa tahun 2004-2006, biaya sebesar 40,85 miliar euro sudah dialokasikan untuk negara anggota baru ini.

Pembiayaan langsung subsidi bagi petani di negara-negara anggota baru sangat problematis. Kendati petani mereka akan menerima bantuan penuh UE sesudah masa transisi sepanjang sepuluh tahun, mereka ini akan menerima dana dari UE sebesar 10 miliar euro untuk periode 2004-2006, dan karena itu akan merupakan penerima pertama bantuan UE untuk penyesuaian perluasan ini.

Negara-negara lama dan baru harus mencapai suatu persetujuan mengenai pembiayaan UE di masa depan yang mencerminkan prioritas politik integrasi Eropa yang sesuai pula dengan prinsip solidaritas UE.

Perjanjian perdagangan yang dibuat untuk membuka jalan bagi perluasan ini telah meniadakan sebagian besar rintangan, seperti tarif dan kuota ekspor mereka ke UE, yang menjadi mitra dagang mereka yang terbesar.

⁶⁶ Ibid

Perdagangan dua arah telah membesar dan UE15 mencatat suatu surplus sebesar 18 miliar euro di tahun 2002. Para pendatang baru telah menarik keuntungan dari suatu gelombang investasi perusahaan-perusahaan UE15 di sektor-sektor otomotif, ritel, perbankan, energi, dan telekomunikasi.

Kebebasan berpindah penduduk, yang paling ditakuti Jerman dan Austria, baru akan ditetapkan sesudah suatu masa transisi dari dua sampai tujuh tahun. Pengawasan daerah perbatasan baru akan mulai ditiadakan sesudah masa transisi yang lebih lama, yang masih diperhitungkan. Jadi, suatu "gelombang migrasi pekerja" dari negara-negara Eropa Tengah diperkirakan tidak akan terjadi selama masa transisi ini. Yang akan berpindah ialah para pekerja dengan keterampilan tinggi dan para spesialis, dan para pekerja dari daerah-daerah perbatasan dengan status imigrasi terbatas yang mencoba keuntungannya di pasar tenaga kerja negara-negara Eropa Barat, yang memang tidak ditakuti.

Negara anggota UE15 sebelum tahun 2004 dapat, untuk periode maksimal tujuh tahun, menentukan bilamana tenaga kerja dari negara anggota baru memasuki pasar tenaga kerja mereka. Pengalaman dengan perluasan-perluasan sebelumnya telah menunjukkan bahwa hanya sedikit tenaga kerja yang beremigrasi.

Akan tetapi, pembatasan perpindahan penduduk tidak akan mengurangi kemampuan bersaing negara-negara anggota baru. Wilayah-wilayah perbatasan yang secara struktural lebih lemah harus memperhitungkan persaingan yang meningkat dari negara-negara baru ini. Para ekonom berpendapat bahwa neraca perdagangan UE dengan Republik Ceko dan Slowakia, Polandia dan Hongaria, berpengaruh langsung pada terciptanya lapangan kerja bagi 65.000 pekerja di industri manufaktur, dan angka ini dapat meningkat menjadi 114.000.

Sebelum anggota baru dapat memanfaatkan mata uang euro, mereka harus dapat memenuhi persyaratan-persyaratan Uni Ekonomi dan Moneter (UEM) tentang defisit, utang, inflasi, dan stabilitas nilai tukar. Hal ini berarti bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan euro sebelum tahun 2006 kendatipun berbagai anggota baru sudah menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menggunakan

euro secepatnya. Ada berbagai faktor yang menguntungkan dan merugikan yang harus dipertimbangkan negara anggota baru sebelum mereka menggunakan euro dan strategi penggunaannya dapat berbeda karena tergantung dari persepsi kepentingan nasional.

Pada satu pihak, penggunaan Euro sebaik mungkin dapat menjamin stabilitas moneter, menarik investasi, dan mungkin pula membawa tingkat bunga yang lebih rendah bagi bisnis dan konsumen. Permasalahan yang besar lain ialah pola pengambilan keputusan. Dengan 25 delegasi menteri yang menghadiri setiap pertemuan dari Dewan Uni Eropa masalah pengelolaannya sangat besar. Lagi pula, kesulitan mengenai bahasa akan bertambah karena sembilan bahasa akan ditambah pada 11 yang sudah ada, yang menjadi bahasa resmi UE.

Tapi tampaknya biaya tambahan bagi penerjemahan dianggap marginal. Menurut Komisi Eropa, biaya multilingualisme UE itu sama dengan harga secangkir kopi per warga UE setahun.⁶⁷ Semua negara anggota baru, kecuali Polandia, adalah negara-negara kecil. Integrasi ekonomi dan moneter ini belum dapat dilaksanakan di bidang politik luar negeri dan keamanan Uni Eropa serta di bidang kehakiman dan dalam negeri. Di kedua bidang kerja sama Traktat Maastricht ini, tingkat integrasi belum setinggi tingkat integrasi ekonomi dan keuangan. Di kedua bidang ini bentuk kerja sama masih bersifat multilateral kendatipun sifat kedaulatan dan non-intervensi tidak begitu ketat lagi seperti semula, sesuai dengan ketentuan Traktat Westfalia dari tahun 1648, karena pengaruh yang sangat kuat dari globalisasi dan perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Demokrasi dan hak asasi serta keamanan dan pembangunan manusia merupakan landasan utama pengembangan kerja sama dan integrasi politik, baik dalam maupun luar negeri.

Perkembangan di bidang perdagangan tidak akan mengubah pola ekspor dan impor UE25, seperti kita lihat di dalam statistik di atas. Bahkan, untuk negara

⁶⁷ Ibid

berkembang, ke-10 negara Eropa Tengah itu akan menjadi pesaing berat dalam komoditas yang dihasilkan mereka pula karena bantuan untuk meningkatkan mutu produksi sesuai dengan selera konsumen di EU15 terjamin dan biaya transportasi yang jauh lebih rendah. Pasca Perang Dingin, muncul negara-negara baru di kawasan Eropa Tengah dan Timur akibat runtuhnya Uni Soviet. Beberapa negara baru tersebut menyatakan keinginannya untuk melepaskan diri dari komunis dan bergabung dengan Uni Eropa. Fenomena ini mendorong Uni Eropa untuk mempertimbangkan perluasan jumlah keanggotaannya demi menciptakan suatu integrasi yang lebih luas di kawasan Eropa.

Tabel 2.1. Statistik Negara-Negara Kandidat Uni Eropa Tahun 1998

Negara	Populasi (Juta jiwa)	Pendapatan Per kapita (US \$)	Persentase ekspor ke Uni Eropa
Bulgaria	8.6	4.47	40.8
Estonia	1.6	3.2	n.a
Hongaria	10.3	6.26	49.5
Latvia	2.7	5.4	n.a
Lithuania	3.7	5	n.a
Malta	0.4	8.28	74.4
Rep.Slowakia	5.4	6.45	49.5
Republik Ceko	10.3	7.77	49.5
Republik Polandia	38.7	3.7	68.3
Rumania	23.2	3.37	32.5
Siprus	0.7	14.47	40.8
Slovenia	2	8.1	n.a
Turki	57.7	5.55	51.7

Sumber: *Mission o the Republic of Indonesia to the European Communities*, 2000:1)

2.1.2 Mekanisme Penerimaan Keanggotaan Uni Eropa

Pasal 18 *Single European Act* menyatakan bahwa negara Eropa manapun yang demokratis, yang ingin dan bersedia bekerja sama dalam proses unifikasi Eropa dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Sedangkan pasal 237 Perjanjian Roma menyebutkan "*Any European Country may apply to become a member of the Community* ".⁶⁸

⁶⁸(<http://europa.eu.int>).25 Mei 2005 Pukul 09.08 Wib

Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan. Pertama, negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa. Kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia dan menjalankan semua peraturan perundangan Um Eropa (*acquis communautaires*).

Penerimaan anggota baru Uni Eropa telah diatur dalam pasal 49 *Treaty of European Union*, bahwa Dewan Uni Eropa harus bulat setuju untuk membuka negosiasi, setelah berkonsultasi dengan Komisi Eropa dan menerima persetujuan resmi dari Parlemen. Kondisi penerimaan, periode transisi, dan penyesuaian terhadap semua Treaty yang mendasari pembentukan Uni Eropa harus menjadi subyek perjanjian antara negara pemohon dengan negara anggota.⁶⁹

Negara pemohon dan Uni Eropa menandatangani *the European Agreement* yang menjadi dasar hukum bagi kerjasama antara kedua belah pihak untuk meningkatkan perdagangan bebas antara negara pemohon dengan Uni Eropa, berdasarkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Perjanjian tersebut meliputi hubungan perdagangan bebas, dialog politik dalam bidang hukum; kebebasan dalam pergerakan modal, barang serta individu ; dan bidang-bidang kerjasama lainnya seperti industri, lingkungan hidup, transportasi serta bea cukai.

Kemudian Uni Eropa membuat suatu *pre-accession strategy* untuk mempersiapkan negara-negara yang telah menandatangani *European Agreement* tadi. Dalam *The European Agreement*, terdapat badan-badan yang bertanggung jawab dengan proses penerimaan negara-negara kandidat, yaitu:

- *Association Council*, merupakan agenda pertemuan bilateral tingkat meteri antara Uni Eropa dan negara kandidat, membahas berbagai bidang yang diperkirakan cukup penting untuk didiskusikan antara kedua pihak;
- *Association Committees*, merupakan pertemuan para pejabat senior untuk mengkaji lebih mendalam keseluruhan bidang yang termuat dalam *The European Agreement*. Badan ini dibantu oleh sejumlah sub komite Uni

⁶⁹ (<http://europa.eu.int>).26 Mei 2005 Pukul 12.07 Wib

Eropa yang mengkaji secara teknis bidang-bidang yang termasuk dalam perjanjian;

- *Joint Parliamentary Committees*, adalah suatu badan yang mengupayakan kerjasama antara parlemen nasional negara kandidat dengan anggota parlemen Uni Eropa.

Pada bulan Juni 1993, *Copenhagen European Council* mengakui hak negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk bergabung dengan Uni Eropa apabila mereka memenuhi tiga kriteria, yakni:

- Adanya institusi yang stabil, yang dapat menjamin berjalannya demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia dan perlindungan terhadap minoritas;
- Adanya ekonomi pasar dengan kapasitas yang memungkinkan dalam menghadapi tekanan kompetitif dan tekanan pasar Uni Eropa;
- Kemampuan memenuhi kewajiban keanggotaan termasuk taat pada cita-cita politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa.⁷⁰

Kriteria-kriteria ini lebih dipertegas lagi dalam *Madrid European Council* pada bulan Desember 1995. *Madrid European Council* juga menekankan pentingnya mengadaptasi struktur-struktur administratif negara-negara pemohon untuk menciptakan kondisi bagi suatu integrasi yang harmonis.

Permintaan resmi dari suatu negara untuk menjadi anggota disampaikan kepada Dewan Menteri.

Dewan Menteri sebagai badan pengambil keputusan pada tingkat Uni Eropa meneruskan tersebut terlebih dahulu kepada Komisi. Tugas Komisi dalam hal ini menyusun suatu pendapat (*opinion*) tentang calon anggota.

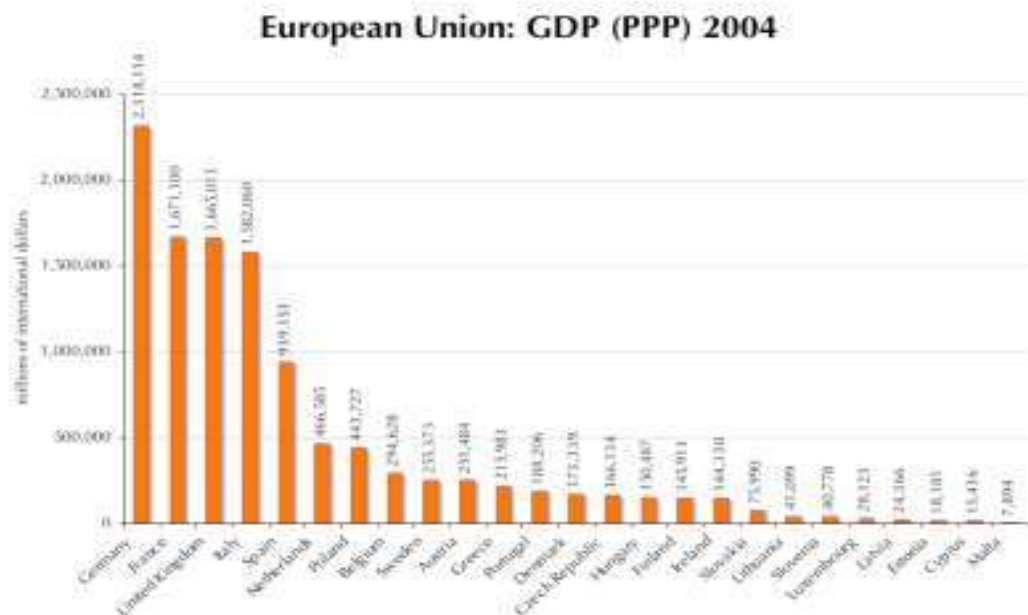
Akta Tunggal Eropa menambahkan bahwa penerimaan anggota baru dan persetujuan asosiasi antara Uni Eropa dengan suatu negara harus terlebih dahulu mendapat izin Parlemen Eropa.⁷¹

⁷⁰ Agenda 2000: *For A Stronger and Wider Union*, 1997 Hlm 6

⁷¹ <http://europa.eu.int>. 26 Mei 2005. Pukul 00.06 Wib










Apabila negara pemohon dianggap telah dan mampu memenuhi criteria atas, maka proses ini akan berlanjut dengan dibukanya negosiasi penerimaan. Sebelum negosiasi dibuka, dilakukan suatu evaluasi terhadap undang-undang negara tersebut untuk mempersiapkan suatu program kerja dan menentukan posisi negosiasi.

Setelah itu, negosiasi dimulai dalam bentuk *Intergovernmental Conference bilateral* (Uni Eropa dan negara pemohon), mempertemukan para menteri setiap enam bulan dan duta besar setiap bulan. Reformasi ekonomi-politik yang dilakukan negara pemohon dimonitor serta dipelajari secara berkala dan laju negosiasi ditentukan oleh hasil penilaian tersebut.⁷²

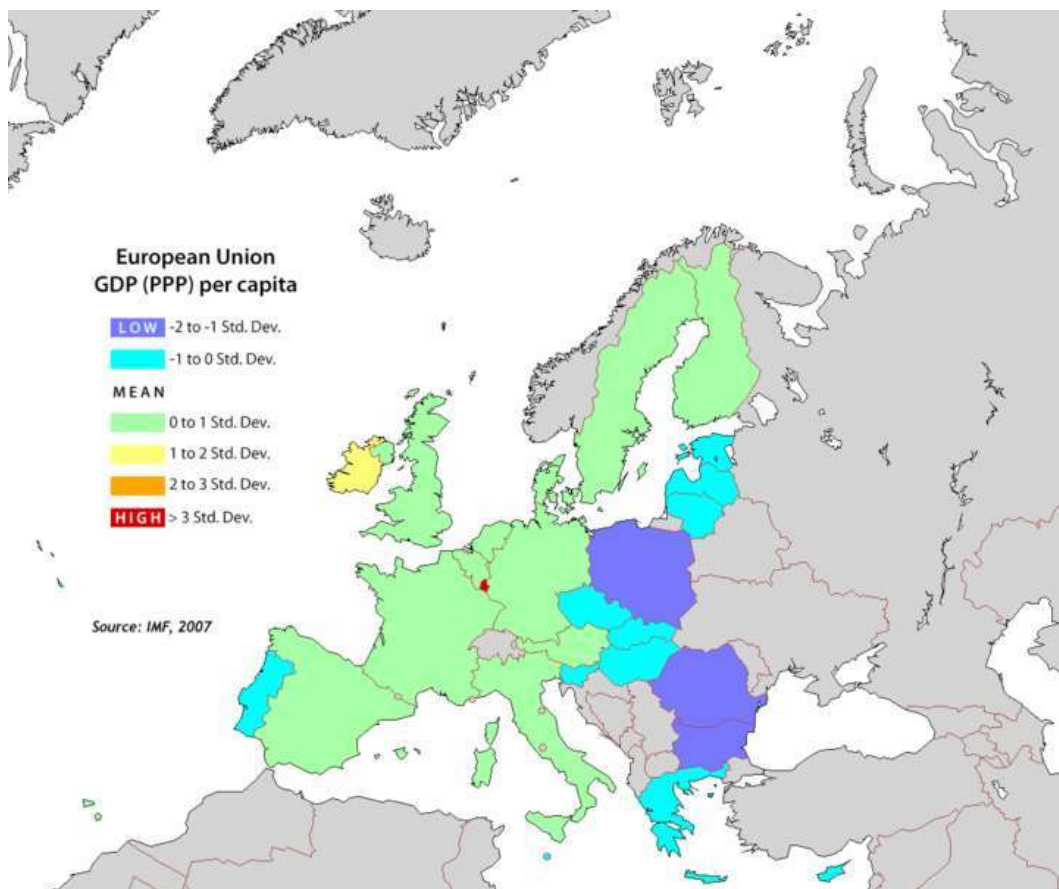
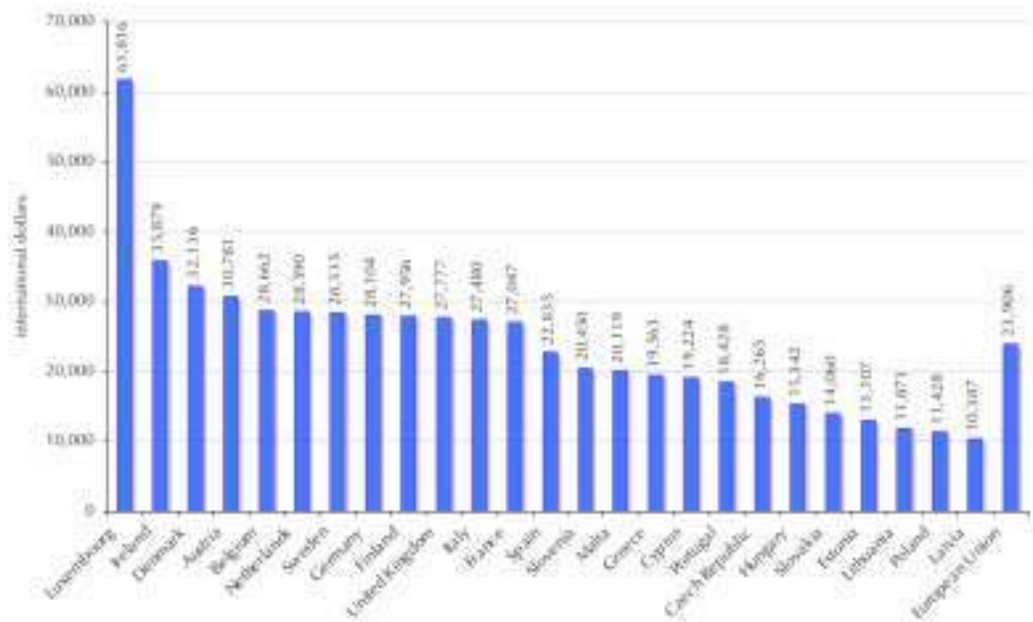


⁷² (<http://europa.eu.int>).26 Mei 2005 . Pukul 00.09 Wib

GDP (PPP) per kapita, 2004

Negara anggota	PDB (PPP) <i>juta dolar int.</i>	PDB (PPP) per kapita <i>dolar int.</i>	PDB (nominal) per kapita <i>dolar int.</i>
Uni Eropa	12.329.110	26.900	29.203
 Luksemburg	30.674	66.821	73.147
 Republik Irlandia	164.190	40.003	48.753
 Denmark	187.721	34.718	46.691
 Austria	267.053	32.802	37.688
 Belgia	324.299	31.159	35.068
 Finlandia	161.099	30.818	36.522
 Belanda	498.703	30.574	38.180
 Britania Raya	1.825.837	30.227	36.429
 Jerman	2.498.471	30.150	33.785
 Swedia	267.427	29.537	39.101
 Italia	1.694.706	29.218	29.635
 Perancis	1.811.561	29.019	33.855
 Spanyol	1.026.340	24.803	27.175
 Slovenia	43.260	21.695	18.527
 Yunani	236.311	21.529	20.006
 Siprus	16.745	20.669	20.866
 Malta	7.909	20.015	13.742
 Ceko	198.976	19.488	11.929
 Portugal	203.947	19.388	16.525
 Hongaria	162.289	16.627	11.059
 Estonia	22.239	16.461	9.424
 Slowakia	87.129	16.110	8.549
 Lituania	49.106	14.338	7.268
 Polandia	512.890	13.440	7.487
 Latvia	30.227	13.059	6.793
 Bulgaria	71,381	9,205	3.328
 Rumania	183,162	8,258	3.603
Negara Kandidat	GDP (PPP) <i>juta dolar int.</i>	GDP (PPP) per kapita <i>dolar int.</i>	GDP (nominal) per kapita <i>dolar int.</i>
 Kroasia	55.638	12.364	8.416
 Turki	570.748	7.958	4.925

European Union: GDP (PPP) per capita 2004



Bagi setiap, negara pemohon dibentuk suatu *Accession Partnership* yang akan mengkoordinasikan bantuan yang disediakan oleh Uni Eropa dan membuat prioritas untuk setiap sektor dalam penerapan peraturan *Community*.

Kesetiaan pemohon terhadap pemenuhan dan pelaksanaan prioritas-prioritas ini menentukan bantuan finansial *Community*. Setiap negara tersebut kemudian membuat suatu program detail pengadaptasian *Community Aqis* guna mengatur penerapan priortas-prioritas ini.

Negara-negara tersebut berkomitmen sesuai jadwal yang ditentukan, mempersiapkan sumber daya manusia dan finansial yang diperlukan untuk mencapainya. Program ini disesuaikan sambil berjalan oleh Komisi dan negara yang bersangkutan. Prioritas-prioritas ekonomi juga dibuat. Ada tiga instrumen finansial dalam *Accession Partnership* yang akan membantu mendukung reformasi di negara-negara pemohon yaitu dana bantuan pertanian, dana bantuan struktural dan program Phare.

BAB III

PROASES MASUKNYA SIPRUS DALAM KEANGGOTAAN UNI EROPA

3.1 Tinjauan Umum Siprus

3.1.1 Sejarah Singkat Siprus

Siprus memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan Mediterania, sehingga sejak awal telah menjadi pusat perdagangan dan menjadi wilayah yang diperebutkan oleh berbagai negara. Menurut sejarah Siprus telah dihuni sejak jaman Neolitikum (8500 SM) . Setelah itu Siprus telah diduduki oleh berbagai bangsa antara lain, yaitu : Mycenia, Punicia, Mesir, Assiria serta Persia. Pada 295 SM, kaisar Ptolemius I (mantan jenderal Iskandar Agung) berhasil menguasai Mesir berarti juga menguasai Siprus yang saat itu merupakan jajahan Mesir. Dinastinya memerintah Siprus sampai ditaklukan oleh Kekaisaran Romawi pada 58 SM.⁷³

Sebagai bagian kekaisaran Romawi, Siprus cukup mengalami kemajuan dan kejayaan. Namun setelah itu Siprus mengalami kemunduran setelah Romawi ditaklukan oleh kekaisaran Bizantium dan dilanjutkan oleh kekaisaran Islam, sejak abad ke 7 sampai dengan abad 11 Siprus telah mengalami 11 kali pergantian kekuasaan dari berbagai negara. Pada tahun 1191 raja Richard dari Inggris berhasil merebut Siprus. Namun ketika rakyat Siprus memberontak, Inggris menyerahkan Siprus kepada tentara Salib. Namun tentara Salib juga menyerahkan Siprus kepada Guy de Lusignan (Founder & Lord of Cyprus 1192-1194) yang pada akhirnya memerintah Siprus sampai 300 tahun. Pada masa ini merupakan jaman kemakmuran, namun sekaligus masa kemerosotan bagi kebudayaan Siprus dan agama Kristen Ortodoks Yunani. Pada akhir abad ke 14, dinasti Lusignan mulai melemah sampai akhirnya ditaklukan oleh bangsa Venesia pada tahun 1489. Namun tahun 1571 kekaisaran Ottoman Turki berhasil menaklukan Venesia dan akhirnya memerintah Siprus sampai 1878.

Pada 1878 administrasi Siprus diberikan kepada Inggris dengan janji bahwa Inggris akan membantu Turki jika Rusia menyerang Turki. Hal ini

⁷³ [www. Cia. Gov./factbook/html](http://www.Cia.Gov./factbook/html)

dilakukan akibat dari ketakutan Turki karena politik invasi Rusia pada saat itu. 1925 Siprus akhirnya resmi menjadi koloni Inggris. Sejak saat itu, semangat warga Siprus untuk berdaulat atas wilayahnya sendiri mulai meningkat. Pada saat itu muncul gerakan *enosis* (bergabung dengan Yunani).

Hal ini menyebabkan awal bentrokan antara warga Siprus Yunani dengan warga Siprus Turki. Namun semangat *enosis* turun karena dikhawatirkan hal tersebut akan menjadikan penjajahan berikutnya. Namun akhir tahun 1940-an Gereja Siprus Ortodoks secara terang-terangan mendukung *enosis* dan pada 1951 menunjukkan bahwa 96% masyarakat Siprus Yunani mendukung *enosis*.

Pada tahun 1954 Inggris menyiapkan konstitusi Siprus yang diterima oleh komunitas siprus Turki namun ditolak oleh masyarakat Siprus Yunani dibawah Organisasi Perlawanan Siprus Merdeka (EOKA) yang lebih *enosis* dan menghendaki melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan pemerintah Inggris untuk memperoleh kemerdekaan.

Pada tahun 1960 akhirnya Inggris memberikan kemerdekaan kepada Siprus dimana Uskup Makarios diangkat menjadi Presiden dan Faisal Kukul sebagai wapres. Uskup Makarios mengajukan amandemen konstitusi pada intinya memberikan kekuasaan lebih besar kepada warga Siprus Yunani. Hal ini menyebabkan Turki berang dan mengancam untuk menyerang Siprus, namun hal ini urung dilakukan karena tekanan masyarakat internasional. Hal ini menyebabkan bentrokan berdarah antar-komunal semakin meningkat yang menyebabkan PBB mengirimkan pasukan perdamaian (UNFICYP) pada tahun 1964.

Pada tahun 1967 Junta militer menguasai Yunani yang menyebabkan gerakan *enosis* Siprus berhenti, karena rakyat Siprus tidak mau diperintah oleh Junta Militer yang diktator. Junta Militer anti kepada pemerintahan Makarios.

15 Juli 1974 Yunani berhasil menjatuhkan pemerintahan Makarios melalui kudeta. Sebagai gantinya Yunani menunjuk Nicos Samson sebagai Presiden Siprus. Tindakan Yunani ditanggapi Turki dengan melakukan invasi pada 14 Agustus 1974 dan mengakibatkan dicopotnya Nicos dan di gantikan oleh ketua parlemen Siprus Glafcosd Clarides, namun hal ini belum membuat Turki puas dan mereka melakukan invasi sampai 1/3 wilayah Siprus Utara dan mengusir 180.000

warga Siprus Yunani ke wilayah Selatan. Ribuan warga Siprus Yunani mendapatkan perlakuan buruk di kamp-kamp penangkapan dan terbunuh secara keji oleh pemerintah Turki, dan sekitar 1619 orang dinyatakan hilang. Pada akhirnya warga Siprus Turki di Selatan akhirnya diusir oleh warga Siprus Yunani untuk bergabung dengan saudaranya di Utara.⁷⁴

Sehubungan dengan invasi Turki dan konflik komunal di Siprus tersebut, pada 1 November 1974 Majelis umum PBB akhirnya mengeluarkan resolusi agar pihak yang terlibat pertikaian menghormati wilayah kedaulatan Siprus. PBB juga mendesak agar semua kekuatan asing di Siprus agar segera menarik diri. Sampai sekarang konflik Siprus belum terselesaikan, hal ini semakin diperburuk karena pada 1983 ketika warga Siprus Turki mendirikan negara sendiri yang disebut *Turkish Republic of Northern Cyprus* (TRNC) dibawah Presiden Rouf Denktash

3.1.2 Politik

3.1.2.1 Politik Dalam Negeri

Undang-undang Dasar Negara Siprus 16 Agustus 1960 mengakui dua prinsip utama. Yakni pertama, mengenai *eksistensi* komunal di pulau tersebut, terdiri dari etnis Siprus Yunani dan etnis Siprus Turki. Prinsip kedua, masing-masing etnis memiliki hak dan perlakuan yang sama, baik dalam kehidupan politik maupun kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Prinsip kedua ini dimaksudkan guna menghindari dominasi etnis terbesar (Yunani) terhadap etnis minoritas (Turki).

Pasal 1 Konstitusi 1960 menegaskan bahwa Presiden Republik merdeka dan berdaulat Siprus dipilih dari warga Siprus Yunani, sedangkan Wakil Presiden berasal dari Siprus Turki. Dalam pasal 2 dipertegas siapa yang tergolong Siprus Yunani dan Siprus Turki, yaitu mereka yang berasal dari keturunan, bahasa dan kebudayaan Yunani dan Turki. Termasuk golongan pertama adalah Kristen Ortodoks, sedangkan golongan kedua adalah Islam.

⁷⁴ Ibid

Kedua etnis mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dengan bahasa pengantar sesuai dengan asal keturunannya. Kedua etnis juga diperkenankan melestarikan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara asal keturunannya, seperti mengibarkan bendera Yunani dan Turki, memelihara kebudayaan dan mengajarkan pendidikan, olahraga, menentukan hari-hari libur masing-masing dan lain-lain.

Lembaga Eksekutif Pemerintahan

Seperti disebutkan di dalam pasal 1 Konstitusi 1960, Presiden Siprus dipilih dari etnis Siprus Yunani, dan Wakil Presiden dipilih dari etnis Siprus Turki. Jika seorang presiden berhalangan sementara atau berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai presiden, maka kedudukan presiden digantikan oleh Ketua Parlemen yang juga seorang Siprus Yunani.

Demikian pula halnya Wakil Presiden akan digantikan oleh Wakil Ketua Parlemen yang juga seorang Siprus Turki. Seorang presiden berhak menunjuk 7 (tujuh) orang menteri di dalam kabinetnya yang berasal dari etnis Siprus Yunani, sedangkan wakil presiden dapat menunjuk 3 (tiga) orang etnis Siprus Turki untuk menjadi anggota kabinet tersebut.

Presiden Siprus sekaligus bertindak sebagai Kepala Negara, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, menerima credentials Duta Besar asing yang diakreditasikan untuk Siprus, mengangkat seorang Duta Besar/Konsul, memberikan tanda-tanda kehormatan, serta mewakili negara dan pemerintah dalam setiap kegiatan yang bersifat kenegaraan.

Sedangkan Wakil Presiden sekaligus bertindak sebagai Wakil Kepala Negara, hadir pada setiap kegiatan kenegaraan. Presiden dan Wakil Presiden mengundang (mengumumkan berlakunya) suatu undang-undang yang telah diputuskan oleh parlemen melalui Lembaran Negara dalam waktu 15 hari setelah diterima dari parlemen. Dikecualikan jika Presiden dan Wakil Presiden bermaksud hendak menjatuhkan veto terhadap suatu undang-undang, atau hendak mengembalikan kepada parlemen untuk direvisi, maupun hendak menyerahkan undang-undang tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diuji.

Presiden dan Wakil Presiden Siprus juga mempunyai hak memberi pengampunan, hak mengurangi hukuman, atau hak menunda hukuman, serta hak merehabilitasi nama baik seseorang yang telah dijatuhkan hukuman, baik terhadap pelaku kejahatan politik/kriminal yang berasal dari etnis sendiri maupun etnis lainnya. Dalam pemilihan terakhir 16 Februari 2003, terpilih Tassos Papadopoulos sebagai Presiden Siprus untuk masa jabatan 5 tahun.

Tassos yang berasal dari partai Democratic (aliran tengah-kanan) itu mendapat dukungan dari sayap kiri partai AKEL, Democrat Sosial (KISOS) dan Ecologists- Environmentalists Movement. Tassos memenangkan 51,51% suara, sementara saingan terdekatnya mantan Presiden Glafcos Clerides hanya mendapatkan 38,80%.⁷⁵

Lembaga Legislatif (Parlemen)

Berdasarkan Konstitusi Siprus 1960, jumlah anggota parlemen adalah sebanyak 50 orang. Tujuh puluh persen (70%) diantaranya, atau 35 orang wakil dipilih dari etnis Siprus Yunani, sedangkan 30% lainnya atau 15 orang wakil dipilih dari etnis Siprus Turki, masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Berdasarkan amandemen tanggal 5 Juli 1985, keanggotaan parlemen berjumlah 80 orang, dengan pembagian 56 wakil Siprus Yunani dan 24 wakil Siprus Turki. Sejak pecahnya pertikaian antara kedua etnis dalam tahun 1964, yang mengakibatkan seluruh etnis Siprus Turki mengundurkan diri dari jajaran pemerintahan dan parlemen, maka kursi-kursi jabatan bagi Siprus Turki untuk sementara dikosongkan.

Ketua Parlemen dipilih dari etnis Siprus Yunani sedangkan Wakil Ketua dipilih dari Siprus Turki oleh rakyatnya masing-masing. Jika keduanya berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka kedudukan mereka digantikan oleh anggota tertua dari masing-masing etnis pada jabatan yang sama dengan yang digantikan, atau jika ditentukan lain dengan kesepakatan. Keanggotaan parlemen dipilih berdasarkan sistem distrik untuk masa bakti 5

⁷⁵ Ibid

(lima) tahun. Seorang anggota parlemen terpilih tidak dapat diganti selama masa jabatannya bilamana ternyata dalam masa jabatannya tersebut ia meninggal dunia, sakit dan mengundurkan diri, diberhentikan karena cacat mental/rohani yang baru diketahui kemudian.

Di dalam parlemen Siprus terdapat 3 (tiga) orang wakil lainnya, masing-masing satu wakil dari golongan Maronites, golongan Armenian, dan golongan Minoritas Latin. Mereka dipilih mewakili golongannya untuk mengikuti setiap persidangan tanpa memiliki hak suara dalam pemungutan.

Ketiga wakil ini hanya boleh menyampaikan pandangan berkaitan dengan kelompok yang diwakilinya. Hasil Pemilu di Siprus pada tanggal 27 Mei 2001 adalah sebagai berikut :

AKEL-Communist Party	: 17 wakil
Disy Party	: 15 wakil
EDEK-Socialist Party	: 1 wakil
Diko Party	: 7 wakil
Kisos Party	: 3 wakil
UD Party	: 1 wakil
Greens Party	: 1 wakil
New Horizons	: 1 wakil
Jumlah	: 46 wakil

(catatan: wakil Siprus Turki tetap dikosongkan).

Pada 8 Juni 2001, Parlemen telah memilih ketuanya yang baru yaitu Demetris Christofias yang merupakan ketua partai AKEL dan berasal dari sayap kiri.

Partai Politik

Partai-partai politik yang terdapat di Siprus sebagai berikut :

- Democratic Rally/Liberal Party,
Berhaluan *centre-right*, didirikan oleh Mr. Glafcos Derides (mantan Presiden Siprus) dalam tahun 1976, saat ini diketuai oleh Mr. Loannis Matsis. Partai ini

mendapat dukungan koalisi partai-partai kecil lainnya, seperti *European People's Party* (EPP), *the Union of European Christian Democrats* (UECD), *the European Democrats Union* (EDU), dan *the International Democratic Union* (IDU).

- AKEL (*the Progressive Party of the Working People*)
Adalah warisan/penjelmaan dari Partai Komunis Siprus 1926 yang dinyatakan terlarang oleh kolonial Inggris tahun 1931. Partai ini (AKEL) berhaluan Marxist-Leninist didirikan tahun 1941, pernah dinyatakan illegal dari tahun 1955-1959. Sekjen partai saat ini adalah Demetris Christoflas.
- DIKO (*Democratic Party*)
Didirikan pada 12 Mei 1976 oleh Mr. Spyros Kyprianou. Partai ini berhaluan tengah dengan prinsip penegakan ajaran demokrasi dan keadilan berdasarkan hukum.
- EDEK (*Eniea Demokratiki Enosis Kyprou*) atau pernah dikenal dengan nama Democratic Union of Siprus, kini lebih populer dengan “*the EDEK Socialist Party*”. Partai ini diketuai oleh Dr. Vassos Lyssarides, mantan Ketua Parlemen tahun 1985-1991.
- KED (*The Free Democrats Movement*) berhaluan tengah, didirikan pada April 1993. Saat ini diketuai oleh Dr. George Vassiliou (mantan Presiden Siprus tahun 1988-1993). Tujuan pokok partai ini adalah penegakan azas-azas demokrasi, keadilan sosial, dan ekonomi bebas bagi seluruh rakyat. Pada Desember 1996 KED melakukan merger dengan ADISOK membentuk partai baru yang bernama *Enomeni Dinokrates* (EDE).
- EDE (*Enomeni Dinokrates*). Partai ini didirikan pada tahun 1996 yang merupakan hasil merger antara KED dengan ADISOK.

Lembaga Yudikatif

Susunan kekuasaan Judikatif berdasarkan UUD 1960 adalah sebagai berikut :

- The Supreme Court of the Republic
- The Assize Court (Permanent Assize Court for all Districts).
- District Courts
- Military Court

- Industrial Disputes Court
- Rent Control Courts
- Family Courts

Mahkamah Agung memiliki 13 orang Hakim Agung, salah seorang diantaranya bertindak sebagai Ketua. Ketua Supreme Court saat ini adalah Georgios Pikis (58 tahun).

Badan-badan Independen

Berdasarkan UUD 1960 terdapat badan-badan lain yang bersifat independent, yakni Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komite Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Perencanaan, Bank Sentral, Komite Pendidikan dan Pengacara.

Pembagian Wilayah

Wilayah Administrasi Siprus terbagi atas 6 (enam) distrik, yakni masing-masing :

- Distrik Nicosia
- Distrik Limassol
- Distrik Famagusta
- Distrik Larnaca
- Distrik Paphos
- Distrik Kyrenia.

Setiap distrik dipimpin oleh seorang Kepala Distrik. Meskipun pada dasarnya seorang Kepala Distrik mewakili kepentingan wilayahnya, namun ia juga memegang kepentingan atau perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam pelaksanaan tugas berbagai kementerian di wilayah distrik.

Di bawah tingkat distrik terdapat apa yang disebut "*Local Authorities*". *Local Authorities* ini terdiri dari 3 (tiga) sistem, yakni *Municipal Councils* (paling

atas), *Improvement Boards* (menengah), dan *Village Commissions* (paling rendah). Uniknyanya adalah masing-masing bersifat independen dan tidak mengenal hirarki satu dengan yang lainnya.

Suatu *Village Commissions* dapat ditingkatkan peranannya ke tingkat *Improvement Boards* dengan maksud guna memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Perubahan ini dapat terjadi disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan suatu desa.

3.2 Politik Luar Negeri

Siprus resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 20 September 1960. Kemudian disusul keanggotaannya pada Negara-negara Persemakmuran Inggris (*Commonwealth*) pada tahun 1961, Gerakan Non Blok, Dewan Eropa (*Council of Europe*) pada Mei 1961, dan Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa (*the Organization on Security and Cooperation in Europe*) pada tahun 1975. Pada tahun 1990, Siprus mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa, dan saat ini Siprus sedang mempersiapkan untuk menjadi anggota penuh.

Siprus yang memegang teguh prinsip-prinsip PBB menjalin hubungan persahabatan dengan sejumlah negara berdasarkan prinsip saling menghormati dan atas dasar saling menguntungkan rakyat masing-masing negara. Hubungan khusus yang berlangsung dengan Yunani, hanya didasarkan pada suatu kenyataan bahwa penduduk Siprus sebagian besar adalah keturunan Yunani.

3.2.2 Ekonomi

Sistem ekonomi Siprus adalah liberal, dimana pemerintah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada swasta untuk berperan dalam perekonomian nasional. Sedangkan pemerintah berperan sebagai pelengkap dan pendorong melalui pemeliharaan makro ekonomi yang stabil, yaitu dalam bidang utamanya antara lain industri, jasa telekomunikasi, maritim dan pariwisata. Salah satu faktor

utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa bersama dengan sektor pariwisata.⁷⁶

Pendapatan dari sektor tersebut mengalami penurunan secara dratis setelah serangan teroris September 2001 dan pada saat ini sektor tersebut mulai pulih kembali. Salah satu faktor lainnya adalah produksi pertanian, keuangan dan perbankan, transportasi dan komunikasi. Selain dari bidang pelayaran merupakan salah satu sektor penting untuk bagi pertumbuhan ekonomi nasional karena sektor tersebut telah menyumbangkan sekitar 9.3 %.

Dalam bidang perdagangan luar negeri, Pemerintah Siprus tetap mengalami defisit sekitar US\$ 2,5 milyar rata-rata pertahunnya mengingat bahwa sampai saat ini hasil produksi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga masyarakat lebih berminat untuk mengkonsumsi produk luar negeri. Beberapa indikator ekonomi Siprus dalam tahun 2002, antara lain : Pertumbuhan ekonomi tahun 2002 mencapai 2,2 %, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,8%.

Tingkat inflasi tahun 2002 sebesar 2,8%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2%. Tingkat pengangguran tahun 2002 sekitar 3,4%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai hanya 3%. Pendapatan perkapita tahun 2002 diperkirakan sekitar US\$ 14.000, sama dengan tahun sebelumnya.⁷⁷

Pemerintah Siprus juga berusaha untuk menyesuaikan kebijaksanaan ekonomi makro dengan kebijakan ekonomi Uni Eropa karena Siprus akan menjadi anggota penuh Uni Eropa tanggal 1 Mei tahun 2004.

Penyesuaian Kebijakan ekonomi nasional terhadap Uni Eropa adalah merupakan salah satu persiapan Pemerintah Siprus untuk menjadi anggota penuh anggota Uni Eropa. Reformasi pada struktur perekonomian nasional telah diberlakukan antara lain liberalisasi perdagangan, bunga bank, menghapuskan pembatasan investasi lokal, menghapuskan pengendalian harga barang-barang dan meningkatkan peran swasta pada bidang konstruksi serta proyek infrastruktur

⁷⁶ Berita Faksimil Pusat Kajian DEPLU. *Laporan Tahunan Dari Keduataan Republik Indonesia di Qatar* Tahun 2004. Hlm 18

⁷⁷ Ibid

Perdagangan

Volume perdagangan luar negeri Siprus mengalami defisit setiap tahunnya rata-rata sekitar US\$ 3 milyar. Dalam tahun 2002 mengalami defisit karena jumlah impor jauh lebih tinggi dari jumlah ekspor. Jumlah impor Siprus 2002 mencapai CPY 2,5 milyar (sekitar US\$ 4,2 milyar) sedangkan jumlah ekspornya mencapai CPY 628 juta (sekitar US\$ 1,06 milyar sehingga defisit neraca perdagangan tahun 2002 mencapai 3,14 milyar. Komoditi ekspor terbesar adalah dari produk pertanian dan produk-produk industri ringan, yaitu sekitar 75%.⁷⁸

Komoditi Impor

Komoditi impor Siprus terdiri dari bahan baku 29,2%, kebutuhan konsumen 28,7 alat-alat transportasi 16%, bensin dan pelumas 10,8% dan produk-produk lainnya sebesar 9,9%. Pada tahun 2002, jumlah impor bahan baku US\$ 1,23 milyar, kebutuhan konsumen mencapai US\$ 1,2 milyar dan produk lainnya mencapai US\$ 418 juta, alat-alat transportasi mencapai US\$ 674 juta, bensin dan pelumas mencapai US\$ 457 juta.⁷⁹

Mitra dagang utama Siprus adalah negara-negara Uni Eropa yang telah mengekspor produk-produk tersebut diatas sebesar 53% dengan nilai sebesar US\$ 2,184 milyar. Negara-negara anggota Uni Eropa adalah Yunani, Italia, Jerman dan Inggris. Negara-negara di kawasan Asia merupakan kelompok negara terpenting kedua karena telah mengekspor sekitar 20,4% dari total impor Siprus dengan nilai sekitar US\$ 863 juta yaitu Jepang, China, Israel, Thailand, Taiwan dan Hongkong. Jepang adalah pengekspor terbesar di kawasan Asia dengan jumlah ekspor sebesar 285 juta.⁸⁰

Siprus juga mengimpor dari negara-negara di kawasan Eropa lainnya yaitu negara-negara Eropa Timur sekitar 8,6% dengan nilai sekitar US\$ 362 juta yaitu

⁷⁸ Ibid Hlm 19

⁷⁹ Ibid Hlm 20

⁸⁰ Ibid Hlm 20

Rusia, Ukraina dan Swizerland. Negara-negara di kawasan Amerika mengekspor sekitar 5,3% dari total impor Siprus dan Amerika Serikat merupakan negara terbesar dari kawasan dimaksud dengan nilai US\$ 210 juta.

Jumlah impor Siprus dari negara-negara Arab sebesar 5,3% yaitu Suriah, Mesir dan Saudi Arabia. Siprus mengimpor dari negara-negara dikawasan lainnya yaitu Argentina, Brazil, Canada, Afrika Utara, Australia dan Selandia Baru sebesar 7,4%. Sedangkan komoditi ekspor Siprus terdiri dari produk-produk industri dalam negeri sebesar 77,7%, bahan baku produk pertanian 21,3 %. Mitra dagang terbesar adalah negara-negara Uni Eropa, dimana Pemerintah Siprus mengimpor sekitar 53,4% dan ekspornya mencapai 56,7%. Mitra dagang terbesar lainnya adalah negara-negara di Timur Tengah, Eropa Timur dan Amerika Serikat.⁸¹

Komoditi Ekspor

Jumlah ekspor Siprus sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah impor, sehingga mengakibatkan minus perdagangan luar negeri hampir setiap tahunnya. Komoditi ekspor Siprus adalah produk-produk industri 63,8%, bahan baku pertanian sekitar 16,6 % dan hasil industri pertanian sebesar 14,8%. Produk-produk industri yang terbesar antara lain adalah produk farmasi, pakaian jadi, produk-produk plastik, furniture, produk-produk kertas dan rokok. Sedangkan bahan baku pertanian sebesar 16,6% dan produk-produk industri pertanian sebesar 14,8%.⁸²

Bahan baku pertanian antara lain buah Citrus dan kentang. Sedangkan hasil industri pertanian terbesar adalah keju, minuman anggur dan jus dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Negara-negara anggota Uni Eropa antara lain adalah Inggris, Yunani, Jerman dan Belanda merupakan negara pengimpor produk-produk Siprus terbesar yaitu sekitar 50,8%.

⁸¹ Ibid Hlm 21

⁸² Ibid Hlm 22

Exports: \$1.495 billion f.o.b. (2007 est.)⁸³

	Exports	Rank	Percent Change	Date of Information
2003	\$1,030,000,000	124		2001 est.
2004	\$1,054,000,000	125	2.33 %	2003 est.
2005	\$1,094,000,000	128	3.80 %	2004 est.
2006	\$1,237,000,000	133	13.07 %	2005 est.
2007	\$1,340,000,000	132	8.33 %	2006 est.
2008	\$1,495,000,000	135	11.57 %	2007 est

Negara-negara Arab yaitu Libanon, Jordan, Uni Emirat Arab, Irak, Saudi Arabia, Kuwait dan Mesir merupakan pengeksport komoditi Sirpus kedua setelah Uni Eropa yaitu sekitar 20,3 %. Negara-negara Eropa Timur yaitu Rusia, Republik Chech, Romania, Albania dan Norway mengimpor produk Sirpus sebesar 11,3 %, negara-negara di Asia yaitu Israel, Hongkong dan Malaysia mengimpor sekitar 6,8%, sedangkan negara-negara dikawasan lainnya mengimpor produk-produk Sirpus sekitar 6,6% dari total ekspor Sirpus.⁸⁴

Untuk meningkatkan volume ekspor, Kementrian Perdagangan Sirpus telah mendirikan pusat-pusat perdagangan di beberapa negara. Terdapat 12 pusat perdagangan Sirpus di beberapa negara yaitu Austria, Republik Czeck, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, Israel, Rusia, Swedia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika.

Investasi

Dibidang investasi, Pemerintah Sirpus telah berusaha untuk mendorong investor asing khususnya investor Uni Eropa dan lokal agar menanamkan modalnya di Sirpus. Salah satu kebijakan adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor, yaitu dengan menghapuskan batas maksimal modal dan jumlah pekerja bagi investor Uni Eropa dan investor lokal sejak awal tahun 2000.

Namun prosedur yang sama diberlakukan terhadap investor negara-negara Uni Eropa dan non-Uni Eropa serta lokal sama untuk menanamkan modalnya di

⁸³ Diakses melalui [www. Indexmundi.com/http. Ekspor Cyprus. Html](http://www.indexmundi.com/http.Ekspor%20Cyprus.html) tanggal 1-7-09 Pukul 01.00 Wib

⁸⁴ Ibid Hlm 25

Siprus. Selain itu, Pemerintah Siprus telah memberikan kebebasan bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk mata uang asing.

Kebijakan tersebut telah meningkatkan jumlah investasi di Siprus. Jumlah investasi asing tahun 2002 sebesar US\$ 164 juta, tahun 2001 mencapai US\$ 163 juta dan tahun 2000 yang mencapai US\$ 162,6 juta. Investasi asing di Siprus meliputi berbagai bidang antara lain pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dan perbankan. Sekitar 54.000 perusahaan asing dan 14.000 Pusat Bisnis Internasional dengan 1.200 kantor asing beroperasi di Siprus.⁸⁵

Pariwisata

Bidang Pariwisata dan jasa merupakan salah satu bidang yang diandalkan Pemerintah Siprus untuk meningkatkan pendapatan negara. Jumlah pendapatan bidang pariwisata rata-rata dalam satu tahun sekitar US\$ 2 milyar dengan jumlah pengunjung sekitar 2,5 juta turis dari manca negara. Jumlah wisatawan terbesar berasal dari Inggris, Jerman, Yunani dan Italia. Jumlah wisatawan menurun secara drastis setelah serangan teroris 11 September 2001, namun pada saat ini telah mulai normal kembali.

Pemerintah Siprus menyadari bahwa bidang pariwisata sangat tergantung dari kondisi dalam negeri serta gejolak politik luar negeri, sehingga pemerintah berusaha menggalakkan dan meningkatkan sektor tersebut dengan meningkatkan sektor jasa serta senantiasa memelihara dan membangun fasilitas pariwisata. Sektor pariwisata sangat penting bagi perekonomian nasional karena dapat menyerap tenaga kerja sekitar 40.000. Tenaga kerja bidang pariwisata ditempatkan diberbagai sektor jasa antara lain perhotelan, restoran, dan pemandu pariwisata.⁸⁶

Pelayaran

Pemerintah Siprus telah mengolah sektor pelayaran untuk dapat menunjang pendapatan devisa asing sejak tahun 1963 dengan memperkenalkan

⁸⁵ Ibid Hlm 30

⁸⁶ Ibid Hlm 31

peraturan yang mengatur kapal-kapal yang singgah di perairan Siprus. Letak geografis Siprus strategis yang menjembatani antara kawasan Eropa dan kawasan Timur Tengah telah mendorong pemerintah setempat untuk membangun pelabuhan Larnaka sebagai salah satu tempat untuk persinggahan kapal-kapal asing untuk kebutuhan dagang.

Sampai saat ini terdapat lebih dari 100 perusahaan pelayaran yang beroperasi dipelabuhan di Siprus. Pelabuhan di Siprus menduduki urutan ke 6 terbesar didunia yang disinggahi kapal-kapal asing dengahn sekitar 2.700 kapal dengan muatan 26 juta gros ton.⁸⁷

Sebanyak 25% dari Perusahaan Pelayaran Siprus di Siprus merupakan perusahaan Uni Eropa. Perusahaan pelayaran telah memberikan kontribusi 2% dari pendapatan negara. Sampai tahun 2002 tercatat sekitar 140 perusahaan yang beroperasi dalam industri pelayaran dengan menyerap sekitar 5000 tenaga kerja.

Industri

Sebagian besar hasil industri Siprus adalah industri ringan tanpa menggunakan teknologi canggih yaitu antara lain makanan, tekstil, kulit, furniture, kayu, kertas, plastik. Untuk meningkatkan persaingan di pasar internasional, Pemerintah Siprus berusaha untuk menggunakan teknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas produkproduk industrinya, karena kontribusi dari produk-produk industri tersebut merosot dalam 15 tahun terakhir ini.

Selain dari itu, kebijakan pemerintah untuk menggunakan teknologi tinggi juga untuk mengadopsi ketentuan dari Uni Eropa. Kebijakan Pemerintah Siprus untuk menggunakan teknologi tinggi adalah selain untuk bersaing di pasar internasional juga untuk dapat bersaing di pasar lokal, karena tidak adanya hambatan tarif maupun non tarif bagi produk-produk asing untuk bersaing di pasar Siprus.⁸⁸ Sehingga masyarakat Siprus lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk-produk impor, mengingat kualitas lebih baik dari produk lokal dan harganya dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.

⁸⁷ Ibid Hlm 34

⁸⁸ Ibid Hlm 37

Sektor industri telah menyumbangkan sekitar 10% pada GDP, selain dari itu sektor industri juga merupakan sektor penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya untuk mengurangi pengangguran karena tenaga kerja yang diserap sektor industri sekitar 37.400 orang.

Pemerintah Siprus telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan terhadap para pekerja di Siprus.

Perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh bantuan dari bank akan terdorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas khusus demi pemulihan ekonomi. Pembaruan ini terdiri dari proses desentralisasi manajemen terhadap produksi dan jasa, memperkuat otonomi daerah, perlindungan hak milik umum, penataan kembali administrasi pusat dengan mengurangi jumlah kementrian dan perkantoran.

Kamar Dagang Siprus adalah organisasi dagang terbesar di Siprus yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Siprus. Kamar Dagang ini mewakili lebih dari 30% total keseluruhan aktivitas bisnis di Siprus serta turut mendorong aktivitas perdagangan luar negeri Siprus melalui berbagai upaya promosi maupun pameran perdagangan.

Kamar Dagang ini terbagi dua cabang : industri dan perdagangan. Selain itu, Siprus juga memiliki Klub Pusat Bisnis (*The Business Center Club*) yang didirikan pada tahun 1991, sebagai organisasi dagang terbesar kedua yang didirikan oleh pihak swasta tanpa keterlibatan pemerintah. Klub ini mewakili lebih dari 1.800 perusahaan swasta dan perusahaan asing Siprus.

Organisasi bisnis dan dagang di Siprus lainnya antara lain: Dewan Bisnis Siprus (*The Polish Business Council*), Asosiasi Manajer di Siprus (*The Association of Managers in Siprus*), dan Konferensi Pengusaha-Pengusaha Swasta Siprus (*The Polish Conference of Privte Employers*)

3.2 Hubungan Kerjasama Siprus dan Uni Eropa

Hubungan antara Uni Eropa dengan Siprus pasca perang dingin berlangsung lebih baik karena adanya keterdekatan geografis serta itikad baik dari Siprus untuk bergabung dengan dunia barat. Uni Eropa bertekad untuk senantiasa meningkatkan kerjasamanya dengan Siprus secara intensif yang dibuktikan dengan pemberian sejumlah program bantuan.

Pada pertemuan puncak negara-negara industri Barat di Paris bulan Juli 1990, Komisi Masyarakat Eropa mendapat mandat untuk mengkoordinir program bantuan bersama bagi Siprus dan Hongaria dari negara-negara industri dalam kelompok 24 (*the Group of 24*). Kelompok 24 terdiri dari 12 negara anggota Masyarakat Eropa, 6 negara anggota EFTA ditambah Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Turki.⁸⁹

Kelompok 24 tersebut sepakat untuk melaksanakan lima bidang pembaharuan di kedua negara yang meliputi : restrukturisasi sektor pertanian Siprus; perbaikan akses ke pasaran negara-negara Barat bagi barang-barang dari Siprus dan Hongaria; promosi bidang investasi di Siprus dan Hongaria: melakukan latihan-latihan kejuruan pada berbagai tingkat khususnya dibidang keuangan dan perbankan serta perbaikan di bidang lingkungan, khususnya di daerah industri termasuk tempat-tempat bersejarah dan bernilai seni.

Untuk memperoleh bantuan ekonomi ini, Siprus harus membangun suatu ekonomi pasar, pemerintah yang demokratis serta menghargai hak-hak azasi manusia.

Bantuan Masyarakat Eropa ke Siprus dalam bentuk bantuan darurat ini telah dikirimkan sejak bulan Agustus 1991. Masyarakat Eropa tidak hanya mengirimkan bantuan ke Siprus berupa gandum, daging, minyak oli dan buah jeruk, akan tetapi juga mengalokasikan dana sekitar 200 juta ECUs dalam bentuk hibah bagi proyek-proyek penting. Masyarakat Eropa juga menyediakan dana 1.000 juta ECUs melalui Bank Investasi Eropa.

⁸⁹ Agus R, Rahman. *Penelitian Perubahan Konfigurasi Ekonomi-Politik Eropa: Pendalaman dan Perluasan Masyarakat Eropa*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pembangunan Politik dan Kewilayahan LIPI. 1993.Hlm 66

Tabel 3.3 Bantuan Uni Eropa Terhadap Siprus

Tahap	Periode	Tujuan
I	1989-1991	Bantuan kemanusiaan bagi Siprus pasca perang dingin
II	1991-1993	Bantuan dana structural dan pelatihan
III	1993-1997	Dukungan bagi investasi di Siprus
IV	1997-1999	Bantuan guna mendukung kebutuhan pre-accesion Siprus
V	1997-2006	Bantuan struktural Uni Eropa di Siprus
VI	2000-2008	Program bantuan bagi integrasi Siprus ke Uni Eropa (PHARE II, ISPA, SAPARD)

Sumber : [Http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.html](http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.html).

Pada dasarnya program bantuan Uni Eropa bagi Siprus terbagi menjadi dua macam. Pertama program bantuan dana struktural bagi pembangunan kembali Siprus pasca perang dingin, seperti terlihat pada tabel diatas. Program bantuan dana struktural Uni Eropa ke Siprus ini dimaksudkan untuk mendukung penyelesaian permasalahan ekonomi maupun sosial yang sedang dihadapi oleh Siprus pasca perang dingin serta meningkatkan sumber daya manusia Siprus.⁹⁰

Kedua adalah program serta bantuan guna mendukung *pre-accession* Siprus ke Uni Eropa yakni program PHARE, ISPA dan SAPARD.

Pada tahun 1991, Masyarakat Eropa (Uni Eropa) memberikan dana bantuan melalui program PHARE I sebesar kurang lebih 200 juta Euro. Pada periode 2000-2006, Uni Eropa manganggarkan total dana PHARE II sejumlah 1.560 juta Euro untuk investasi serta pembangunan kelembangaan di Siprus dan Hongaria. Dalam PHARE II tersebut, Siprus mendapatkan dana bantuan sebesar 340-400 juta Euro.⁹¹

Program ISPA (*Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Program*) merupakan dana bantuan untuk membantu para negara kandidat memenuhi syarat-syarat (*acquis*) Uni Eropa terutama di bidang transportasi dan

⁹⁰ (<http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.htm>).

⁹¹ (<http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.html>).

konservasi lingkungan hidup. Total dana ISPA periode 2000-2006 adalah 1.040 juta Euro, Siprus mendapatkan dana 330-370 juta Euro

Program SAPARD (*Special Accession Program for Agricultural and Rural Development*) merupakan dana bantuan Uni Eropa bagi pembangunan infrastruktur pedesaan dan pertanian para negara kandidat demi memenuhi syarat *acquis*. Total dana SAPARD periode 2000-2006 adalah 520 juta Euro, 170 juta Euro dialokasikan Siprus.⁹²

Tabel 3.4 Bantuan Uni Eropa Terhadap Siprus Untuk Memenuhi Acquis

Instrumen Keuangan	Tujuan	Jumlah Anggaran	
		Total	Dana bagi Siprus
		Juta Euro	
PHARE	Dukungan investasi serta pembangunan kelembagaan	1.560	350 - 400
ISPA	Adaptasi <i>acquis</i> di bidang transportasi dan lingkungan	1.040	330 – 370
SAPARD	Pembangunan infrastruktur pedesaan serta pertanian	520	170

Sumber : <http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.html>

Selain program-program bantuan diatas, Uni Eropa juga mengadakan proyek *twinning* untuk empat sektor kebijakan publik: pertanian, lingkungan hidup, keuangan, masalah-masalah keadilan serta domestik. Proyek *twinning* merupakan suatu bantuan teknis yang langsung ditujukan pada suatu proyek tertentu di Siprus. Namun para pelaku proyek *twinning* tersebut harus melakukan hubungan kerja dengan mitra (yang telah ditunjuk) dari Uni Eropa secara terus menerus. Pada tahun 1998, Kementerian Pertanian Siprus mengadakan proyek *twinning* dengan para mitranya di Denmark, Jerman, Irlandia, Perancis dan Belanda.

⁹² (<http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.html>).

Selain bantuan teknis, Uni Eropa juga melakukan investasi di Siprus yang meliputi investasi di bidang struktur dan pembangunan; mesin, peralatan dan instalasi serta transportasi. Investasi langsung ekonomi swasta Uni Eropa di Siprus meliputi sekitar lebih dari 300 juta euro. Investasi-investasi Uni Eropa dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5 Investasi Uni Eropa di Siprus

Investasi		1998	1999	2000	2001	2002
Total Investasi	Juta Euro	369,7	366,1	368,6	344,6	324,9
Struktur dan pembangunan	Juta Euro	107,1	112,8	122,1	112,7	106,1
Mesin, peralatan dan instalasi	Juta Euro	129,4	124,8	123,2	121,5	103,3
Transportasi	Juta Euro	133,2	128,5	123,3	110,4	115,5

Sumber: http://europa.eu.int/sy/financ/index_en.htm

3.3 Faktor-Faktor Pendorong Percepatan Siprus Masuk dalam Keanggotaan Uni Eropa

Kriteria Politik

Referendum inisiatif sekjen PBB yang diselenggarakan pada bulan April 2004 pada intinya antara lain pengembalian Siprus Yunani yang dulu diduduki Turki pasca perpecahan 1974 dan pengaturan sistem keamanan terkait dengan keberadaan Turki di Siprus Utara, etnis Siprus menolak inisiatif Sekjen PBB dengan alasan utama bahawa tidak ada jaminan keamanan di masa yang akan datang mengingat masih adanya pasukan Turki di wilayah Utara.

Siprus Turki mengharapakan dunia Internasional melakukan langkah-langkah diakhirinya blokade yang diterapkan Siprus Turki sejak terjadinya perpecahan.

Siprus Yunani melalui perjuangan yang gigih mendapatkan dukungan dari pemerintah Yunani untuk menjadi anggota Uni Eropa (Mei 2004) dengan

demikian Siprus telah memiliki wewenang dan kewajiban sebagai anggota UE, sementara dipihak lain Siprus Turki dan Turki tidak mengalami perubahan.

Turki telah banyak mengalami perubahan. Turki mulai banyak pertimbangan karena Turki mau masuk menjadi anggota Uni Eropa. Pemerintahan Siprus Yunani menjadi bagian dari Uni Eropa meninggalkan Siprus Turki. Presiden Tassos Papadpoulos mengharapkan agar Siprus Turki mendapat manfaat dari bergabungnya Siprus Yunani dalam keanggotaan Uni Eropa. Meskipun tidak mengakui eksistensi dari Siprus Utara, Uni Eropa dan Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang lunak kepada mereka.

Kriteria Ekonomi

Di bidang ekonomi, Siprus telah memiliki hampir semua sifat-sifat ekonomi pasar, memiliki krangka kerja institusional yang baik, sektor swasta yang dinamis, dan peraturan perdagangan bebas. Ekonomi Siprus memiliki potensi untuk tumbuh dan menunjukkan kemampuan beradaptasi yang tinggi, khususnya dalam konteks persatuan perdagangan, yang telah mendorong modernisasi. Faktor-faktor ini memungkinkan Siprus untuk menyediakan pasar yang kuat dalam persaingan.

Siprus telah membuat kemajuan dalam stabilisasi ekonomi makro, privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah berjalan dengan baik, dan langkah penting untuk mereformasi sistem pertanian, sistem keamanan sosial, dan sektor finansial telah diambil. Siprus yang sedang dalam masa transisi ekonomi pasar, masih memerlukan peningkatan refotmasi struktural, terutama sistem perbaikan dan keamanan sosial.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Siprus adalah tingkat pengangguran yang telah meningkat sejak tahun 1994 (14,45%). Bahkan pada tahun 2002, tingkat pengangguran Siprus mencapai 19,9%. Tingginya tingkat pengangguran ini disebabkan oleh adanya restrukturisasi ekonomi yang berkelanjutan, ketatnya peraturan pasar pekerja, biaya pekerja yang relatif tinggi dan perkembangan demografi (terjadinya *baby boomers*).

Walaupun demikian, jika Siprus ingin menjalankan perekonomiannya secara efisien dan mendapatkan keuntungan dengan sebesar-besarnya, maka Siprus harus membangun stabilitas ekonomi makro yang dapat diandalkan serta suatu iklim yang memungkinkan sektor finansial berperan sebagai perantara. Pemerintah Siprus juga harus terus memusatkan perhatian untuk menurunkan tekanan inflasi dan defisit publik, serta mempertahankan komitmen mereka bagi reformasi struktural dan liberalisasi pasar.

Siprus telah melaksanakan *Custom Union* sejak tahun 2002 dan telah memperlihatkan kemampuannya untuk menerapkan syarat-syarat yang diajukan dalam keputusan Custom Union. Siprus juga telah berhasil memenuhi batas waktu yang diberikan. Siprus telah memulai proses penyatuan dengan hukum-hukum Uni Eropa pada hampir setiap bidang yang ditunjuk dalam *European Strategy*, meskipun masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan, terutama dalam hal pasar internal, pertanian, perhubungan, dan lingkungan.

Harmonisasi di sektor finansial juga telah mengalami peningkatan. Secara umum situasi yang berkaitan dengan kebebasan pergerakan barang cukup memuaskan dan Siprus telah mencapai tingkat yang tinggi dalam pengadaptasian standar Eropa walau belum sepenuhnya mengadaptasi kerangka hukum.

Sistem perekonomian Siprus adalah liberal dimana pemerintahan mereka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk mengelola perekonomian mereka. Sedangkan pemerintahan Siprus berperan sebagai pelengkap dan pendorong bagi pengembangan dan pemeliharaan makro ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di Siprus tahun 2004 dan naik 3,5% dari tahun 2003 yang mencapai 2% tingkat inflasi turun 2,5% dari 4,1% pada tahun 2003 defisit fiskal turun 4,4% terhadap GDP dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 5,4% dalam kurun waktu 2004 Siprus masih mengandalkan sektor-sektor pariwisata dan maritimnya dalam rangka mengembangkan roda ekonomi.

Dalam rangka menggerakkan roda perekonomiannya jumlah pendapatan dari sektor pariwisata pada tahun 2004 mencapai Cyp 982,3 juta (sekitar 2,16 miliar US Dolar) turun 3,2% dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai

sekitar Cyp 1.015 juta (2,23 miliar US Dolar) turis asing yang berkunjung ke Siprus pada tahun 2004 mencapai 2.3 juta orang.

Tahun 2004 pemerintah Siprus tetap melanjutkan ekonomi liberal dan terus melanjutkan kebijakan tersebut guna menyesuaikan dengan keanggotaan Uni Eropa. 1 Mei 2004 Siprus masuk dalam keanggotaan Uni Eropa serta harus lebih terbuka dalam bidang ekonomi dan sebagai kebijaksanaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, konsekuensinya 0% untuk bea tarif masuk terhadap produk-produk yang masuk dari Uni Eropa dan harus menerapkan pajak bea masuk yang setinggi-tingginya untuk negara yang bukan anggota Uni Eropa, selain itu peraturan Uni Eropa, pemerintah Siprus harus meningkatkan pajak VAT 15% untuk beberapa jenis produk sebelum masuk Uni Eropa pemerintah Siprus telah menerapkan pajak VAT 10-13% sehingga barang yang dipasarkan di Siprus menjadi lebih mahal dari sebelumnya.

Pada awal 2004 pemerintah Siprus lebih dulu telah melakukan sosialisasi untuk menerapkan standar pajak VAT yang baru dibidang pertanian, peternakan dan perdagangan pemerintah Siprus telah memberikan sanksi ekonomi terhadap beberapa perusahaan swasta yang tidak dapat memenuhi standar pajak tersebut, untuk bidang investasi mengingat kondisi politik dan sistem perekonomian Siprus yang cukup kondusif maka investor lokal dan asing sangat tertarik untuk menanamkan modal di Siprus.

Pemerintah Siprus telah menghapus kebijakan/peraturan yang menghambat arus asing yaitu para investor dan investor asing (non Uni Eropa) dimana sebelumnya mereka tidak boleh menanamkan investasi 100% di Siprus, namun sejak 1 Oktober 2004 perusahaan asing non Eropa telah diizinkan untuk menanamkan modal 100% di Siprus. Kebijakan tersebut telah meningkatkan investasi lokal dan asing beroperasi di Siprus sehingga mencapai 9.288 atau telah meningkat dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 9.080 jumlah perusahaan lokal yang beroperasi di Siprus sampai dengan bulan September 2004 mencapai 122.260 dalam bidang moneter pemerintah Siprus telah merencanakan akan menggunakan mata uang Euro pada kuartal kedua tahun 2005 dan Siprus mengharapkan pemerintahnya telah dapat memenuhi syarat-syarat yang telah

ditetapkan oleh Uni Eropa agar sistem pemakaian mata uang Euro dapat diberlakukan sepenuhnya 2005.

Cyprus Exports by Product Section in US Dollars - Yearly⁹³

Section	2001	2002	2003	2004	2005	
0 - Food and live animals	\$107,690,000	\$114,360,000	\$142,864,000	\$194,400,000	\$190,253,000	All countries
1 - Beverages and tobacco	\$278,513,000	\$130,070,000	\$115,918,000	\$78,529,000	\$85,396,000	All countries
2 - Crude materials, inedible, except fuels	\$20,507,000	\$22,266,000	\$25,512,000	\$38,441,000	\$42,181,000	All countries
3 - Mineral fuels, lubricants and related materials	\$88,887,000	\$67,866,000	\$86,015,000	\$83,903,000	\$231,576,000	All countries
4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes	\$3,099,000	\$5,121,000	\$5,143,000	\$4,226,000	\$3,342,000	All countries
5 - Chemicals and related products, n.e.s.	\$79,831,000	\$98,604,000	\$105,056,000	\$141,847,000	\$162,407,000	All countries
6 - Manufactured goods classified chiefly by material	\$93,527,000	\$68,947,000	\$70,184,000	\$63,157,000	\$49,798,000	All countries
7 - Machinery	\$198,884,000	\$228,544,000	\$280,027,000	\$434,449,000	\$634,585,000	All countries

⁹³ Diakses melalui [www. Indexmundi.com/http. Ekspor Cyprus. Html](http://www.Indexmundi.com/http.EksporCyprus.Html) tanggal 1-7-09 Pukul 01.00 Wib

and transport equipment						es
8 - Miscellaneous manufactured articles	\$102,756,000	\$100,582,000	\$90,981,000	\$131,793,000	\$133,047,000	All countries
9 - Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC	\$819,000	\$938,000	\$1,164,000	\$722,000	\$13,680,000	All countries

Dalam bidang energi pemerintah Siprus juga telah meliberalisasikan harga bahan bakar minyak. Pada bulan Mei 2005 dimana perusahaan-perusahaan minyak lokal dapat menentukan sendiri harga bahan bakar yang di jual di pasar. Selain itu pemerintah Siprus harus mengimpor produk minyak tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi dalam negerinya. Melonjaknya harga minyak di pasar mengakibatkan harga BBM yang dipasarkan di Siprus juga harus meningkat.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Siprus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya adalah masih besarnya angka defisit neraca perdagangan luar negerinya. Jumlah defisit perdagangan luar negerinya paada Januari-November 2004 sebesar 3,9 miliar US\$.

Sedangkan untuk jumlah defisit untuk periode yang sama pada tahun 2003 mecapai 3,3 miliar US\$ makin besarnya defisit neraca perdagangan luar negeri Siprus disebabkan masih mengandalkan produk-produk impor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri dalam negerinya antara lain minyak bumi sebagai bahan bakar industri misin-mesin dan alat-alat tranportasi.

Selain itu pemerintah Siprus harus meliberalisasikan ekonominya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Uni Eropa sejak tanggal 1 Mei 2004 produk yang di

ekspor oleh pemerintah Siprus antara lain: produk pertanian, alat rumah tangga, buah-buahan, mesin cetak/alat percetakan, dan peralatan kantor.

Produk-produk tersebut disaingi oleh produk-produk impor dari negara Uni Eropa dan negara non Uni Eropa namun dengan daya beli masyarakat setempat yang cukup tinggi, dengan income US\$ 18000 (2004) masyarakat setempat menggunakan produk impor tersebut walaupun harganya lebih mahal dibandingkan produk dalam negeri sendiri.

3.4 Komitmen Siprus Untuk Memenuhi Kewajiban Keanggotaan Uni Eropa

Dalam rangka mengintensifkan langkah-langkah menuju ke arah intergrasi Siprus dalam Uni Eropa, Siprus berusaha menyesuaikan kebijakan politik luar negerinya antara lain:

- Siprus berusaha menciptakan kerukunan nasional melalui dialog kelompok oposisi menuju demokratisasi dan pluralisme segala bidang kehidupan.
- Di bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk mempercepat proses swastanisasi dan melanjutkan kebijaksanaan ekonomi pasar serta menekan inflasi. Pemerintah juga berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan hukum ekonomi pasar.
- Meningkatkan kontak-kontak bilateral, kerjasama ekonomi maupun politik dengan negara-negara Uni Eropa.

BAB IV

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dilakukan analisis atas implikasi penerimaan Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

4.1 Implikasi masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap Proses masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa

Dengan menggunakan pendekatan neo-liberal institusional, terutama dalam bentuk kerjasama yang dapat mendorong terjadinya integrasi regional serta disertai dengan asumsi-asumsi neoliberal institusionalis dan konsep-konsep lain yang mendukungnya, maka penyusunan hipotesis yang akan dikemukakan penulis mengenai implikasi masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa melalui analisis, sebagai berikut.

Perspektif ini mempunyai empat asumsi dasar yaitu:

1. Neo-liberal institusionalis mengakui keberadaan aktor negara dan non negara. Menurut Keohane, negara merupakan perwakilan resmi yang memiliki legitimasi dari masyarakat
2. Bagi neo-liberal institusionalis, struktur sistem internasional berada dalam kondisi yang anarki. Kondisi sistem internasional yang anarki dapat diatasi melalui pembentukan institusi internasional yang berperan sebagai mediator. Selain itu, institusi internasional juga berperan sebagai tempat penyelesaian hukum internasional dan masalah-masalah internasional lainnya.
3. Interaksi pada tingkat regional dan global semakin meningkat sehingga semakin meningkat menjadi tahapan integrasi.
4. Neo-liberalis institusionalis berpendapat bahwa dunia ini bukan *zero sum game* dimana suatu aktor menang sedangkan aktor lainnya kalah. Namun

berupa *Variabel-sum game* yakni, melalui kerjasama. Semua aktor akan mendapatkan keuntungan bersama.⁹⁴

Sistem internasional yang anarki didefinisikan sebagai tidak adanya pemerintah pusat dalam sistem internasional yang dapat memaksakan peraturan, sebagai suatu standar dari masyarakat domestik. Neo-liberalinstitusionalis mengakui kondisi sistem internasional yang anarki, namun hal ini tidak berarti kerjasama tidak mungkin dilaksanakan.⁹⁵

Neo-liberal institusionalis berpendapat bahwa kekerasan dan anarki dalam sistem internasional dapat diatasi melalui pembentukan institusi bagi kerjasama internasional. Kerjasama dimungkinkan melalui peran mediator dalam institusi internasional, hukum internasional dan saling ketergantungan ekonomi. Institusi internasional dapat mengurangi biaya-biaya verifikasi, penguatan hubungan timbal balik dan membuat pelaksanaan norma-norma lebih mudah dilakukan.

Kohane berpendapat bahwa aktor-aktor non-negara subordinat ke negara. Negara adalah aktor yang rasional, egois dan atomistic. Neo-liberal institusionalis berasumsi bahwa negara hanya memiliki satu tujuan dalam interaksi internasional yaitu untuk mendapatkan keuntungan individu. Neo-liberal institusionalis berasumsi bahwa negara mendefinisikan kepentingan mereka dalam term-term individualistik. Demi mencapai keuntungan yang dimaksud diatas, negara-negara saling berkoordinasi kebijakan luar negeri mereka. Apabila mereka tidak melakukan kerjasama, interaksi antar negara dapat lebih kacau dan berbahaya sehingga negara tidak mendapatkan keuntungan apa pun.⁹⁶

Menurut neo-liberal institusionalis, organisasi internasional bertindak sebagai mediator dimana organisasi tersebut membantu kerjasama-kerjasama antar negara dan lembaga tersebut akan berkembang baik dalam daya jangkauan termasuk peningkatan jumlah anggota. Organisasi internasional, menurut neo-liberal

⁹⁴ Robert O Keo Hane *International Relations and State Power* . Bolder: Westview Press.1989
Hlm 8-9

⁹⁵ Ibid., Hlm 7

⁹⁶ Robert O Keo Hane Op Cit Hlm 9

institusionalis, adalah serangkaian aturan-aturan dimana pemerintah melakukan aksi dalam wilayah tertentu.⁹⁷

Legitimasi bukanlah hak mutlak dari suatu negara, namun sesuatu yang apat diperoleh melalui pemerintah yang humanistik dan melalui prosedur demokratis. Bagi Keohane, kerjasama ini tidak berjalan secara otomatis, namun membutuhkan perencanaan dan negosiasi.⁹⁸ Pada dasarnya struktur sistem internasional berada dalam kondisi anarki, sehingga diperlukan peranan organisasi internasional sebagai mediator serta sebagai tempat penyelesaian konflik. Dengan kerjasama antara Siprus dengan Uni Eropa yang terus menerus berinteraksi dan akhirnya diterima sebagai anggota Uni Eropa mengakibatkan sulitnya usaha Turki menjadi bagian dari Uni Eropa, karena Turki tidak mengakui Siprus Yunani maka ia menutup akses pelabuhan bagi Siprus.

Dalam peraturan Uni Eropa, setiap negara yang ingin berhubungan dengan Uni Eropa apalagi ingin masuk sebagai anggota Uni Eropa, mereka dituntut untuk memenuhi semua aturan Uni Eropa. Perubahan sistem internasional di Eropa setelah bubarnya Uni Soviet tahun 1991 mendorong Uni Eropa untuk semakin meningkatkan kerjasama serta mencakup bidang-bidang kerjasama yang lebih luas. Uni Eropa memberi sinyal untuk membuka pintu bagi anggota-anggota baru melalui isu perluasan (*enlargment*) khususnya dari negara-negara bekas komunis di kawasan Eropa Tengah dan Timur demi mencapai suatu integrasi yang lebih mendalam antar negara-negara di kawasan Eropa.

Isu perluasan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Uni Eropa untuk memperluas pasara bersama dan untuk memperkuat ideologi demokrasi dunia. Dalam konteks hubungan internasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan arah serta kebijaksanaan tingkah laku negara yang ditujukan ke negara lainnya merupakan usaha memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara yang ingin dicapai oleh negara tersebut diluar batas negaranya.

Seperti halnya Siprus, Turki memiliki kepentingan atas bantuan keuangan dari Uni Eropa untuk mendorong perekonomiannya, Turki mengharapkan kerjasama yang selama ini dijalin dengan Uni Eropa dapat meningkatkan

⁹⁷ Ibid., Hlm 10

⁹⁸ Ibid., Hlm 11

pengakuan dari masyarakat internasional bahwa mereka adalah negara yang menjunjung demokrasi dan lebih demokrasi dibanding negara Islam lainnya.

Posisi kedua negara memang sangat strategis Turki wilayahnya sangat luas dan berbatasan dengan Irak dan Iran, wilayah Turki dilalui oleh pipa minyak Eropa. Sedangkan Siprus meskipun merupakan negara pulau yang kecil tetapi posisinya yang sangat strategis dan dikelilingi laut Mediterania dan sebelah Selatannya berbatasan dengan Mesir dan Siprus adalah wilayah Uni Eropa yang paling Selatan.

Turki juga memiliki sumber daya manusia yang sangat besar jumlahnya dan juga bahan mentah yang tersedia sangat melimpah, Turki merupakan kekuatan terbesar setelah Amerika Serikat dalam NATO. Negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan integrasi. Motivasi pertama adalah adanya kemauan untuk membentuk pemahaman baru tentang Eropa dalam membangun suatu identitas bersama dan sebagai alternatif identitas kebangsaan. Kedua, adanya keinginan untuk hidup berdampingan secara damai, terutama untuk melindungi diri dari ancaman ekspansi komunis.

Perlu diingat bahwa saat perang dingin Turki merupakan zona penangkal masuknya komunis. Ketiga, adanya motivasi untuk mencapai kemakmuran. Keempat, motivasi untuk mengembangkan konsep kebebasan dan mobilitas barang, jasa, modal serta manusia dikawasan Eropa Barat. Kelima, adanya upaya untuk menciptakan suatu ketentuan baru dari negara-negara Eropa Barat agar dapat menjalankan peran politiknya dalam skala regional maupun global.

Salah satu prioritas utama pada pemerintahan Presiden Turki saat ini adalah kepastian akan status Turki dalam keanggotaan Uni Eropa, menjadi anggota secara penuh dan bukan sebagai mitra utama dari Uni Eropa. Melalui kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kondisi ekonomi di Turki, sehingga dapat mempercepat masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

Kerjasama yang dilakukan antara Turki dan Uni Eropa diawali dari kerjasama di bidang perdagangan, reformasi ekonomi, dan pasar domestik, reformasi ekonomi menyangkut upaya privatisasi, perkembangan sektor keuangan dan transportasi dalam kegiatan perbankan. Pasar domestik meliputi hak-hak

kekayaan intelektual, liberalisasi pergerakan modal, sertifikasi, standarisasi produk serta investasi. Kemudian kerjasama tersebut meluas ke arah pertanian, lingkungan hidup, masalah hukum dan keadilan.

Pada situasi globalisasi saat ini, salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah transaksi perdagangan luar negerinya, baik nilai ekspor maupun impornya. Bagi negara-negara maju, mayoritas perekonomiannya bergantung pada pertumbuhan industri manufaktur yang didukung oleh industri menengah dan kecil termasuk faktor teknologi yang akan meningkatkan daya saing suatu produk. Sedangkan bagi sebagian negara lain, terutama negara-negara miskin dan berkembang, perekonomiannya bergantung pada sumberdaya alam serta pengelolannya.

Pendapatan perkapita masyarakatnya terus meningkat, dari 1.539 dollar AS pada tahun 1980, naik menjadi 2.687 dollar tahun 1990 dan diharapkan akan menjadi 3000 dollar AS di tahun 1996. Perekonomian Turki diharapkan tumbuh 5 sampai 6% pertahunnya. Perkembangan ekonomi Turki sungguh-sungguh seperti tercantum dalam *Turkey Almanac* tahun 1995.

Sampai dengan tahun 1980-an, industrialisasi dan usaha pembangunan di Turki dibentuk oleh kebijaksanaan impor, melindungi hambatan bagi impor dengan tarif tinggi dan kuota, suku bunga riil negatif dan menilai mata uangnya terlalu tinggi.

Kebijaksanaan yang mendorong lonjakan kenaikan inflasi pada dasarnya disebabkan defisit anggaran yang besar, dalam bentuk pembiayaan yang tak akan terpikul, sehingga menimbulkan lingkaran persoalan yang tak akan habis.

Strategi yang sebenarnya merupakan menekan upaya laju inflasi ini pada kenyataannya malah membuat lonjakan kenaikan harga yang akhirnya menyebabkan inflasi. Kebijakan nilai tukar guna mendorong nilai ekspor.

Strategi yang secara parsial telah berhasil mengendalikan dan menurunkan tingkat inflasi tahunan itu malah menjadi bomerang dengan melonjaknya impor membengkaknya defisit neraca perdagangan sampai dengan 65%.

Perluasan keanggotaan Uni Eropa dengan masuknya banyak negara pecahan Uni Soviet masih menyisakan sebuah dilema besar, yaitu Turki.

Sebagai negara berpenduduk kedua terbesar di Eropa setelah Jerman, Turki sampai saat ini masih terus berjuang untuk bisa diterima sebagai anggota Uni Eropa. Demografi negara yang sebagian besar wilayahnya masuk ke Benua Asia itu, yang mayoritas beragama Islam, dinilai sebagai salah satu sumber ketidaksetujuan banyak negara UE lainnya. Di awal tahun 2007, setelah proses negosiasi resmi dimulai sejak tanggal 3 Desember 2005, ternyata prosesnya tidak semulus proses negosiasi UE dengan 12 negara-negara Eropa Timur, Tengah dan Mediteranian.

Negosiasi UE dengan ke-12 negara tersebut sejak awal tidak memperlihatkan hambatan yang berarti. Berbeda dengan Turki yang sejak awal dihadapkan dengan berbagai isu seperti tersebut di atas. Bahkan saratnya isu-isu sensitif menyangkut Turki, mendorong para kepala negara anggota UE dalam pertemuannya di Brussel tanggal 14-15 Desember 2006 lalu, untuk menunda proses negosiasi yang telah berlangsung selama setahun.

Dalam pertemuan tingkat kepala negara tersebut, para pemimpin negara anggota UE sepakat untuk menunda negosiasi terhadap 8 bab (dari 35 bab yang dirundingkan), yang menjadi dasar bagi perundingan selanjutnya. Beberapa isu sensitif yang terkait antara lain adalah mengenai Cyprus, dimana UE mendesak Turki untuk mengakui Republik Cyprus, menarik sekitar 40 ribu pasukannya yang menduduki bagian utara pulau Cyprus, mencabut embargo kapal-kapal dan pesawat Cyprus berdasarkan Protokol Ankara, serta menyelesaikan sengketa Cyprus dalam kerangka PBB.

Masalah lain yang disorot adalah demokratisasi, dimana UE menyoroti perlunya kebebasan berbicara, terutama dikaitkan dengan pasal 31 hukum pidana Turki, yang memungkinkan dilakukannya tuntutan hukum atas dasar penghinaan bagi orang-orang yang sering mengkritik pemerintah Turki. Selanjutnya Turki juga dinilai masih enggan untuk melakukan pembicaraan mengenai kasus *genocide* di Armenia, menekan kebebasan beragama dengan memaksakan

sekularisme dan menekan hak-hak suku minoritas khususnya suku Kurdi dan Muslim Suni.

Ditunjolkannya isu-isu yang hingga kini menjadi keberatan di pihak Turki, merupakan langkah cerdas UE dalam merespon keinginan sebagian negara anggotanya untuk menunda masuknya Turki ke dalam UE. Mereka yang menginginkan penundaan umumnya beralasan mengenai perlunya UE untuk memprioritaskan penuntasan masalah internal, seperti masa depan Konstitusi UE pasca penolakan oleh masyarakat Perancis dan Belanda atau penyelerasan ketimpangan ekonomi antara negara anggota UE sendiri. UE dengan cerdas pula tidak menonjolkan isu agama dan budaya (Islam) sebagai alasan penundaan. "Kami memang berjuang keras untuk bisa menjadi anggota Uni Eropa, tetapi itu bukanlah segala-galanya. Kalaupun akhirnya nanti kami diputuskan tidak bisa diterima, perekonomian dan kehidupan masyarakat kami tidak akan terganggu. Masih banyak hal yang bisa kami lakukan tanpa perlu menjadi anggota Uni Eropa," keyakinan itu disampaikan M Raif Karaca, Ketua Departemen Urusan Afrika dan Asia Timur Kementerian Luar Negeri Turki.⁹⁹

Usaha yang dilakukan Turki untuk menjadi bagian penuh Eropa sudah dirintis 40 tahun lalu ketika negara itu menandatangani kesepakatan berasosiasi dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community*). Pencalonan Turki itu, dinilai beberapa kalangan, memberikan kesempatan kepada Eropa untuk menepis tuduhan bahwa mereka adalah "klub orang-orang Kristen".

100

Dengan jumlah penduduk 72 juta dan sekitar 99 persennya beragama Islam, Turki memang akan bisa memberikan warna yang lain ke dalam Uni Eropa (UE) jika negara itu bisa diterima. Akan tetapi, justru di situ pula letak persoalannya, perbedaan agama yang dianut dianggap juga sebagai perbedaan tata nilai dan cara pandang sehingga sejumlah negara UE langsung menolak bergabungnya Turki di UE. Meski motif agama ini tidak pernah diakui secara terang-terangan, bahkan selalu dibantah, motif tersebut nyatanya cukup sering disebut dalam diskusi-diskusi mengenai lamaran Turki jadi anggota UE.

⁹⁹ Dikutip dari Perkataan Perdana Menteri Turki yang diakses melalui www.dw.com

¹⁰⁰ Ibid

Seyfi Tashan, Direktur Institut Kebijakan Luar Negeri Turki, Bilken University Ankara, berpendapat, jika melihat ada beberapa negara bekas Uni Soviet yang kini sudah menjadi anggota Uni Eropa meski banyak penduduknya beragama Islam, maka masalah agama kemungkinan besar bukan faktor utama sebagai alasan keberatan sejumlah rakyat Eropa. "Turki ini negara yang sangat sekuler, seperti umumnya negara Eropa. Jadi, untuk apa khawatir dengan kenyataan bahwa mayoritas warga Turki adalah pemeluk Islam," ujarnya.

Alasan yang disampaikan UE atas "lamaran" Turki memang beragam, antara lain catatan pelanggaran hak asasi manusianya yang di bawah standar UE, masalah pembantaian bangsa Armenia pada tahun 1915, persengketaannya dengan Yunani yang sudah lebih dulu menjadi anggota UE, masalah Siprus, serta sejumlah ketentuan perundangannya yang dianggap belum selaras atau masih "di bawah standar" UE.

Memang banyak sekali yang harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Uni Eropa, dan kami terus berusaha melakukan berbagai penyesuaian itu, papar Wakil Sekjen Gabungan Kamar Dagang dan Pertukaran Komoditas (TOBB) Turki Ali Emre Yurdakul.¹⁰¹

Menurut Yurdakul, pada tahun 2008 Komisi Eropa sudah mengumumkan laporan kemajuan Turki dan di sana disebutkan bahwa di bidang politik Turki sudah sepenuhnya memenuhi kriteria yang disyaratkan. Sekarang kami berusaha memenuhi kriteria ekonomi lainnya. Yang kami lakukan sebagai TOBB adalah menginformasikan kepada anggota mengenai apa itu artinya keanggotaan, bagaimana mereka harus menyiapkan diri dalam keanggotaan di UE karena ada kompetisi yang ketat dalam mendapatkan keanggotaan, tutur Yurdakul.

Sejak mengambil alih kursi pemerintahan pada tahun 2002, PM Recep Tayyip Erdogan dan Partai Pembangunan dan Keadilannya (AKP) telah berhasil menanamkan modal politiknya lebih luas dengan memperkenalkan reformasi untuk membawa Turki sejajar dengan standar-standar UE. Masalah-masalah yang

¹⁰¹ Ibid

semula dianggap tabu, seperti hak berbahasa warga Kurdi dan peran militer, kini bagian dari perdebatan sehari-hari. Turki bahkan sudah lebih dulu menjadi bagian "pakta militer Eropa", yaitu anggota NATO.

Akan tetapi, semakin kuat Turki berusaha memenuhinya dan bisa memenuhinya, tampak semakin jelas juga adanya motif lain dibalik penolakan sebagian Eropa terhadap Turki itu. Selain persoalan agama yang dianggap sebagai basis cara pandang yang berbeda, jumlah penduduknya yang besar, termasuk "daya jelajah" warga Turki ke seluruh wilayah Eropa sehingga ada kantong-kantong warga Turki hampir di seluruh negara Eropa, tampaknya memang menjadi salah satu "ancaman" bagi sebagian warga Eropa.

Prof Talat S Halman, Dekan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Bilken di Ankara, menilai bergabungnya Turki ke Uni Eropa hanyalah soal waktu karena secara tradisional hampir di segala bidang Turki sejak lama sudah berhubungan dengan Eropa. "Kalaupun secara formal, misalnya, tidak bisa menjadi anggota Uni Eropa, hubungan rakyat Turki dengan rakyat Eropa dari berbagai negara itu akan terus berlangsung dan tidak mungkin diputuskan," ungkapnya.

Masuknya Turki menjadi bagian Uni Eropa, seperti disampaikan Niyazi Euren Akyol, Sekretaris Pertama Wakil Dirjen untuk urusan Afrika dan Asia Timur Kementerian Luar Negeri Turki, akan sangat bermanfaat bagi banyak negara lain, termasuk Indonesia. Sebagai sesama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Turki bisa menjadi pintu gerbang bagi produk-produk negara anggota OKI untuk bisa menembus pasar Eropa.

Keberadaan Turki di Uni Eropa juga tentu akan memberikan warna yang lain kepada Eropa. Setidaknya kami bisa memberikan wawasan mengenai negara-negara Islam kepada negara-negara Eropa sehingga mispersepsi bisa dikurangi

Sayangnya, dalam perjuangan menjadi anggota UE, Turki tampak berjuang sendirian. Memang ada sejumlah negara UE yang mendukung masuknya Turki, tetapi dukungan serupa itu hampir tidak pernah terlihat disampaikan

sejumlah negara lain di luar Eropa. Di sisi lain, Turki pun seperti tampak enggan meminta dukungan negara-negara di luar Eropa, dari Asia misalnya. Agaknya sekaranglah saatnya dukungan itu diberikan kepada Turki.

Sejak sepuluh tahun ini Parlemen Eropa melakukan studi situasi hak azasi manusia di seluruh dunia dan juga menilai kebijakan hak azasi manusia di dalam wilayah Uni Eropa. Pelapor khusus urusan hak azasi manusia Uni Eropa kali ini adalah anggota parlemen Eropa dari fraksi sosial demokrat Spanyol, Raimon Obiols i Germà.

Laporannya mengenai situasi hak azasi manusia ini disetujui 429 anggota parlemen. Hanya 36 orang yang menolaknya, dan 55 abstain. Sejak tahun 2007, isi laporan hak azasi manusia Uni Eropa tidak banyak berubah, hanya kritik terhadap Rusia dilontarkan dengan lebih halus, karena sejak tahun 2007, kasus pembunuhan wartawan Anna Politkovskaya masih menghiasi laporan tahun berikutnya.

Para anggota parlemen menyerukan agar Uni Eropa tidak hanya mengutuk pelanggaran hak azasi manusia di seluruh dunia, tapi juga memberikan contoh yang baik bagi seluruh dunia. Untuk itu Uni Eropa semestinya memperbaiki politik migrasi dan juga mengamati kritis kebijakan Uni Eropa dalam tindakan pemberantasan terorisme. Selain itu, Uni Eropa juga semestinya mengukuhkan penataan hak azasi manusia sebagai landasan perjanjian kerja sama dengan negara mitra.

Menurut Parlemen Eropa, negara-negara kandidat anggota Uni Eropa masih perlu memperbaiki situasi hak azasi manusia mereka, namun saat ini negara-negara itu menunjukkan kemajuan berarti. Misalnya, keputusan pemerintah Turki untuk mengizinkan siaran stasiun televisi berbahasa Kurdi. Namun, anggota parlemen tetap meminta Turki untuk lebih melindungi kebebasan berpendapat.

“Laporan ini menyatakan terutama posisi bersama institusi Uni Eropa mengenai situasi hak azasi manusia di Turki. Proses menuju keanggotaan masih

terbuka dan saya harap perundingan dapat ditutup dengan kesepakatan, tapi itu hanya dapat berjalan dengan lambat. Turki merupakan masyarakat muda yang merasa bahwa dirinya Eropa. Turki akan melanjutkan proses reformasinya,” ujar Obiols i Germà.¹⁰² Kesimpulannya, Turki memang dikritik dalam laporan ini, tapi kritiknya relatif halus. Hal itu dapat dipahami, dengan alasan taktis, demikian menurut wakil ketua fraksi sosial demokrat Parlemen Eropa, Hannes Swoboda.

Uni Eropa memiliki misi meningkatkan kualitas hidup yang merata dan memperkaya identitas budaya bersama. Banyak perbaikan dilakukan dalam hal kebijakan mengenai ekologi, ekonomi, emansipasi wanita, seni dan musik, ilmu pengetahuan, legislasi, hukum sosial serta problem migrasi. Pada tahun 2007 ini EU merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan GDP sebesar US\$ 15.7 triliun. EU memberlakukan satu pasar (single market) dengan kebijakan-kebijakan yang sama bagi seluruh anggotanya. Di sini terlihat bahwa keadilan benar-benar dijunjung tinggi.

Banyak negara-negara lain di kawasan Eropa berlomba-lomba untuk bisa menjadi anggotanya. Negara yang sekarang berusaha menjadi anggota EU adalah Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro dan Serbia. Rencana keikutsertaan Turki dalam EU masih diperdebatkan karena perbedaan jumlah penduduk dan kebudayaan yang terlalu besar (Islam konservatif) serta standard hidup yang masih rendah, namun perjuangan pemerintah Turki yang sekuler ini tetap mendapat banyak dukungan. Dalam kasus ini nampaknya perbedaan ideologi bisa mengalah terhadap kesadaran untuk maju.

Namun tidaklah mudah untuk bisa menjadi anggota EU. Sistem administrasi negara, masalah hukum dan hak azasi serta kebijakan ekonomi harus disetarakan dengan standard EU untuk menjamin terwujudnya sinergi yang kuat.

EU sepakat mendistribusikan dana bersama (1,045% dari GDP EU) untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang vital, seperti infrastruktur lintas-perbatasan dan jaringan Trans-Eropa, terutama di negara-negara anggota barunya. Semua anggota harus mencapai tingkat ekonomi yang kompetitif sesuai dengan

¹⁰² Ibid

yang ditargetkan, yang apabila tidak tercapai akan ditindaklanjuti dengan sanksi. Konstitusi EU yang berdasarkan demokrasi, hak azasi manusia dan keadilan, dilengkapi dengan Dewan, Komisi dan Parlemen khusus.

Kepimpinan dipegang oleh presiden EU yang secara syah dipilih bergilir setiap 1,5 tahun di antara anggota-anggota yang termasuk dalam Dewan Negara-Negara Uni Eropa. Namun presiden EU tidak memiliki kekuatan legislatif maupun eksekutif, melainkan semata administratif, misalnya mengatur pertemuan dan memimpin sidang. Saat ini Komisi EU terus bergelut dalam tugas berat memformulasikan kebijakan-kebijakan bersama terutama berkaitan dengan bertambahnya jumlah anggota.

Perjalanan Turki untuk masuk menjadi bagian Eropa memasuki babak baru. Pemimpin Uni Eropa akhirnya bersepakat memulai pembicaraan keanggotaan Turki ke Uni Eropa. Babak baru ini memang tidak akan berjalan mulus, karena masih banyak jalan yang harus ditempuh oleh negara ini.

Sebagai awal permulaan, pegawai sipil Turki akan di undang ke markas Uni Eropa Brussels untuk mempelajari aspek hukum Uni Eropa. Pada saat bersamaan, pejabat-pejabat UE akan mempelajari detail perundang-undangan Turki, guna menentukan bidang apa saja yang akan mnjadi negosiasi fase pertama.

Perundingan itu adalah proses yang terbuka dan hasilnya belum bisa dipastikan kapan selesainya, paling cepat tahun 2014 Turki diterima sebagai anggota Uni Eropa. Hal ini dikarenakan oleh anggaran 2007-20013 yang sedang diperdebatkan tidak cukup untuk biaya akses Turki.

Turki akan memasuki proses yang panjang. Ada berbagai persyaratan yang harus dibenahi seperti sistem perundang-undangan, demokrasi, dan memperbaiki kinerja militer. Setelah satu sistem perundangan-undangan yang menjadi hambatan dalam RUU perselingkuhan. Paket RUU yang akan menggantikan hukum pidana Turki yang berumur 78 tahun itu disambut positif kalangan UE. Didalamnya terdapat hukman yang lebih berat bagi yang melakukan penyiksaan maupun pemerkosa. Juga terdapat klausul mengenai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang untuk pertama kali diatur dalam undang-undang Turki.

Namun, RUU itu menimbulkan kontroversi karena meletakkan permasalahan perselingkuhan di bawah pengadilan sipil. Turki diancam tidak bisa menjadi anggota UE jika tetap mengegolkannya. RUU itupun dikaji ulang seluruh pake hukum pidana tersebut agar memenuhi kriteria Copenhagen dan kriteria Maastricht. Kriteria tersebut merupakan syarat bagi setiap negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa.

Pada akhir september 2004 dalam kunjungan ke pemimpin UE di Brussels, Perdana Menteri Turki Edrogan akhirnya menegaskan, RUU perselingkuhan dibatalkan dan Turki akan mengadopsi paket hukum pidana baru. Dan masalah Turki pun masuk dalam agenda dalam pertemuan UE pada desember 2004.

Friksi lain yang muncul adalah tuntutan parlemen Eropa agar Turki mengakui membantai etnis Armenia pada 1915 yang dilakukan Ottoman. Masalah pembantaian ini merupakan isu signifikan bagi Perancis, khususnya dipihak oposisi.

Ganjalan lain terkait dengan masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa. Padahal, Turki belum mengakui negara Republik Siprus Yunani. Siprus terbagi berdasarkan etnis pada 1974, ketika pasukan Turki menguasai wilayah utara Siprus. Saat ini hanya Siprus Selatan yang masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Semua ganjalan tersebut menyebabkan Austria dan Denmark mendukung keinginan Turki masuk dalam keanggotaan Uni Eropa dulunya, tetapi mereka beranggapan bahwa Turki cukup menjadi mitra khusus Uni Eropa saja.

Turki menolak mitra khusus. Masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dianggap akan menyulitkan penyatuan Politik, dan Ekonomi karena dengan jumlah penduduk dan luas wilayah terlalu luas akan menyebabkan Turki memiliki lebih banyak kekuasaan di Uni Eropa. Turki dipandang miskin sehingga masuknya Turki akan menelan banyak dana Uni Eropa.

Dengan masuknya Turki dalam Keanggotaan Uni Eropa akan menyulut gelombang imgran Truki ke negara-negara Uni Eropa. Paling tidak membanjirnya tenaga kerja murah ke negara-negara Eropa Barat yang lebih makmur akan mempengaruhi perekonomian Eropa secara umum. Hal itu pula yang

memunculkan kewenangan Uni Eropa membatasi arus migrasi Turki samapi waktu tak terbatas, namun hal itu masih diperdebatkan.

Ancaman tersebut wajar jika dikaitkan dengan penolakan kaum pekerja Perancis terhadap konstitusi Uni Eropa. Salah satu penolakan itu karena bergabung nya Perancis dalam Uni Eropa justru meningkatkan angka pengangguran. Perusahaan-perusahaan lebih memilih pekerja dari kawasan Eropa Timur.

Para pendukung Turki mengatakan, sekalipun kekhawatiran akan tenaga kerja muda dan murah, Eropa harus melihat itu sebagai berkah yang dapat membantu kerisis demografi, dimana populasi penduduk dewasa Eropa meningkat dan tingkat kelahiran turun. Beberapa pekerja mengatakan hal itu menyangkut hal penting yakni membangun kompetisi seperti Cina dan India yang memasuki abad kekuatan ekonomi. Tanpa Turki, Eropa akan gagal membiayai kebutuhan dari penduduk dewasa.

Memang sangat panjang perjalanan yang harus dilalui oleh Turki. Bahkan apabila negosiasi selesai, Perancis dan Austria akan menggelar referendum untuk meratifikasi atau tidak traktat aksesinya Turki. Apabila ada diantara 25 negara anggota yang tidak mau meratifikasi traktat tersebut, maka Turki tidak akan bisa bergabung dengan Uni Eropa.

Salah satu hambatan besar yang harus diselesaikan adalah menyangkut kultur dan identitas Eropa. Turki merupakan negara Islam terbesar di Eropa dianggap bisa menjadi ancaman terhadap kultur dan identitas yang selama ini melekat dengan Eropa.

Turki secara kultural bukan dianggap Eropa. Pandangan bahwa Uni Eropa adalah sebagai klub orang Kristen masih melekat di tengah beberapa partai Demokrat Kristen di sekeliling Eropa menurut Jacques Chirac, Turki harus melakukan revolusi budaya untuk diterima menjadi anggota Uni Eropa, dan ia menghawatirkan berkembangnya fundamentalis Islam melalui Turki.

Menurut Tayyip Erdogan, dengan dimulainya pembahasan keanggotaan Turki merupakan kemenangan atas prasangka agama. Dengan demikian anggapan Uni Eropa merupakan klub Kristen pun telah ditepis. Kesepakatan yang telah

dicapai pada 3 Oktober lalu adalah kesuksesan Turki. Dengan mulai membicarakan Turki membuktikan Uni Eropa bukanlah sebuah klub Kristen.

Bahkan menurut organisasi konferensi Islam (OKI) mengatakan, dimulainya pembicaraan itu sebagai jalan menuju dialog antara kewarganegaraan . dengan suksesnya Turki, meningkatkan rasa percaya diri dan keteguhan hati diantara negara-negara dari dunia Islam, untuk mengikuti proses demokrasi dalam mengonsolidasi perdamaian di kawasan dan dunia.

Menurut Olli Rehn, komisaris perluasan keanggotaan Uni Eropa, pada bulan September, ia menyatakan bahwa reformasi konstitusi akan lebih mempercepat proses penyatuan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

Pengakuan masuknya Turki ke Uni Eropa merupakan pembuktian pada dunia, bahwa Turki bukan negara konservatif seperti negara Timur Tengah lainnya.

Adalah mimpi Kamal Attartuk untuk mmebawa negaranya menuju era modern setelah ia menghapus sistem khalifah, mengganti tulisan arab dengan abjad roman.¹⁰³

Ironisnya, sebuah partai dengan akar Islamis, Justice and Developmen Party (AKP), maju untuk membawa Turki menuju Eropa, dan hal yang patu dunia paling menarik, usaha ini dilakukan pada masa setelah tragedi 9-11 dimana saat itu dunia Barat menganggap cendrung menganggap Muslim sama dengan teroris. Dan bagai manapun Turki adalah negara muslim yang lebih modern.

Pimpinan AKP dan PM Tayyip Erdogan, sangat serius dalam memenuhi persyaratan Uni Eropa. Siaran berbahas Kurdi telah diperkenalkan pada bulan Juli lalu. Hukuman mati telah dihapus dan penyiksaan narapidana dalam penjara pun telah dilarang..yang paling fenomenal, dominasi militer atas pemerintah dalam bentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) telah dipersempit dengan cara menempatkan sipil sebagai kepala dan memberi kekuasaan lebih pada perwakilan yang dipilih rakyat.

Disamping itu Ankara mendapat simpati dari Eropa dengan menyetujui Sipprus Utara yang dibawah Turki untuk melakukan referendum reunifikasi

¹⁰³ Profil dan Potensi Negara Turki. *Deperindag Badan Pengembangan Ekspor Nasionakl Pusat Pengembangan Wilayah Pasar*. 1996 Hlm 1

sesuai formula PBB, yang di tolak Yunani yang lebih dahulu telah menjadi anggota Uni Eropa.

Menurut kalangan konservatif Turki, konstitusi yang berlaku di Turki sudah sering di amandemen (79 ayat telah diubah dan 13 amandemen telah di tambahkan dalam 26 tahun terakhir). Karena itu yang diperlukan sekarang ialah sedikit amandemen tambahan saja. Tetapi kelompok lain, dari kalangan sipil dan akademisi justru berpendapat bahwa Turki perlu menyelenggarakan musyawarah konstitusi dan merevisi konstitusinya secara menyeluruh, menurut mereka bahwa semangat yang ada dalam dokumen konstitusi saat ini harus diperbaharui. Mereka juga berpendapat bahwa Turki sudah tidak lagi dalam kekuasaan militer, dan sudah seharusnya konstitusinya mencerminkan hal tersebut.

Tetapi, meyakinkan para pemimpin politik bahwa reformasi konstitusi itu lebih diperlukan sekarang dan bukan nanti, serta memelihara *political will* untuk melaksanakannya bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, jika kita mengamati pernyataan Menteri Luar Negeri, Babacan, dan pernyataan pemimpin lainnya, reformasi konstitusi ini harus dilakukan, Turki membutuhkan kerangka konstitusi yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan melanjutkan reformasi.

Uni Eropa dan Turki mempersiapkan jawaban yang tepat untuk menanggapi satu pertanyaan khusus para wartawan. Yaitu pertanyaan terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dua minggu lalu, yang sampai sekarang masih melekat dalam ingatan menteri, komisaris dan wartawan. Dalam pandangan Obama, Turki termasuk Uni Eropa.

Dalam kunjungannya ke Eropa, Obama sempat singgah ke ibukota Ceko, Praha, yang merupakan lokasi pertemuan terakhir pembahasan penerimaan Turki ke Uni Eropa yang baru berakhir. Seorang wartawan menanyakan menteri luar negeri Ceko yang kini juga memegang jabatan ketua Dewan Eropa, Karel Schwarzenberg mengenai upaya Obama mendorong keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa. Schwarzenberg menanggapi dengan mengingatkan, memang pertemuan Uni Eropa dan Turki untuk mempercepat proses penerimaan Turki ke Uni Eropa: "Alasan kami bertemu di sini adalah untuk hal itu. Saya pikir, seruan

Presiden Obama sangat baik, namun sebenarnya pintu-pintu ke arah itu sudah terbuka."¹⁰⁴

Sementara komisaris Uni Eropa untuk urusan penerimaan anggota baru Olli Rhen melontarkan pernyataan yang lebih diplomatis. Rhen merasa gembira bahwa Obama dan Uni Eropa mempunyai kepentingan yang sama. Namun Rhen menekankan, Turki seharusnya berusaha berdamai dengan Armenia sekaligus menuntut, agar reformasi dilakukan segera: "Kami memacu Turki untuk merancang ulang sebagian konstitusinya. Seperti menjamin hak dan kebebasan warganya. Reformasi ini tidak hanya penting bagi proses masuknya Turki ke Uni Eropa, akan tetapi penting untuk Turki sendiri."¹⁰⁵

Sebaliknya Menteri Luar Negeri Turki Ali Babacan menyatakan, rangka perundingan penerimaan Turki sebagai anggota baru menuntut agar babak-babak perundingan diselesaikan dengan cepat. Babacan menolak segala bentuk penundaan yang beralasan politik. Sampai sekarang perundingan dibagi menjadi sepuluh babak dan hanya bagian ilmu dan penelitian yang bisa dibilang sudah tuntas. Babacan menekankan masih terlalu dini untuk memperdebatkan hasil akhir dari perundingan ini.

Proses penerimaan Turki sebagai anggota baru Uni Eropa telah disepakati secara mutlak oleh seluruh anggota Uni Eropa. Semakin lama kami mengamati, bahwa setiap negara anggota mempunyai gambaran lain terkait hasil akhir proses ini. Hal ini selalu berubah terutama setelah menggelar pemilihan umum dan pergantian pemerintahan. Tapi itu hal yang wajar.

Dengan pernyataan tersebut Menteri Luar Negeri Turki menyindir Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, yang menentang Turki sebagai anggota baru Uni Eropa. Mulai pertengahan tahun ini pemerintah Swedia akan menggantikan Ceko sebagai ketua Dewan Eropa. Karena itu juga, Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt hadir dalam pertemuan tersebut. Bildt mengatakan, Turki adalah mitra terpenting Uni Eropa kedua setelah Amerika Serikat.

¹⁰⁴ Ibid Hlm 33

¹⁰⁵ Ibid Hlm 35

Sektor industri di Turki merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomiannya. Industri petro kimia meningkatkan terus produksinya seperti poly propylene, ethyl line oxide, ethy line glycol, triper dan acritonitrile. Industri keramik dan industri karet sudah lama beroperasi malahan sejak kekaisaran Ottoman sudah ada produk porselen.

Industri semen meliputi berbagai jenis produksi semen dan batu bara. Industri perikanan Turki didasarkan pada penangkapan ikan disepanjang pantai utara dan diselat yang memisahkan bagian Asia dan Eropa dengan memanfaatkan perpindahan ikan dari laut Hitam ke laut Tengah. Industri besi dan baja dipusatkan di pantai laut Hitam yaitu tempat tambang batu bara Eregh dan Kirshir (tenggara Ankara). Kompleks pabrik baja dipelabuhan Aberden tergolong sebagai pabrik terbesar di Timur Tengah dengan 2 juta ton setiap tahun.¹⁰⁶

Istambul dengan fasilitas perdagangan dan transportasi, memiliki banyak industri yang menarik termasuk industri tembakau tekstil dari wol, bahan kimia dan bahan makanan, oleh karena itu pemerintah menyebarkan industri kesemua daerah memperoleh keuntungan, maka adanya Kayseri menjadi pusat bentuk tekstil dari kapas, telah menjadi pusat rersebar untuk permintaan gula dan kapas menjadi pusat pengolahan susu kering. Industri hasil kerajinan, seperti lilin (permadani anyaman sutra) terkenal dan bermutu tinggi.

Sektor Perdagangan

Dari sudut libarelisasi ekonomi, penguatan nilai tukar TL di atas nilai rill, bertentangan dengan tujuan antara lain peningkatan ekspor (EOI strategi) karena mengakibatkan penurunan daya saing di pasar global. Dengan pengendalian inflasi melalui penguatan TL akibatnya tidak hanya pada penuruna daya saing ekspor juga dengan melonjaknya impor. Menurut dari DIE impor selama 1995 adalah US\$ 35,7M. Meningkat US\$ 23,7 M.

Pilihan Ciller untuk mempererat depresiasi Tl terhadap mata uang utama, pada tahap awal, sebetulnya berhasilkan mengendalikan laju inflasi dan

¹⁰⁶ Ibid Hlm 40

mendorong dinamika pertumbuhan perekonomian domestik. Bahkan pertumbuhan ekonomi (GNP) naik mencolok mencapai 10% pada kuartal ketiga 1995 dalam tingkat harga konstan 1987.

Menurut data dari Intitut Statistik Negara (DIE) pertumbuhan domestikbruto (GDP) dalam tingkat rill adalah 9,5, sementara GNP selama Januari-September 1995 adalah 7,9%. Dengan posisi tersebut terjadi perbaikan radikal dari pertumbuhan minus (-) 61% pada periode yang sama tahun 1994.¹⁰⁷

Sektor industri merupakan penyumbang terbesar untuk pemulih ekonomi dengan kenaikan produksi selama 1995 adalah 12,2% dibandingkan dengan periode 1994. Sektor yang pertumbuhannya cukup pesat lainnya masing-masing adalah perdagangan 11,6%, jasa 7,5%, transportasi dan komunikasi 5,9% serta lembaga keuangan 0,4%. Sementara itu sektor yang mengalami pertumbuhan adalah konstruksi yang minus (-) 4,7%.

Pertumbuhan sektor swasta selama 1995 yang naik 20,9% dibandingkan dengan penurunan 11,8% tahun 1994 memperlihatkan keberhasilan strategi untuk memperkecil peranan negara dalam perekonomian. Tanda-tanda akan berlanjutnya pemulihan ekonomi tersebut diperkuat lagi dengan meningkatkannya jumlah pembentukan perusahaan baru yang selama Oktober 1995, menurut data dari DIE, berjumlah 3.924 perusahaan baru dan dengan pencatatan modal sebesar TL 7,49% triliun.

Walaupun selama periode tersebut dilaporkan juga penutupan sejumlah 1.036 perusahaan, yang mengisyaratkan masih kentalnya pengaruh tekanan ekonomi, bayang-bayang pemulihan ekonomi semakin kentara dengan meningkatnya upaya pembentukan bank yang memaksa pemerintah mengeluarkan persyaratan baru pendiri bank.

Dalam pengelolaan anggaran, kendatipun terjadi defisit sebesar TL 316,6 triliun, pemerintah merasa telah mencapai sasaran penting. Target tersebut antara lain pencapaian penerimaan 99,7% dengan sejumlah TL 1,4 kwadriliun (naik 86,6% dibanding tahun 1994) dan penurunan tingkat kenaikan pengeluaran dari 109,9% tahun 1994 menjadi 90,7% tahun 1995.

¹⁰⁷ Ibid Hlmaman 45

Selama 1996 kementerian keuangan menetapkan target penerima pajak sebesar TL 1,08 kwadriliun, penerimaan bukan pajak dan dana khusus dengan jumlah masing-masing TL 83,7 triliun dan TL 234,14 triliun. Meski demikian ada kekhawatiran yang sangat mendesak untuk anggaran 1996/1996 yang mulai berlaku tanggal 1 april 1996. Menurut menteri keuangan Lutfulah Kayalar, kendatipun perkiraan anggaran seperti pembayaran bunga utang domestik. Tahun 1996 pemerintahan telah mempersiapkan pembayaran bunga utang domestik sejumlah TL 796 triliun.

Namun untuk pembayaran bunga utang selama dua bulan pertama 1996 saja sudah berjumlah TL 173 triliun. Kekhawatiran Kayalar tersebut pada dasarnya merupakan inti persoalan perekonomian Turki. Dalam penilaian analisis persoalannya terletak pada keberhasilan UT untuk memasarkan Tbill dan menjadi sumber dana untuk pembayaran berbagai bunga hutang-hutang domestik yang jatuh tempo serta pembayaran yang jatuh tempo serta pembayaran gaji rutin sektor publik.

Namun yang selalu dilupakan dengan keberhasilan pemasaran T-bill dan juga perpanjangan jatuh temponya adalah lonjakan hutang domestik menjadi TL 1,5 quadriliun dan peningkatan bunganya. Menurut analisis akan sangat diragukan keberhasilan peningkatan penerimaan dari pajak (kendatipun baru dilaksanakan reformasi sistem perpajakan) akan mampu melunasi pembayaran hutang dan bunga hutang domestik selama 1996, terutama dengan perkiraan hilangnya penerimaan pabean dari Uni Eropa (EU) dengan penandaan tangan persamaan pabean (CU) dengan EU. Selama empat bulan pertama 1996 saja Kayalar memperkirakan defisit anggaran sudah mencapai TL 400 triliun.

Meskipun demikian, IMF yang merupakan arsitek perancangan liberalisasi ekonomi, optimis dengan perkembangan perekonomian Turki. Bahkan IMF yakin dengan terus dilaksanakannya program swastanisasi Turki akan berhasil menurunkan inflasi ketingkat 50%. Karena itu tidak heran IMF mendukung pembiayaan program ekonomi dengan menyediakan sejumlah paket pinjaman khusus. Dalam pencarian dana paket pinjaman ke-5 sejumlah US\$ 116 juta, Dewan Eksekutif IMF menegaskan, bahwa peminjaman tersebut dilakukan karena Turki telah memenuhi kriteria yang mengharapakan IMF.

Kriteria tersebut antara lain tercermin dengan keberhasilan pengetatan lonjakan nilai tukar dan kenaikan inflasi.

Antara perkiraan optimisme IMF tersebut dapat disebut sebagai momentum pemulihan ekonomi, asumsi tersebut tampaknya tidak bertahan lama karena terganggu oleh krisis politik karena pecahnya pemerintah koalisi DYP-CHP yang memaksa Ciller untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Demirel.

Tekanan pelaksanaan pemilu tanggal 24 desember 1995 tidak saja menghambat semua peluang penerapan ekonomi juga langsung mempengaruhi semua instrument keuangan yang diharapkan dapat dikendalikan antara lain tingkat bunga, inflasi dan nilai tukar. Bahkan beberapa kebijaksanaan ekonommi Ciller, yang menjadi pengendalian pemerintah sementara sampai terbenruknya pemerintah hasil pemilu kemudian dicurigai sebagai upaya pemenangan pemilu.¹⁰⁸

Turkey Exports by Product Section in US Dollars – Yearly ¹⁰⁹

Section	2001	2002	2003	2004	2005	
0 - Food and live animals	\$3,316,181,000	\$3,071,256,000	\$3,943,801,000	\$5,044,325,000	\$6,512,339,000	All countries
1 - Beverages and tobacco	\$471,094,000	\$425,670,000	\$488,614,000	\$590,940,000	\$736,445,000	All countries
2 - Crude materials, inedible, except fuels	\$607,577,000	\$685,301,000	\$916,570,000	\$1,172,974,000	\$1,334,833,000	All countries
3 - Mineral fuels	\$444,538,000	\$683,083,000	\$980,128,000	\$1,429,137,000	\$2,641,023,000	All countries

¹⁰⁸ Ibid Hlmaman 45

¹⁰⁹ Diakses melalui [www. Indexmundi.com/http. Ekspor Turkey. Html](http://www.Indexmundi.com/http.EksporTurkey.Html) tanggal 1-7-09 Pukul 01.00 Wib

lubricants and related materials						
4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes	\$180,495,000	\$96,450,000	\$254,730,000	\$205,451,000	\$405,300,000	All countries
5 - Chemicals and related products, n.e.s.	\$1,272,078,000	\$1,370,090,000	\$1,725,205,000	\$2,342,365,000	\$2,801,266,000	All countries
6 - Manufactured goods classified chiefly by material	\$9,453,058,000	\$10,495,875,000	\$13,204,590,000	\$18,586,791,000	\$20,408,933,000	All countries
7 - Machinery and transport equipment	\$7,152,448,000	\$8,587,499,000	\$12,370,221,000	\$18,275,353,000	\$21,005,357,000	All countries
8 - Miscellaneous manufactured articles	\$8,099,397,000	\$9,878,182,000	\$12,658,869,000	\$14,757,837,000	\$15,947,496,000	All countries
9 - Commodities and transactions not classified elsewhere in the	\$337,079,000	\$468,574,000	\$710,113,000	\$715,782,000	\$1,106,838,000	All countries

SITC						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Dampak dari krisis politik tersebut mulai tersa dengan bergeraknya tingkat bunga yang berkisar 68,5 – 99% menjadi diatas 100%. Selain pengaruh akan dilaksanakannya pemil, peningkatan tingkat bunga juga dipicu oleh meningkatnya beban pembayaran hutang domestik. Pada akhir November 1995 hutang domestik bergerak dari TL 1,218 kwadriliun menjadi TI 1,248 kwadriliun.

Menurut data dari Under secretariat for Tresury (UT) selama 11 bulan tersebut hutang domestik naik 56,15% dibandingkan dengan total hutang domestik 1994. Dalam US\$ jumlah tersebut naik dari US\$ 21,3 miliar tahun 1994 menjadi US\$ 23,9 miliar dengan peningkatan 12%.

Selain itu spekulasi terjadinya devaluasi, atau setidaknya depresiasi tajam TL terhadapury (UT

US\$ 11,07 miliar dan US\$ 10,4 miliar pada tahun 1997. Selama dua bulan pertama 1996 Turki sudah melunasi pembayaran hutang luar negeri sejumlah US\$ 1,21 miliar.

Pesoalannya sekarang adalah kondisi keuangan Turki yang semakin memburuk. Menurut laporan Bank Sentral Turki selama november 1995 defisit neraca transaksi berjalan mencapai US\$ 879 juta. Jauh melonjak dibandingkan defisit neraca transaksi berjalan bulan sebelumnya yang hanya berjumlah US\$ 25 juta. Dibandingkan dengan tahun 1994 yang surplus sebesar US\$ 2,5 miliar, defisit neraca transaksi berjalan selama 11 bulan pertama 1995 mencapai US\$ 958 juta.

Neraca Perdagangan Posisi neraca perdagangan selama 1995 tidak terlalu mendukung. Defisit neraca perdagangan berjumlah US\$ 14,07 miliar (65,04%), jauh di atas tingkat yang sama tahun 1994 yang hanya berjumlah US\$ 5,16 miliar (28,52%) selama 1995 ekspor naik US\$ 3,53 miliar (19,5%) tetapi lonjakan impor jauh lebih tinggi dengan kenaikan US\$ 12,43 miliar (53,5%).

Turkey Imports by Product Section in US Dollars - Yearly¹¹⁰

Section	2001	2002	2003	2004	2005	
0 - Food and live animals	\$735,741,000	\$1,047,645,000	\$1,604,010,000	\$1,817,607,000	\$1,615,878,000	All countries
1 - Beverages and tobacco	\$296,431,000	\$218,006,000	\$250,248,000	\$270,022,000	\$298,876,000	All countries
2 - Crude materials, inedible, except fuels	\$2,435,057,000	\$3,663,107,000	\$5,160,437,000	\$6,969,911,000	\$7,660,516,000	All countries
3 - Mineral fuels, lubricants	\$6,140,805,000	\$7,169,912,000	\$8,585,735,000	\$11,132,807,000	\$15,764,234,000	All countries

¹¹⁰ Diakses melalui www.indexmundi.com/http.Imports_turkey.html tanggal 1-7-09 Pukul 01.00 Wib

and related materials						
4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes	\$321,012,000	\$413,905,000	\$512,100,000	\$531,907,000	\$744,731,000	All countries
5 - Chemicals and related products, n.e.s.	\$6,157,927,000	\$7,797,742,000	\$10,277,390,000	\$14,049,069,000	\$16,166,494,000	All countries
6 - Manufactured goods classified chiefly by material	\$6,642,758,000	\$8,766,293,000	\$11,623,540,000	\$16,523,007,000	\$19,989,660,000	All countries
7 - Machinery and transport equipment	\$12,635,622,000	\$15,593,104,000	\$21,509,601,000	\$33,704,169,000	\$37,808,892,000	All countries
8 - Miscellaneous manufactured articles	\$2,533,486,000	\$2,969,634,000	\$3,795,638,000	\$5,354,340,000	\$6,615,182,000	All countries
9 - Commodities and transactions not classified elsewhere in the	\$3,500,236,000	\$3,630,837,000	\$6,020,992,000	\$7,186,928,000	\$10,109,685,000	All countries

SITC						
----------------------	--	--	--	--	--	--

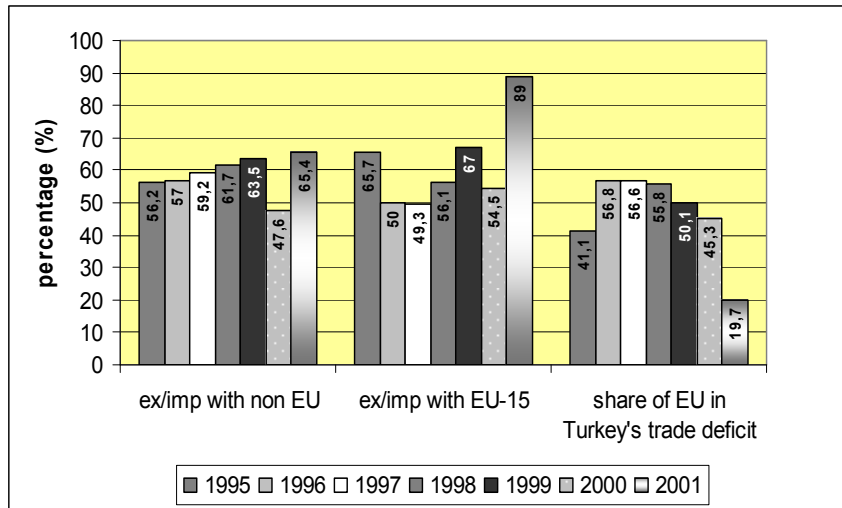
Sektor industri merupakan penyumbang ekspor sebesar dengan jumlah US\$ 18,91 miliar (87,4%), diikuti masing-masing oleh sektor pertanian dengan ekspor US\$ 2,31 miliar (10,7%) dan pertambangan 405,6 juta (1.9%). Sementara itu impor produk industri selama periode yang sama berjumlah US\$ 29.77 miliar (83.4%), pertambangan US\$ 3.47 miliar (9.7%) dan pertanian US\$ 2,45 miliar (6,9%). Dari komposisi ekspor didominasi oleh barang konsumsi senilai US\$ 12,57 miliar (58,1). Bahan mentah US\$ 5.54 miliar (25.6%), barang modal US\$ 3.52 miliar (16.35%). Sementara itu komposisi impor dilihat dari prospek perindustrian sangat bagus karena didominasi oleh bahan mentah US\$ 20.8 miliar (58.3%), barang modal US\$ 10.48 miliar (29.4%) dan barang konsumsi US\$ 4.41 miliar (12,4%).

Evaluasi Singkat Perdagangan Turki dengan Uni Eropa setelah Bergabung dengan Costum Union (dalam US\$)

Tabel 1: Perdagangan Turki dengan UE-15 dan Non Anggota UE (dalam US\$)

Sources: Undersecretariat of Foreign Trade, State Institute of Statistics, Eurostat.

Figure 2: Turkey's 'exports/imports ratio' for EU & non-EU



Countries.

Sources: Undersecretariat of Foreign Trade, State Institute of Statistics, Eurostat.

Table 1: Turkey's Trade in 1995 & 2001 by Main Partners.

Partners	1995					2001				
	Value of exp (mill. \$)	% Share	Value of imp (m. \$)	% Share	Trade balance	Value of exp (m. \$)	% Share	Value of imp (m. \$)	% Share	Trade balance
Total	21,637	100	35,709	100	-14,072	31,340	100	41,399	100	-10,059
EU-15	11,078	51.2	16,860	47.2	-5,782	16,078	51.3	18,059	43.6	-1,981
Germany	5,036	23.3	5,548	15.5	-512	5,367	17.1	5,335	12.9	32
USA	1,514	7.0	3,724	10.4	-2,210	3,134	10	3,261	7.9	-127
Italy	1,457	6.7	3,193	8.9	-1,736	2,342	7.5	3,484	8.4	-1,142
UK	1,136	5.3	1,830	5.1	-694	2,175	6.9	1,914	4.6	261
France	1,033	4.8	1,996	5.6	-963	1,895	6.1	2,284	5.5	-389
Russia	1,238	5.7	2,082	5.8	-844	924	3	3,436	8.3	-2,512
Japan	180	0.1	1,400	3.9	-1,220	124	0.4	1,307	3.2	-1,183

Sources: Undersecretariat of Foreign Trade, State Institute of Statistics, Eurostat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Prinsip perluasan Uni Eropa adalah semua anggota harus memenuhi ketentuan yang dimiliki oleh Uni Eropa saat ini, antara lain menyangkut isu politik (kecuali bagi Siprus dan Malta), hukum serta kerjasama dibidang lain seperti industri, lingkungan, pembangunan, bea cukai dan liberalisasi perdagangan termasuk isu yang berkaitan dengan perdagangan.

Perluasan Uni Eropa bertujuan untuk secara progresif membentuk perdagangan bebas antara Uni Eropa dengan calon negara anggota, dengan dasar repositas namun dalam kaedah asimetris. Dengan kata lain, liberalisasi akan lebih cepat diimplementasikan oleh Uni Eropa di satu sisi dibandingkan calon negara anggota disisi lainnya.

Persyaratan untuk menjadi anggota Uni Eropa mencakup 30 pokok perundingan untuk disepakati yaitu meliputi:

free movement off goods, freedom of movement persons, freedom to provide services, free movement of capital, compaty law, competition policy, agriculture, fisheries, transport policy, taxation, economic, and monetary union, statistic, employment and social policy, energy, industrial policy.

Perluasan Uni Eropa dengan berbagai komitmen yang disepakati calon negara anggota. Negara akan menciptakan peluang yang makin besar, namun sebaliknya juga dapat mengancam eksistensi dari produk mitra dagangnya. Untuk itu bagi negara yang ingin melakukan transaksi dagang dengan negara Uni Eropa perlu melakukan langkah strategis proaktif untuk meningkatkan kesiapannya, sehingga Uni Eropa dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja khususnya dibidang industri dan perdagangan.

Perluasan keanggotaan Uni Eropa dalam kaitannya dengan perdagangan di titik beratkan pada upaya pencapaian kesepakatan dalam pemindahan barang secara bebas serta penyelesaian masalah kepabeanan.

Perpindahan barang secara bebas merupakan satu landasan baik dalam melaksanakan perdagangan internal maupun internasional, karena pada akhirnya Uni Eropa akan menjadi pasar tunggal. Prinsip perpindahan secara bebas memerlukan kerangka aturan yang seragam di semua negara anggota guna memberikan kepastian agar produk dapat berpindah secara bebas dari suatu negara ke negara lain dalam satu kepabeanaan.

Hal ini berarti bahwa standar teknis, stratifikasi produk dan definisi pengukuran dapat harus diterapkan melalui peraturan yang berlaku ditingkat Eropa. Ketentuan yang mengatur aspek tersebut dapat disederhanakan menjadi dua kelompok yaitu produk yang harmonisasi standar secara umum telah diadopsi dan produk yang belum mencapai harmonisasi standar.

Dengan demikian, fokus bahasan penting dalam perundingan mengenai perpindahan barang secara bebas adalah penyesuaian bagi produk yang standarnya belum diharmonisasikan.

Berkaitan dengan perpindahan barang secara bebas, calon negara anggota pada hari pertama resmi sebagai anggota Uni Eropa harus sudah mampu melakukan pengawasan diperbatasan sebagai perluasan perbatasan dari perbatasan wilayah Uni Eropa.

Oleh sebab itu, berbagai aspek yang menyangkut masalah kepabeanaan sudah diharmonisasikan, antara lain meliputi *Costum Code* dan implementasi ketentuan yang berlaku di Uni Eropa, *Combained Nomenclature*, *Common Custom Tariff*, *Kuota Tariff*, *Tariff Suspensions* serta pengaturan yang terkait dengan kepabeanaan, barang bajakan dan palsu, standar, pengawasan atas produk guna melindungi kesehatan dan juga keselamatan konsumen, ekspor barang dan obat-obatan.

Kinerja calon negara anggota Uni Eropa dengan dunia serta kinerja perdagangan Uni Eropa dengan calon negara anggota dapat memberikan gambaran mengenai besarnya volume/nilai produk yang harus mengikuti peraturan Uni Eropa dalam perpindahan barang, baik dalam perdagangan internal maupun perdagangan internasional.

Jika perluasan keanggotaan Uni Eropa resmi telah ditetapkan, maka perdagangan calon negara anggota dengan dunia akan menjadi bagian dari

perdagangan eksternal Uni Eropa. Pada tahun 2000 impor calon negara anggota dari dunia mencapai sebesar Euro 252,8 miliar atau 4,7% dan eksportnya sebesar Euro 178,7 miliar atau 3,5 %, mengalami peningkatan sejak tahun 1993.

Sementara itu, kinerja perdagangan Uni Eropa dengan calon negara anggota juga meningkat sejak tahun 1989, pada saat Uni Soviet memberikan konsesi perdagangan bagi negara bekas blok Soviet. Pada tahun 2001 impor Uni Eropa dari calon negara anggota tercatat sebesar Euro 132,9 miliar (13%) atau menempati urutan ke dua sebagai negara asal impor Uni Eropa dai dunia, sedangkan Ekspor Uni Eropa mencapai sebesar Euro 151,1 miliar (15,5%).

Komoditi utama dalam impor Uni Eropa dari calon negara anggota meliputi tekstil dan pakaian 29,4% dan mesin 11,5% sedangkan komoditi utama dalam Ekspor Uni Eropa ke calon negara anggota terdiri dari tekstil dan pakaian 28,3%, mesin 15,3% dan transportasi material 14,4%.

Perluasan Uni Eropa dapat berdampak positif atau negatif bagi negara non anggota Uni Eropa dalam sektor industri dan perdagangan. Beberapa kondisi yang positif (*“faforable”*) dan negatif (*“unfaforable”*) sebagai konsekuensi perluasan Uni Eropa bagi negara non anggota Uni Eropa antara lain: Pasar Uni Eropa akan semakin besar dari aspek populasi daya beli relatif besar, jumlah penduduk Uni Eropa saat ini (15 negara anggotanya) sebesar 379 juta jiwa akan meningkat menjadi sebesar 453,2 juta jiwa (tambahan dari 10 negara baru) dengan GDP sebesar 10,03 triliun Euro dan GDP perkapita sebesar lebih dari 22.000 Euro tahun 2002.

Tambahan penduduk dari 10 calon negara relatif besar yaitu 19,6% dari jumlah penduduk Uni Eropa yang diperluas, dengan tambahan GDP relatif sedikit yaitu hanya 9% dari jumlah GDP yang diperluas (Uni Eropa dengan 25 negara anggota). Sebagaimana di maklumi bahwa kinerja Uni Eropa dalam perdagangan dunia tahun 2002 nilai ekspor telah mencapai ekspor 2.441 miliar USD atau 39% dari total ekspor dunia dan nilai impor tercatat sebesar 2.438 miliar USD atau 37,5% dari total impor dunia.

Dalam perkembangannya, dapat disimpulkan bahwa kinerja perdagangan Uni Eropa tersebut dicapai besar melalui perdagangan internal (antar negara anggota Uni Eropa) yaitu sebesar 62% dan 38% melalui perdagangan eksternal (dengan negara lain diluar Uni Eropa) dari kondisi tersebut dapat dilihat gambaran bahwa perluasan Uni Eropa akan memberikan akses yang semakin banyak.

Bagi neo-liberal institusionalis, kerjasama antar Siprus dan Uni Eropa dimungkinkan dengan adanya keuntungan bersama (*mutual benefits*) dari kedua belah pihak. Pada prinsipnya proses perluasan akan menguntungkan kedua belah pihak dan perluasan keanggotaan diperlukan untuk melengkapi integrasi kembali kawasan Eropa sekaligus menjamin stabilitas serta keamanan.

Dalam lingkup yang lebih kecil, perluasan juga akan membawa manfaat politik maupun ekonomis terhadap Uni eropa dan Siprus. Apabila reformasinya dijalankan dengan baik, Uni eropa maupun Siprus akan dapat memiliki tingkat perekonomian yang lebih maju, sehingga perluasan keanggotaan yang akan menerima siprus serta negara-negara CEECs lainnya dapat mengarah pada Uni Eropa yang lebih kuat.

Selain itu, guna mempersiapkan Siprus sebagai salah satu negara calon anggota Uni Eropa, Uni Eropa memberikan bantuan teknis dalam PHARE, ISPA, serta SAPARD untuk membantu mengadaptasi peraturan dan hukum pasar internal. Siprus menentukan langkah-langkah prioritas dan menekankan perkembangan serta infrastruktur administrasi yang perlu untuk implementasi secara efektif dalam kerangka kerja hukum dan peraturan pasar internal.

Kerjasama perdagangan antara Siprus dan Uni Eropa dapat membuka peluang bagi keanggotaan Siprus dalam Uni Eropa. Kerjasama perdagangan ini akan membuka pasar Eropa terhadap ekspor Siprus, mengalirnya arus investasi dari perusahaan-perusahaan di Uni Eropa dan pada akhirnya akan meningkatkan sektor perindustrian di Siprus. Selain itu, melalui kerjasama perdagangan ini diharapkan Siprus dapat meningkatkan kondisi ekonominya dan memenuhi salah satu syarat dari Kriteria Kopenhagen yaitu kriteria ekonomi yang ditetapkan oleh Uni Eropa pada tahun 1993.

Keanggotaan dalam Uni Eropa dianggap sebagai pengakuan akhir bahwa Siprus telah terintegrasi secara penuh dengan dan merupakan bagian dari Eropa. Pada dasarnya Uni Eropa merupakan suatu organisasi regional yang pada awalnya didirikan untuk menjembatani kerjasama di bidang ekonomi antara anggota-anggotanya, tetapi dalam perkembangannya meluas kebidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, budaya, hak asasi manusia dan sebagainya.

Oleh karena itu, kerjasama dibidang ekonomi khususnya perdagangan masih menjadi dasar pertimbangan utama bagi Uni Eropa untuk memberikan penilaian kepada negara-negara pemohon. Hal ini harus dilakukan untuk dapat terus mempertahankan kemapanan yang telah dimiliki oleh Uni Eropa sebagai suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara maju.

Sejak pengajuan permohonan secara resmi pada tanggal 5 april 1994, proses penerimaan siprus menjadi anggota tetap Uni Eropa membutuhkan upaya, waktu, dan kesabaran yang panjang. Siprus mulai memasuki tahapan negosiasi dengan Uni Eropa pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2002.

Hasil negosiasi tersebut, dilaporkan oleh Dewan Eropa dalam Konferensi Tingkat tinggi Uni eropa di Kopenhagen pada bulan Desember 2002. Salah satu hasil dari Konferensi tersebut adalah Dewan Eropa merekomendasikan Siprus sebagai anggota tetap Uni Eropa pada tahun 2004.

Dengan jumlah populasi yang tinggi serta perekonomian yang rendah dan juga belum diakuinya Siprus sebagai sebuah kedaulatan yang utuh maka sulit bagi Turki untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. Dengan demikian jika dan hanya jika Turki mau memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang ada maka Turki bisa masuk dalam keanggotaan Uni Eropa.

5.2 Saran

Akhirnya dengan segala kesulitan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran bagi penelitian berikutnya dengan tema yang sama.

Fenomena perluasan keanggotaan Uni Eropa merupakan suatu hal yang menarik dan dibutuhkan pengkajian yang lebih lanjut, dimana isu ini semakin menarik dengan seiringnya perputaran waktu. Permasalahan dari Implikasi masuknya Siprus menyebabkan sukarnya prasyarat Turki untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa bukan hanya masalah pengakuan kedaulatan saja tetapi banyak masalah domestik Turki sendiri yang tidak sesuai dengan neo-liberalis institusional.

Penelitian ini bisa menjadi meluas ke kawasan lainnya seperti perluasan keanggotaan ASEAN, seperti Jika Papua New Guenea ingin masuk menjadi anggota ASEAN pun seharusnya tidak banyak mendapatkan pertentangan dari anggota ASEAN yang lain karena faktor wilayahnya jelas-jelas berbatasan darat dengan wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Baylish, Jhon and Steve Smith. 1999. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Bennet, Leroy. 1995. *International Organization*. New Jersey: Prentice Hall.
- Coplin, William D. 1992. *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. Chicago: Rand McNally Collage Publishing Company.
- Dougherty, James E. Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 1997. *Contending Theories of International Relations*. Fourth Edition. New York: Harper Collins Publisher.
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hocking, Brian dan Michael Smith. 1990. *World Politics: An Introduction to International Relations*. Herfordshire: Harvester Wheatsheaf
- Holsti, K.J. 1995. *International Politics: A Framework for Analysis. Seventh Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hurrell, A. dan Kingsbury B. 1992. *The International Politics of the Environment: Actors, Interest and Institution*. Oxford: Clarendon Press.
- Keohane, Robert O. 1989. *International Relations and State Power*. Boulder: Westview Press.
- Lairson, Thomas D. dan David Skidmore. 1997. *International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth*. Florida: Harcourt Brace & Company
- Lane, Jan-Erik dan Svante O. Ersson. 1996. *European Politics: An introduction*. London: Sage Publications Ltd.
- Mas'ood, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.
- Papp, S. Daniel. 1997. *Contemporary International Relations: Framework For Understanding*. Fifth Edition. Boston: Allyn and Bacon Company.

- Plano, Jack C., Roy Olton dan Lawrence Zirring. 1995. *International Relations : A Political Dictionary*. California: ABC-CLIO, Inc.
- Rahman, Agus R. 1993. *Penelitian Perubahan Konfigurasi ekonomi-Politik Eropa: Pendalaman dan Perluasan Masyarakat Eropa*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik Dan Kewilayahan LIPI
- Rudy, T. May. 1996 . *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung : Bina Cipta.
- Rourke, John T. 1991. *International Politics on the World stage*. New York: Dushkin Publication Group Inc.
- Silalahi, Ulber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budhaya.
- Sukirno, Sadino. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses. Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI.
- Toma, Peter, dan Robert F. Gorman. 1991. *International Relations: Understanding Global Issues*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Utomo, R. Broto. 2001. *Studi Kawasan : Uni Eropa*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan DEPLU.
- Wiriaatmadja, Suardi. 1970. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung Pustaka Tinta Mas.

B. Terbitan Khusus

Report on the Results of Negotiations on the Accession of: Cyprus, Malta, Poland, the Slovak Republic, Latvia, Estonia, Lithuania, the Czech Republic and Slovenia to European Union. Prepared by Commission's departments

C. Internet

www. Eu. Int
 www. Cia. Gov
 www. pwcglobal.com
 www. kompas. com
 www. Indexmundi. com